



SUHATRI BUR
BUPATI PADANG PARIAMAN

RAHMANG
WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

tahun
2023



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang berisi target dan realisasi dalam membelanjakan keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, dituangkan ke dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun 2023 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu "**Padang Pariaman Berjaya**".

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.



SUHATRI BUR, SE, MM
BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang, 15 Maret 2024
BUPATI PADANG PARIAMAN


SUHATRI BUR

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. Penyusunan LKjIP menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata Kelola Pemerintahan yang baik Dimana Instansi Pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan Publik. LKjIP Kabupaten Padang Pariaman merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

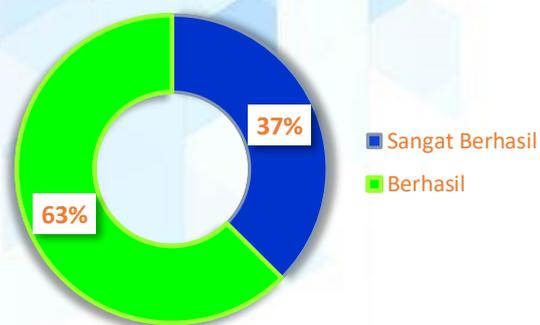
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan 7 (tujuh) Misi, 8 (delapan) Tujuan, 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis dan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dapat disimpulkan bahwa 9 indikator (37,5%) dikategorikan Sangat Berhasil dan 15 indikator (62,5%) dikategorikan Berhasil. Disamping itu, terdapat juga 3 (tiga) Indikator Kinerja (12,5%) yang mengalami peningkatan capaian dari kategori “Berhasil” ke kategori “Sangat Berhasil” yaitu : Persentase Penegakan Perda (114,70%), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (358,84%) dan Harapan Lama Sekolah (100,50%).

Dari total persentase capaian indikator diatas maka didapatkan rata-rata capaian kinerja keseluruhan dari 24 Indikator Kinerja pada tahun 2023 yakni sebesar 116,09% dengan kategori capaian “Sangat Berhasil”.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi target kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Pencapaian Indikator Sasaran Terhadap Capaian Kinerja



Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
2. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**



HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK I NIP 19810926 199912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ihtisar Eksekutif	ii
Pernyataan Telah di Reviu	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xii
Daftar Grafik	xviii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.2.1 Kondisi Geografis	2
1.2.2 Demografis	4
1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto	6
1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi	8
1.3 Struktur Organisasi	8
1.4 Sumber Daya Manusia	12
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Visi dan Misi	20
2.1.1 Visi	20
2.1.2 Misi	21
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	21
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	24
2.3 Perjanjian Kinerja	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Pengukuran Kinerja	47
3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama	48
3.3 Akuntabilitas Keuangan	256
3.4 Prestasi dan Penghargaan	258
BAB IV PENUTUP	262
4.1 Kesimpulan	262
4.2 Rencana Perbaikan Kedepan	263

Daftar Lampiran

1. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Padang Pariaman
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023
3. Matrik Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong di Kabupaten Padang Pariaman	3
Tabel 1.2	: Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Tahun 2023	5
Tabel 1.3	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023	5
Tabel 1.4	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	12
Tabel 1.5	: Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	17
Tabel 2.1	: Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2026	21
Tabel 2.2	: Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2026	25
Tabel 2.3	: Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman	41
Tabel 3.1	: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab	45
Tabel 3.2	: Pengukuran dengan Skala ordinal	48
Tabel 3.3	: Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	48
Tabel 3.4	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	51
Tabel 3.5	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023	52
Tabel 3.6	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	53
Tabel 3.7	: Daftar Nama Lembaga Penghasil Hafizh Hafizhah Tahun 2023	55
Tabel 3.8	: Hafiz/Hafizah yang lolos Gebupafa 2023	65
Tabel 3.9	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2023	66
Tabel 3.10	: Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2022 dan Tahun 2023	67
Tabel 3.11	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	67

Tabel 3.12	: Program dan Kegiatan Yang Mendukung Keberhasilan Capaian Kinerja	69
Tabel 3.13	: Anggaran untuk Kegiatan Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	69
Tabel 3.14	: Perbandingan Realisasi Anggaran & Realisasi Kinerja dalam Menunjang Keberhasilan Pencapaian IKU Tahun 2022 dan Tahun 2023	69
Tabel 3.15	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender	71
Tabel 3.16	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Indeks Pembangunan Gender	71
Tabel 3.17	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	72
Tabel 3.18	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Sasaran Strategis 3	76
Tabel 3.19	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sasaran Strategis 3	77
Tabel 3.20	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	77
Tabel 3.21	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sasaran strategis 4	80
Tabel 3.22	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sasaran Strategis 4	81
Tabel 3.23	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	81
Tabel 3.24	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Sasaran Strategis 5	83
Tabel 3.25	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Sasaran Strategis 5	84
Tabel 3.26	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	84
Tabel 3.27	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	87
Tabel 3.28	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2023 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	88
Tabel 3.29	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	88
Tabel 3.30	: Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	89

Tabel 3.31	: Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Perikanan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	90
Tabel 3.32	: Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023	92
Tabel 3.33	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	95
Tabel 3.34	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	96
Tabel 3.35	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	96
Tabel 3.36	: Kecamatan Dan Komiditi Yang Dihasilkan	101
Tabel 3.37	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	110
Tabel 3.38	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	111
Tabel 3.39	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	111
Tabel 3.40	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 7	115
Tabel 3.41	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Sasaran Strategis 7	115
Tabel 3.42	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah	116
Tabel 3.43	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 8	123
Tabel 3.44	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	123
Tabel 3.45	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	124
Tabel 3.46	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023	130
Tabel 3.47	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	130
Tabel 3.48	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Target Jangka Menengah	131
Tabel 3.49	: Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Target Jangka Menengah	136



Tabel 3.50	: Realisasi Belanja Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023	137
Tabel 3.51	: Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	144
Tabel 3.52	: Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023	144
Tabel 3.53	: Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 dan Tahun 2023 Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	145
Tabel 3.54	: Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah dengan Target Jangka Menengah	145
Tabel 3.55	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Sasaran Strategis 11	153
Tabel 3.56	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Sasaran Strategis 11	154
Tabel 3.57	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	155
Tabel 3.58	: Capaian Kinerja Kegiatan	159
Tabel 3.59	: Capaian Kinerja Kegiatan	160
Tabel 3.60	: Perusahaan Yang Telah dikunjungi	160
Tabel 3.61	: Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	163
Tabel 3.62	: Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023 Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	164
Tabel 3.63	: Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019 s/d 2023	164
Tabel 3.64	: Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	165
Tabel 3.65	: Penghargaan yang Diterima Tahun 2023	175
Tabel 3.66	: Perbandingan Indikator Kinerja Utama Sasaran Stategis 12 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dan Tahun 2023	177
Tabel 3.67	: Aspek Evaluasi SAKIP	177
Tabel 3.68	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	178
Tabel 3.69	: Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	182
Tabel 3.70	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai	183

	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023	
Tabel 3.71	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023	184
Tabel 3.72	: Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023	187
Tabel 3.73	: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	188
Tabel 3.74	: Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023	189
Tabel 3.75	: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023	189
Tabel 3.76	: Predikat Nasional Indeks SPBE	190
Tabel 3.77	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	190
Tabel 3.78	: Capaian Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Standar Nasional Tahun 2023	191
Tabel 3.79	: Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023	192
Tabel 3.80	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Sasaran Strategis 14	199
Tabel 3.81	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 Sasaran Strategis 14	200
Tabel 3.82	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	200
Tabel 3.83	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2023 Sasaran Strategis 14	201
Tabel 3.84	: Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	205
Tabel 3.85	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022 dengan Tahun 2023	206
Tabel 3.86	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	206
Tabel 3.87	: Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	220
Tabel 3.88	: Perbandingan Target dan Realisasi LPP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023	221
Tabel 3.89	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	221
Tabel 3.90	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase	230



	Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2023	
Tabel 3.91	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	231
Tabel 3.92	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	231
Tabel 3.93	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	234
Tabel 3.94	: Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan 2023	235
Tabel 3.95	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	236
Tabel 3.96	: Program dan Kegiatan yang mendukung capaian IKU	237
Tabel 3.97	: Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis 19	249
Tabel 3.98	: Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target dan Realisasi Tahun 2023 Pada Sasaran Strategis 19	250
Tabel 3.99	: Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD	251
Tabel 3.100	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	256
Tabel 3.101	: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023	256
Tabel 3.102	: Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	257
Tabel 3.103	: Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023	257
Tabel 3.104	: Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	258
Tabel 3.105	: Prestasi dan Penghargaan	258



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	4
Gambar 1.2	: Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman	10
Gambar 2.1	: Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026	23
Gambar 3.1	: Proses Seleksi Gebu Pafa di Kecamatan	53
Gambar 3.2	: Penyerahan Beasiswa Gebu Pafa kepada Hafizh/Hafizhah Tahun 2023	53
Gambar 3.3	: Penegakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	70
Gambar 3.4	: Patroli 3 Pilar (TNI, Polri Dan Satpol PP) dalam rangka persiapan menjelang Pemilu	70
Gambar 3.5	: Launching Nagari Ramah Perempuan & Peduli Anak	75
Gambar 3.6	: Penerimaan Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya) Tingkat NINDYA Tahun 2023	75
Gambar 3.7	: Peningkatan Jalan Hotmix DAU Paket 1 Tahun 2023	79
Gambar 3.8	: Pekerjaan Daerah Irigasi Maransi (DAK)	82
Gambar 3.9	: Pembahasan Lintas Sektor Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang di Kementerian ATR/BPN	86
Gambar 3.10	: Penghargaan dari Badan Pangan Nasional Peringkat Terbaik 3 Kategori Komitmen Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Program Genius	94
Gambar 3.11	: Penghargaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Peringkat 2 Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan	94
Gambar 3.12	: Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Juara Teladan 3 Penyuluh Pertanian PPPK	95
Gambar 3.13	: Pembangunan Pasar Rakyat di Pasar Pakandangan	99
Gambar 3.14	: Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar Lubuk Alung	100
Gambar 3.15	: Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten	101
Gambar 3.16	: Survei Komoditi Ekspor	102
Gambar 3.17	: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	103
Gambar 3.18	: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	104
Gambar 3.19	: Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	104

Gambar 3.20	:	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	105
Gambar 3.21	:	Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	105
Gambar 3.22	:	Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	106
Gambar 3.23	:	Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	107
Gambar 3.24	:	Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	107
Gambar 3.25	:	Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023	109
Gambar 3.26	:	Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Madya Tahun 2023	109
Gambar 3.27	:	Pelatihan Bagi IKM	113
Gambar 3.28	:	Pembinaan IKM	114
Gambar 3.29	:	Kunjungan Lapangan Kepada IKM	114
Gambar 3.30	:	Pendampingan IKM dalam Pembuatan Izin Usaha NIB	114
Gambar 3.31	:	Penyerahan Bantuan Sembako oleh Ketua LKKS	119
Gambar 3.32	:	Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ELNINO	119
Gambar 3.33	:	Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas	120
Gambar 3.34	:	Penyerahan Bantuan Bahan Makanan Dan Logistik oleh Bupati Padang Pariaman Bantuan Musibah Banjir Kp. Galapuang 2023 dan Bantuan Korban Kebakaran Nagari Cimpago V Koto Kp. Dalam 2023 oleh KADIS DINSOSP3A	121
Gambar 3.35	:	Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana Longsor di Kecamatan V Koto Kampung Dalam	122
Gambar 3.36	:	Dinsosp3A dan TAGANA Kab. Padang Pariaman melakukan TAGANA Masuk Sekolah di Batang Gasan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat	122
Gambar 3.37	:	Koordinasi dengan Dinas terkait Guna Melakukan Kerjasama	127
Gambar 3.38	:	Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	127
Gambar 3.39	:	Kegiatan Bazar di Sejumlah Pasar	127
Gambar 3.40	:	Sosialisasi Insilite	138
Gambar 3.41	:	Pembinaan Perpustakaan	139
Gambar 3.42	:	Layanan Perpustakaan Umum Daerah	139
Gambar 3.43	:	Layanan Perpustakaan Keliling	139
Gambar 3.44	:	Layanan Antar Jemput Pemustaka	140
Gambar 3.45	:	Pengadaan Buku Perpustakaan	140

Gambar 3.46	:	Lomba Bercerita dan Story Telling Tingkat SD/MI	140
Gambar 3.47	:	Pembangunan Perpustakaan Nagari Kudu Gantiang Barat	141
Gambar 3.48	:	Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Umum Daerah	141
Gambar 3.49	:	Kegiatan Sosialisai TPBIS	141
Gambar 3.50	:	Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan	147
Gambar 3.51	:	Kegiatan Proses Belajar Paket B di PKBM	148
Gambar 3.52	:	Kegiatan Rakor Terkait Guru Penggerak	149
Gambar 3.53	:	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Mobiler SMPN 5 Sungai Limau	149
Gambar 3.54	:	SIPINTAR	151
Gambar 3.55	:	SIBERSERI	151
Gambar 3.56	:	GEBU SIPAFA	152
Gambar 3.57	:	Penghargaan terkait Gelar Bukti Karya & Penganugerahan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Hari Guru Nasional 2023	152
Gambar 3.58	:	Piagam Perhargaan Dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Bidang Pendidikan	152
Gambar 3.59	:	Pelatihan Barista	156
Gambar 3.60	:	Pelatihan Menjahit	157
Gambar 3.61	:	Pelatihan Make UP	157
Gambar 3.62	:	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	157
Gambar 3.63	:	Kegiatan diluar program dalam bentuk Pelayanan Antar Kerja atau AK1	158
Gambar 3.64	:	Kegiatan Monitoring tentang Tata tertib Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan Update Data Perusahaan ke Perusahaan PT. Coca Cola Distribution	159
Gambar 3.65	:	Kegiatan Monitoring tentang tata tertib Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan Update Data Perusahaan ke PT Anai Land	159
Gambar 3.66	:	Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Awal Perlindungan Jamsos Bagi Pelaku Koperasi dan UMKM	161
Gambar 3.67	:	Koordinasi Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Perusahaan Srinjanya	161
Gambar 3.68	:	Fasilitasi Bipartit Kasus Perselisihan Hubungan Industrial PT Mandiri Karya Kirana	161
Gambar 3.69	:	Dalam Rangka Kunjungan Pengacara Kuasa Hukum Karyawan ter PHK PT Jaya Sentrikon Indonesia	162
Gambar 3.70	:	Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022	167
Gambar 3.71	:	Pembukaan Rekonsiliasi Dana BOS di Hall Saiyo	167
Gambar 3.72	:	Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023	167

Gambar 3.73	:	Penerimaan Penghargaan KPPN Award Kategori Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Semester 1 (Penyaluran Tercepat Dana Desa Dan Blt Melalui Aplikasi Omspan) kepada Kab. Padang pariaman oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	168
Gambar 3.74	:	Rapat Banggar DPRD dengan TAPD	168
Gambar 3.75	:	Pelaksanaan Rapat Terkait Kebijakan Akuntansi	168
Gambar 3.76	:	Pelaksanaan Rapat Rapat TP TGR	169
Gambar 3.77	:	Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD dan Dana BOK	169
Gambar 3.78	:	Koordinasi dan Pembelajaran Perekaman Data/ Informasi ASN Kab Padang Pariaman pada Aplikasi SIMGAJI	169
Gambar 3.79	:	Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	170
Gambar 3.80	:	Pemusnahan Barang Milik Daerah	170
Gambar 3.81	:	Inventarisasi Barang Milik Daerah	170
Gambar 3.82	:	Pelaksanaan Lelang Online Barang Milik Daerah	170
Gambar 3.83	:	FGD Penyusunan PPBR BPKD dengan Tim Inspektorat	171
Gambar 3.84	:	Evaluasi Kinerja THL di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	172
Gambar 3.85	:	Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Surat Menyurat (SRIKANDI)	172
Gambar 3.86	:	Entry Meeting SAKIP Tahun 2023	176
Gambar 3.87	:	Perbaikan Dokumen Perencanaan dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah	180
Gambar 3.88	:	Sosialisasi Aplikasi SIMAK Kinerja Kepada Seluruh Perangkat Daerah	180
Gambar 3.89	:	Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Kemenpan RB	181
Gambar 3.90	:	Reviu LPPD bersama Inspektorat	185
Gambar 3.91	:	Reviu Lanjutan/Perbaikan Data LPPD	185
Gambar 3.92	:	Rapat Finalisasi LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	185
Gambar 3.93	:	Penyerahan Laporan LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023	186
Gambar 3.94	:	Peresmian Command Centre Kabupaten Padang Pariaman	194
Gambar 3.95	:	Metodologi Penilaian SPBE	194
Gambar 3.96	:	Penghargaan Kabupaten Terinformatif pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik	198
Gambar 3.97	:	Publikasi Hasil SKM dan Sosialisasi Pelaksanaan SKM	202
Gambar 3.98	:	Penganugerahan Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang diberikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman	203
Gambar 3.99	:	Kunjungan Nifas	211

Gambar 3.100	: OJT Kegawatdaruratan dan Kegiatan Pendampingan Tim Ahli	211
Gambar 3.101	: Peningkatan Kemampuan Petugas	212
Gambar 3.102	: Kegiatan Bimtek Pencegahan STUNTING Menuju PAUD Berkualitas di INS Kayu Tanam	213
Gambar 3.103	: Penyuluhan dan Konseling Gizi (Asi eksklusif, MPASI, dan Pola Asuh Anak) di Nagari Toboh Gadang Selatan	213
Gambar 3.104	: Forum Kabupaten Sehat	214
Gambar 3.105	: Pelantikan Tim Kabupaten Sehat	213
Gambar 3.106	: Monev PISPK	217
Gambar 3.107	: Pelatihan Tenaga Kesehatan	217
Gambar 3.108	: Pelaksanaan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	218
Gambar 3.109	: Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dari Gubernur Sumatera Barat	219
Gambar 3.110	: Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor	223
Gambar 3.111	: Grand Final Pemilihan Duta GenRe Kab. Padang Pariaman	224
Gambar 3.112	: Kegiatan Bina Keluarga Balita	224
Gambar 3.113	: Penghargaan dari BKKBN Pusat Untuk Bapak Ibu Bupati yaitu MKK (Manggala Karya Kencana) untuk kepala daerah dan Ibu ketua TP PK	227
Gambar 3.114	: Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Juara I Kategori Role Model Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat	228
Gambar 3.115	: Penghargaan Ayah Bunda GenRe Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP PKK	228
Gambar 3.116	: Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Juara 2 Duta GenRe Putra Tingkat Provinsi Sumatera Barat	228
Gambar 3.117	: Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Pembina GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat	229
Gambar 3.118	: Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Juara Hafiz Putri Duta GenRe Tingkat Provinsi Sumatera Barat	229
Gambar 3.119	: Penghargaan Gubernur Sumatera Barat Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) Terbaik Semester1 Tahun 2023 Tingkat Provinsi	229
Gambar 3.120	: Pembangunan SPAM atau Peningkatan SPAM di Nagari Sunua	233
Gambar 3.121	: Inovasi NAN SIGAB	238
Gambar 3.122	: Inovasi SI SIGAB	238
Gambar 3.123	: Inovasi LENCANA	239
Gambar 3.124	: Inovasi SIAP AMAN	239
Gambar 3.125	: Inovasi PUSPA SADAR BANA	240
Gambar 3.126	: Inovasi SIMUNA V2	240
Gambar 3.127	: Inovasi PUSDAKA	241
Gambar 3.128	: Inovasi RENDA PENA)	241
Gambar 3.129	: Inovasi PRINSIPAL R-3P	242

Gambar 3.130	:	Inovasi DANA PAPA	242
Gambar 3.131	:	Inovasi SITABA	243
Gambar 3.132	:	Sosialisasi DESTANA di Nagari Kuranji	245
Gambar 3.133	:	Sosialisasi DESTANA di Nagari Katapiang	246
Gambar 3.134	:	Sosialisasi DESTANA di Nagari Manggopoh Palak Gadang	246
Gambar 3.135	:	Sosialisasi DESTANA di Nagari Malay V Suku	246
Gambar 3.136	:	Sosialisasi DESTANA di Nagari Pilubang	247
Gambar 3.137	:	Sosialisasi DESTANA di Nagari Ulakan	247
Gambar 1.138	:	Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan Berusaha Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Padang Pariaman	253
Gambar 3.139	:	Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengimputan LKPM Untuk Melaporkan Realisasi Investasinya ke dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	254
Gambar 3.140	:	Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Permasalahan dalam Pengurusan Izin dan Peralihan Aplikasi terkait LKPM Menggunakan Aplikasi OSS (Online Single Submission	254
Gambar 3.141	:	Penghargaan "OPINI KULITAS TINGGI (KATEGORI B)" Pada Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 Dari Ombusman RI	255
Gambar 3.142	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	255



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023	6
Grafik 1.2	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2021-2023	7
Grafik 1.3	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2021-2023	7
Grafik 1.4	: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023	8
Grafik 3.1	: Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023	72
Grafik 3.2	: Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2023	89
Grafik 3.3	: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	96
Grafik 3.4	: Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Tahun 2023	97
Grafik 3.5	: Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2022 dan Tahun 2023	112
Grafik 3.6	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023	116
Grafik 3.7	: Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/Income Per Kapita Tahun 2023	124
Grafik 3.8	: Capaian Kinerja IPLM Kabupaten dibandingkan Capaian Provinsi dan Capaian Nasional Tahun 2023	131
Grafik 3.9	: Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Standar Nasional Tahun 2023	146
Grafik 3.10	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023	154
Grafik 3.11	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023	155
Grafik 3.12	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP	178

	Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023	
Grafik 3.13	: Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023 Indeks Pelayanan Publik	201
Grafik 3.14	: Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023	207
Grafik 3.15	: Capaian UHH 19 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan 2023	207
Grafik 3.16	: Perbandingan Realisasi LPP Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023	222
Grafik 3.17	: Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Nagari Tangguh Bencana	235
Grafik 3.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023 Nagari Tangguh Bencana	237



padang pariaman
berjaya!

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Good Governance and Clean Government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat



dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bersih

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023



dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan serta dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder maka penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Padang Pariaman ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu :

1) Aspek Akuntabilitas Kinerja (dimensi eksternal), aspek ini bermakna bahwa Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder) atas capaian kinerja selama periode Tahun 2022. Keberadaan LKjIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.

2) Aspek Manajemen Kinerja (dimensi internal), aspek ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Kabupaten Padang Pariaman merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Padang Pariaman merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil kedua di Sumatera Barat setelah Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 1.343,09 km² atau sebesar 3,2 persen dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padahal dulunya kabupaten ini merupakan kabupaten dengan luas terbesar di Sumatera Barat sebelum diperluasnya Kota Padang pada tahun 1980 serta pemekaran Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999 dan Kota Pariaman pada tahun 2002.

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas wilayah administratif, yaitu :

Sebelah Utara	: Kabupaten Agam
Sebelah Selatan	: Kota Padang
Sebelah Timur	: Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
Sebelah Barat	: Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Secara astronomis terletak antara 0o 19' 15,68" - 0o 48' 59,868" Lintang Selatan dan antara 99o 57' 43,325" - 100o 27' 28,94" Bujur Timur. Kabupaten Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan yaitu Batang Anai, Lubuak Aluang, Sintuak Toboh Gadang, Ulakan Tapakih, Nan Sabaris, Anam Lingsuang, 2x11 Anam Lingsuang, 2x11 Kayu Tanam, VII Koto, VII Koto Patamuan, VII Koto Padang Sago, V Koto, V Koto Timur, Sungai

Limau, Batang Gasan, Sungai Garinggiang, dan IV Koto Aua Malintang. Tercatat bahwa Kecamatan 2x11 Kayu Tanam memiliki wilayah paling luas dengan luas sebesar 188,55 km² dan wilayah dengan luas terkecil terdapat pada Kecamatan Nan Sabaris dengan luas sebesar 23,01 km². Kabupaten Padang Pariaman memiliki pantai yang luas dengan panjang garis pantai sepanjang 42,11 km. Kemudian rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-1.925 meter dari permukaan laut. Selain memiliki pantai yang panjang Kabupaten Padang Pariaman memiliki 2 pulau yang terletak di Kecamatan Batang Anai dan Ulakan Tapakih serta dilewati oleh 12 sungai.

Kabupaten Padang Pariaman memiliki jumlah curah hujan yang tinggi. Sepanjang tahun 2023 tercatat rata-rata jumlah curah hujan dari Stasiun Meteorologi Minangkabau dan Stasiun Klimatologi Padang Pariaman sebanyak 4469,60 mm/tahun dengan rata-rata jumlah hari hujan dari kedua stasiun tersebut sebanyak 251 hari. Bulan Agustus tercatat sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu dengan rata-rata 570,45 mm/bulan dan rata-rata jumlah hari hujan tertinggi dari kedua stasiun ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 25 hari terjadi hujan.

Kabupaten Padang Pariaman sampai Tahun 2023 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari dan 600 korong sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016. Luas wilayah dan jumlah nagari setiap kecamatan berbeda-beda, dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan, Jumlah Nagari dan Korong
di Kabupaten Padang Pariaman

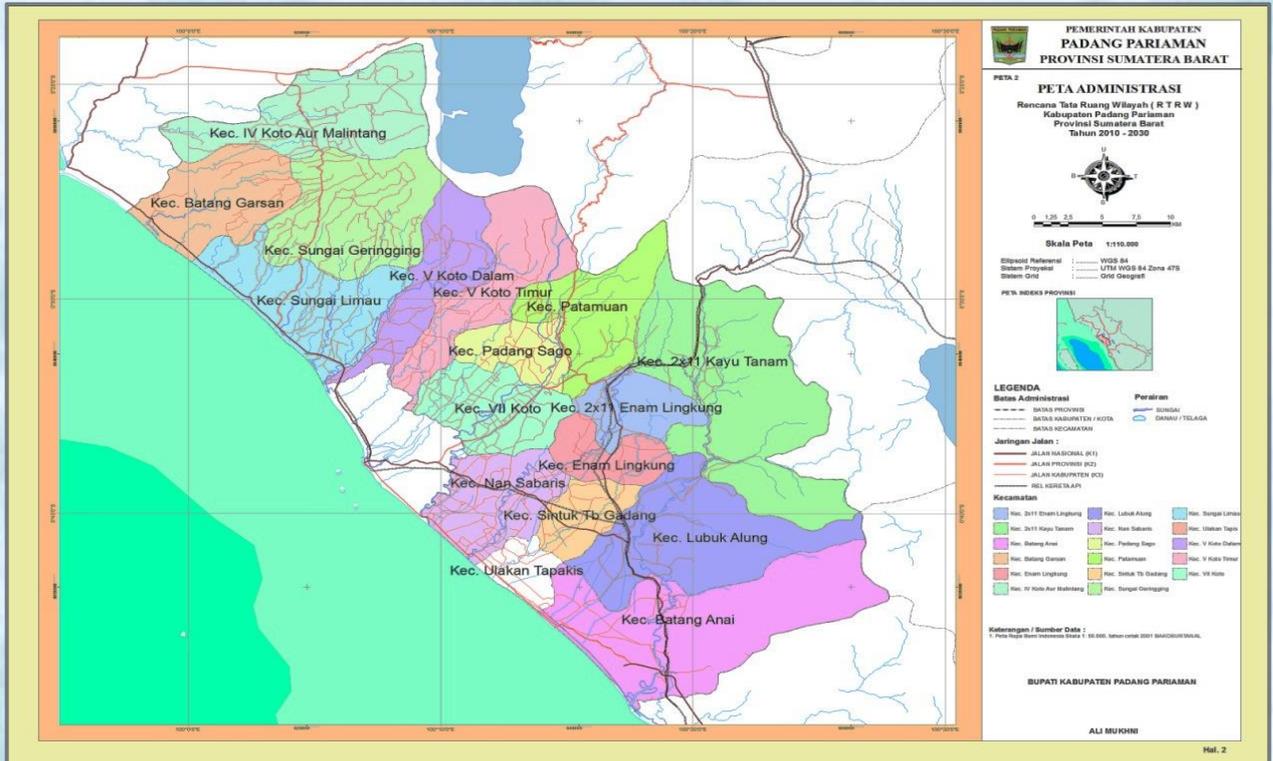
No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Korong
1	Batang Anai	164,33	8	52
2	Lubuk Alung	124,76	9	52
3	Sintuak Toboh Gadang	32,65	5	29
4	Ulakan Tapakih	23,01	8	53
5	Nan Sabaris	66,19	9	46
6	2x11 Enam Lingkung	40,64	3	12
7	Enam Lingkung	34,28	5	27
8	2x11 Kayu Tanam	188,55	4	21
9	VII Koto	64,14	12	66
10	Patamuan	77,95	6	41
11	Padang sago	34,93	6	24
12	V Koto Kampung Dalam	66,68	8	49
13	V Koto Timur	66,79	4	28
14	Sungai Limau	90,36	4	28
15	Batang Gasan	76,26	3	15
16	Sungai Geringging	107,73	4	27
17	IV Koto Aur Malintang	84,29	5	30
	Jumlah	1.343,56	103	600

Sumber: Padang Pariaman Dalam Angka, 2023

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yakni 188,55 Km² sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakis merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yakni 23,01 Km². Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto dengan 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang masing-masing hanya terdiri dari 3 (tiga) nagari.

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Peta RTRW Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

1.1.1 Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Dari waktu ke waktu jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan dengan proporsi jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yang diukur melalui rasio jenis kelamin (sex ratio). Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adalah 455.218 jiwa yang terdiri dari 228.417 jiwa laki-laki dan 226.801 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 438.022 jiwa yang terdiri dari 218.717 jiwa laki-laki dan 219.305 jiwa perempuan. Penyebaran jumlah penduduk bervariasi setiap kecamatannya dan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	LUBUK ALUNG	25.191	24.525	49.716
2	BATANG ANAI	28.133	27.576	55.709
3	NAN SABARIS	15.781	15.929	31.710
4	2 X 11 ENAM LINGKUNG	9.689	9.848	19.537
5	VII KOTO SUNGAI SARIK	18.952	18.995	37.947
6	V KOTO KAMPUNG DALAM	12.521	12.317	24.838
7	SUNGAI GARINGGING	16.982	16.853	33.835
8	SUNGAI LIMAU	15.790	15.448	31.238
9	IV KOTO AUR MALINTANG	11,027	11,199	22.226
10	ULAKAN TAPAKIH	10.835	10.678	21.513
11	SINTUAK TOBOH GADANG	10.384	10.503	20.887
12	PADANG SAGO	4.616	4.777	9.393
13	BATANG GASAN	6.047	5.804	11.851
14	V KOTO TIMUR	7.825	7.699	15.524
15	2 X 11 KAYU TANAM	14.815	14.705	29.520
16	PATAMUAN	9.197	9.236	18.433
17	ENAM LINGKUNG	10.632	10.709	21.341
JUMLAH		228,417	226,801	455,218

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, Kecamatan Batang Anai merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 55.709 jiwa, sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Padang Sago dengan jumlah 9.393 jiwa.

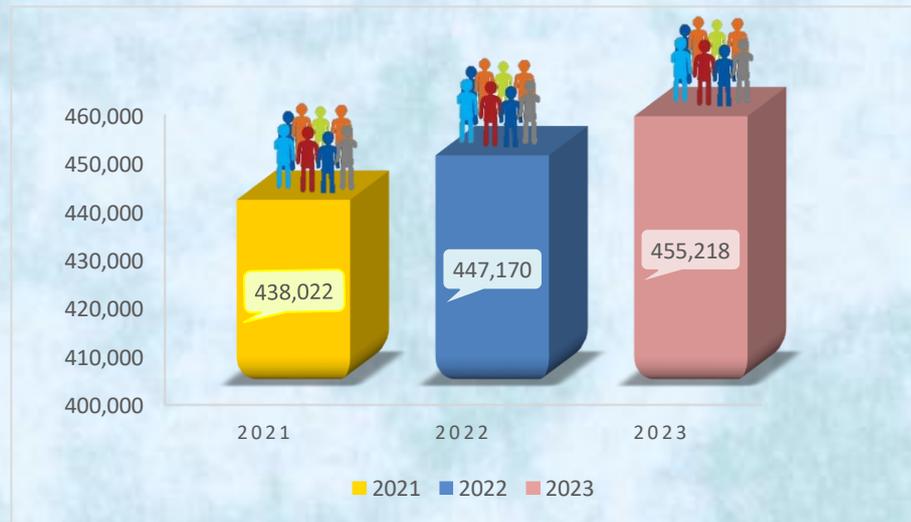
Jika dilihat tren perkembangan penduduk 3 tahun terakhir diketahui bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan dari 438.022 pada tahun 2021 menjadi 455.218 pada tahun 2023. Untuk laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021 - 2023

Tahun	Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM 2)
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			
2021	218.717	219.305	438.022	0,78	99,73	326
2022	223.792	223.378	447.170	2,09	100,19	333
2023	228.417	226.801	455.218	1,73	100,71	339

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Grafik 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2023

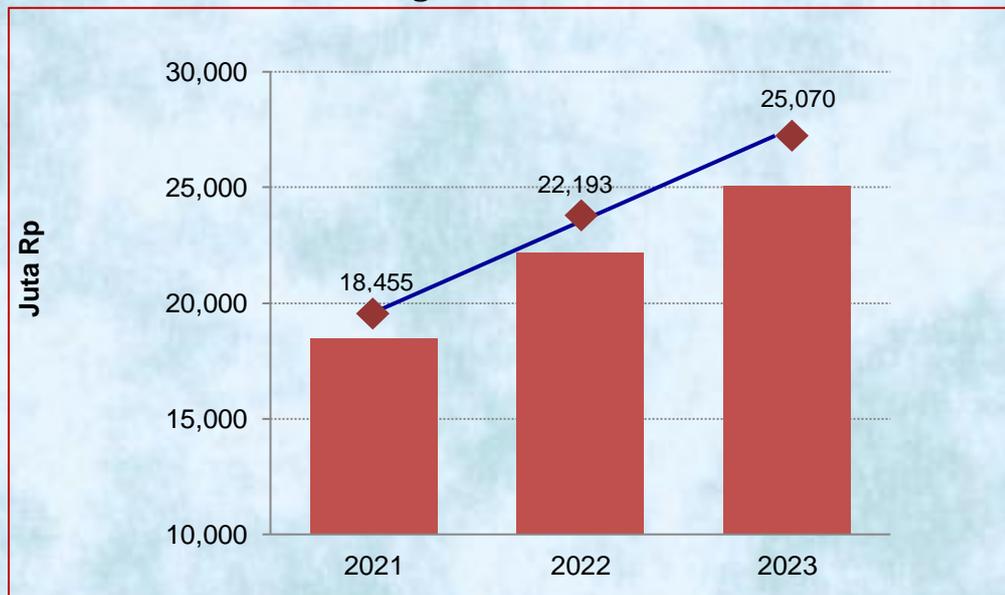
1.1.2 Produk Domestik Regional

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Pada tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Padang Pariaman sebesar 25.070.850,00 rupiah, sedangkan untuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2023 (ADHK) terlihat sebesar 13.740.822,71 rupiah. Nilai tersebut naik dibanding tahun sebelumnya karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada 2023 sebesar 5,46 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang bernilai 6,83. Pertumbuhan terbanyak terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangandan diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 11,92 persen dan 9,00 persen. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 1,81 persen. Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan konstan ini dapat dilihat pada Grafik 1.2 dan Grafik 1.3 berikut ini :

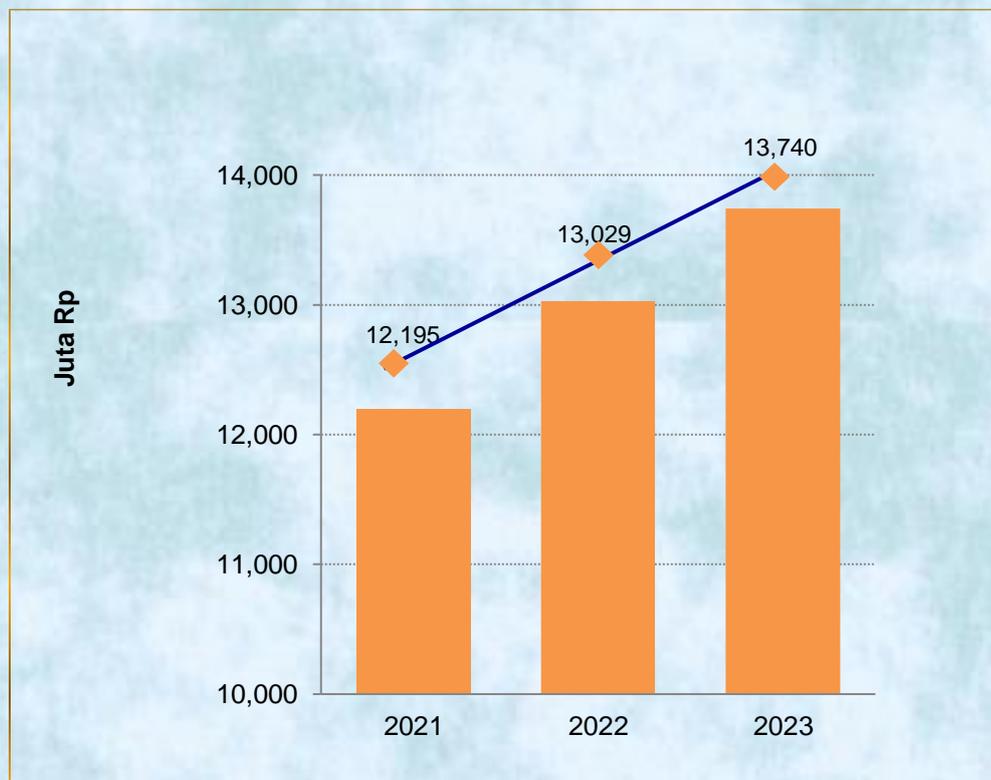


Grafik 1.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Berlaku 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Grafik 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Konstan Tahun 2021-2023



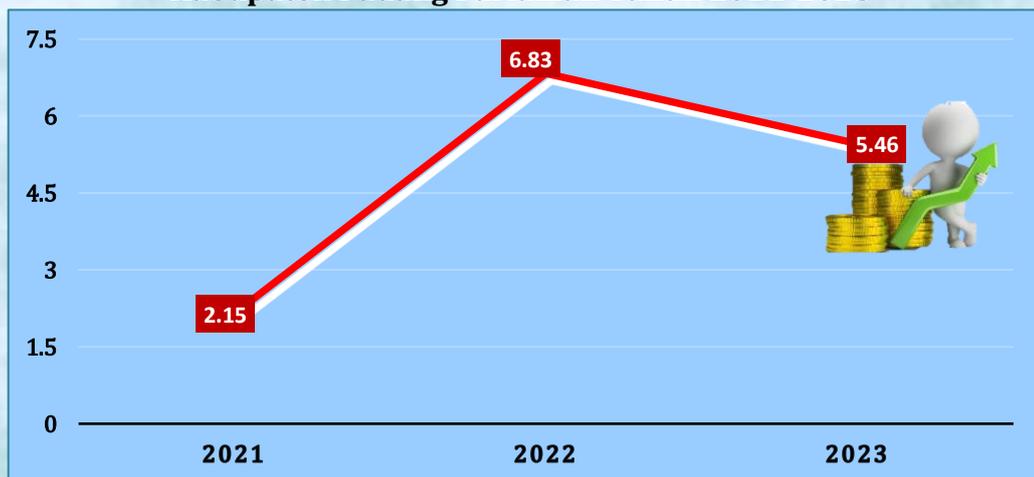
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2023

1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Laju dari pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada 2023 sebesar 5,46 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang bernilai 6,83. Pertumbuhan terbanyak terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangandan diikuti oleh sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 11,92 persen dan 9,00 persen. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Jasa Pendidikan dengan pertumbuhan sebesar 1,81 persen.

Grafik 1.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2023

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

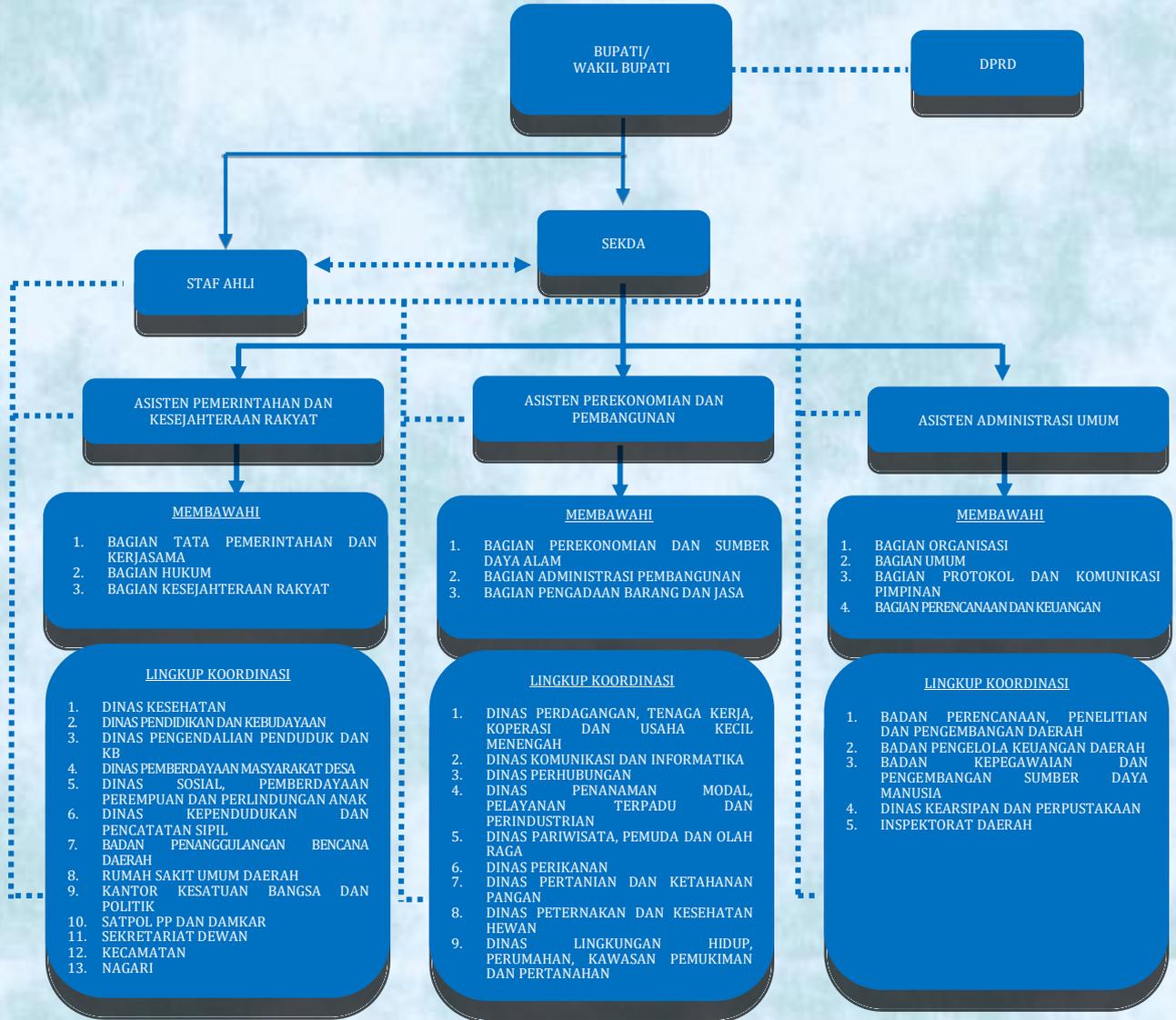
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh :



- Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Bagian Administrasi Pembangunan
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Dokumentasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan dan Keuangan
- d. Staf Ahli terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota terdiri dari :
 - a. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
- 3. Inspektorat
- 4. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 5. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - h. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
 - i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
 - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - o. Dinas Perikanan
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 8. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan dan 103 Nagari.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariama



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2023, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang sebanyak 5.255 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.361 orang (25,90%) dan perempuan sebanyak 3.894 orang (74,10%).

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	4	3	7
2.	SLTP/Sederajat	29	4	33
3.	SLTA/Sederajat	208	127	335
4.	Diploma I	3	16	19
5.	Diploma II	30	89	119
6.	Diploma III	73	645	718
7.	Diploma IV/Strata I	829	2.790	3.619
8.	Strata II	183	220	403
9.	Strata III	2	0	2
Jumlah		1361	3894	5255

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Berdasarkan Tabel 1.5 di atas diketahui bahwa PNS di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I dengan jumlah 3.619 orang (66,59%), diikuti Diploma III sebanyak 718 orang (13,21%), Strata II sebanyak 403 orang (7,41%) dan Strata III sebanyak 2 orang (0,03%). Tingkat pendidikan PNS ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, kualitas PNS di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik dengan banyaknya PNS yang berpendidikan di atas SLTA sederajat mencapai 4.880 orang (89,79%).

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. RPJMD 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dalam RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Kebudayaan

Tata kehidupan masyarakat Minangkabau telah terpola dengan sebuah filosofi sosial yaitu adaik basandi syara'-syara' basandi kitabullah. Khazanah budaya Minangkabau, agama dan budaya merupakan dua dimensi nilai inti yang saling bertautan satu sama lain. Kedua dimensi nilai inilah yang membentuk karakter masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan nilai utama yang diharapkan mampu melahirkan harmonisasi antara kehidupan yang agamais dan kehidupan yang berbadab dan berbudaya. Dalam konteks dan dimensi budaya, keterbukaan wilayah berakibat masuknya pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat. Selain itu eksistensi dan peran kelembagaan adat pada tingkat nagari masih lemah dan bahkan semakin memudar, hal ini dapat kita lihat dari masih kurangnya peran mamak terhadap kemenakan, berkurangnya musyawarah dan mufakat adat dan kaum dalam pengambilan kebijakan, serta masih seringnya terjadi tingkah laku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan falasah ABS SBK tersebut. Rendahnya pengamalan dan aplikasi nilai-nilai ajaran agama dan akhlaq masyarakat, apalagi dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perubahan pola dan tingkah laku masyarakat sehingga tidak sejalan lagi dengan ajaran dan kaedah agama serta norma-norma adat istiadat Minangkabau. Pembangunan jati diri masyarakat melalui pendidikan agama dan wawasan kebangsaan guna mengatasi dampak negatif dan infiltrasi budaya global dan krisis global.

Isu penting lainnya terkait kerukunan, ketentraman dan ketertiban selama lima tahun kedepan diperhadapkan pada sejumlah tantangan berupa peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Selain itu juga tantangan ke depan yang dihadapi adalah kecenderungan munculnya bentuk kerawanan/kejahatan baru yang dipicu oleh terbukanya wilayah dalam rangka pembangunan ekonomi yang memudahkan mobilitas barang dan manusia seperti penggunaan obat-obatan psikotropika. Dengan demikian, diperlukan langkah antisipatif dan koordinatif pada bidang ketentraman dan ketertiban untuk mencegah dan menekan akses pembangunan ekonomi terhadap munculnya tindak kriminal. Isu lainnya terkait pembangunan kebudayaan adalah kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan isu dalam pembangunan kualitas perempuan, dimana masih terjadi kesenjangan pada laki-laki dan perempuan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Upaya

perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan kabupaten ramah perempuan dan layak anak.

2. Optimalisasi Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sarana dan prasarana publik diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur daerah terkait infrastruktur transportasi darat, infrastruktur sumber daya air (infrastruktur irigasi, sumber air baku dan infrastruktur pengendalian banjir), memenuhi fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan dan kemandirian wilayah. Selain itu juga dihadapkan pada penyediaan air bersih, irigasi, listrik dan telekomunikasi guna mendukung lingkungan perumahan dan pemukiman yang sehat. Isu penting lainnya yang perlu memperoleh perhatian, yaitu : (i) konektifitas, pemerataan antar daerah dan integrasi sistem transportasi, (ii) meningkatnya produksi persampahan membutuhkan respon terhadap peningkatan cakupan pelayanan sampah dengan pembangunan TPA, dan pengolahan sampah berbasis teknologi. Pengelolaan sampah menjadi perhatian kabupaten, karena kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah masih kurang

3. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata dan Ekowisata

Pembangunan sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dihadapkan dengan sejumlah isu-isu strategis. Pertama, gejolak harga komoditas pertanian sangat menentukan terhadap kesejahteraan petani yang tercermin dari nilai tukar petani.. Sektor pertanian berhadapan ketidakpastian berkaitan dengan lingkungan hidup, berupa bencana alam, perubahan iklim, maupun serangan hama. Sejumlah isu-isu penting terkait dengan produk pertanian yang juga perlu memperoleh perhatian, yaitu: (a) meningkatnya tuntutan kepada produk pertanian berkualitas, berstandar dan bersertifikasi, termasuk produk pertanian yang sehat dari pertanian organik, (b) mulai tumbuhnya pola konsumsi sehat yang meningkatkan permintaan terhadap produkproduk pertanian berupa buah-buahan, sayuran, tanaman obat. Diikuti pula perubahan gaya hidup yang meningkatkan permintaan terhadap produk pertanian seperti kopi, teh, dan susu segar, (c) tumbuhnya angkatan kerja pedesaan yang harus disikapi dengan penciptaan agroindustri pedesaan, regenerasi petani menjadi petani muda atau milenial, dan pengembangan kewirausahaan pertanian di daerah pedesaan. Sektor perikanan dihadapkan pada terbatas sarana dan prasarana perikanan tangkap. Perkembangan sektor perdagangan dan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman berhadapan dengan trend tumbuh cepatnya perdagangan elektronik yang diperkirakan akan semakin meningkat dalam lima tahun ke depan. Keberadaan perdagangan eletronik melalui berbagai aplikasi belanja daring dengan berbagai strategi promosi dan pemasarannya dapat mengancam daya saing sektor perdagangan dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya meningkatkan



kontribusi sektor pariwisata bagi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman diperlukan ekspose yang lebih luas. Hal ini karena pasar pariwisata Kabupaten Padang Pariaman yang masih lokal. Pengembangan pariwisata berhadapan dengan isu daya dukung dan akses infrastruktur menuju dan sarana prasarana objek destinasi wisata. Daya dukung dan manfaat sosial masyarakat sekitar kawasan pariwisata perlu menjadi perhatian penting. Perkembangan pariwisata juga perlu didukung dengan penciptaan ekosistem ekonomi kreatif dan peningkatan inovasi (kuliner, fashion, kerajinan tangan) dan standarisasi bagi pelaku ekonomi kreatif.

4. Pembangunan Manusia

Dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia melalui pembangunan manusia, sejumlah isu-isu strategis pada bidang kesehatan yaitu pandemi covid-19 yang mulai mereda masih tetap mengancam kondisi kesehatan dan risiko kematian bagi penduduk, namun berhadapan dengan mulai melonggarnya penerapan protokol kesehatan meskipun pelaksanaan vaksinasi telah mulai meluas, menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan test, tracing dan treatment (pengujian, pelacakan, dan penyembuhan). Peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan antar kecamatan masih menjadi persoalan yang membutuhkan upaya yang lebih giat. Pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat serta kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat membutuhkan semakin giatnya promosi upaya kesehatan masyarakat. Secara umum permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini terkait dengan capaian-capaian kinerja pendidikan berupa angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah pada semua jenjang pendidikan, kualitas guru, proses belajar mengajar, ketersediaan sarana prasarana pendidikan. Berkaitan dengan permasalahan pendidikan tersebut, maka pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan diperhadapkan pada tantangan berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka peningkatan akses dan pemerataan pendidikan khususnya pada wilayah-wilayah yang potensial jumlah peserta didiknya dan belum tersedia fasilitas sekolah. Disamping itu juga diperhadapkan pada upaya-upaya dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar yang lebih berkualitas dan perbaikan tata kelola pendidikan pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian maka pembangunan pendidikan lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar, angka melanjutkan sekolah, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan proses belajar mengajar, meningkatkan sarana prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru) untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin meningkat serta meningkatkan luaran pendidikan SD dan SLTP.

5. Tata kelola pemerintahan

Melakukan reformasi birokrasi berarti melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal

penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Dengan ini diharapkan kinerja pemerintah dapat lebih optimal sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih maksimal, efektif dan efisien. Reformasi birokrasi ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan birokrasi. Tata kelola pelayanan publik juga mensyaratkan pengendalian dan pengawasan bagi pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan kapasitas dan SDM pemerintahan dalam adopsi dan implementasi pelayanan publik secara e-ektronik. Begitupula pemanfaatan beragam media termasuk kanal sosial media bagi keterbukaan informasi publik dan kegiatan pemerintahan.

6. Optimalisasi Pelayanan Dasar

Masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal dalam bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, air minum, pengelolaan limbah, penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan dampak program pembangunan. Pelayanan dasar lain adalah pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat serta penanganan masalah sosial.

7. Peningkatan PAD dan Investasi Daerah

Salah satu sumber keuangan daerah yang dapat dioptimalkan penggaliannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh berbagai variabel makro ekonomi. Ada beberapa indikator makro ekonomi yang secara teoritis mempengaruhi PAD, diantaranya: (1) struktur ekonomi daerah; (2) investasi (PMDN dan PMA); dan (3) pengeluaran pemerintah. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan dengan dengan arah kebijakan Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir (2016-2020) adalah sebesar 15,61 persen. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat, optimalisasi pajak ini sangat diperlukan. Oleh sebab itu, pajak juga menjadi perhatian khusus untuk dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Belum optimalnya nilai investasi dan jumlah investasi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman menjadi tantangan dalam pembangunan kedepan. Mempermudah perijinan untuk investor adalah langkah kedepan dalam peningkatan investasi daerah.

1.5.2 Permasalahan Pembangunan

Pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Hal tersebut menjadi bahan analisa dalam merumuskan isu strategis perencanaan dan prioritas permasalahan pembangunan pada awal pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026. Beberapa prioritas permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada RKPDP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 1.5

Isu Strategis dan Prioritas Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Permasalahan Daerah	Isu Strategis
1.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Sektor Pertanian, Pariwisata, dan UMKM	a. Masih rendahnya produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan ekowisata
		b. Belum optimalnya produksi hasil perikanan karena kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah	
		c. Peningkatan pendapatan petani/peternak	
		d. Penerapan Pola Pangan Harapan (PPH)	
		e. Belum optimalnya pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan	
		f. Hilirisasi produk komoditi unggulan yang sangat terbatas	
		g. Diversifikasi pangan	
		h. Rendahnya daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Padang Pariaman	
		i. Rendahnya daya saing produk pada sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	
		j. Jumlah penduduk miskin semakin meningkat	
		k. Belum optimalnya pemanfaatan potensi nagari dalam pembangunan daerah	
2.	Peningkatan ketepatan alokasi investasi dan sumber-sumber pendanaan.	a. Minimnya promosi investasi	Peningkatan PAD dan Investasi Daerah
		b. Belum optimalnya integrasi investasi dengan pola ruang	
		c. Belum optimalnya penggalan potensi dan pengembangan pajak dan retribusi daerah	
		d. Kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan covid-19 terhadap penganggaran dan realisasi APBD	
3.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik yang berkelanjutan	a. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi seperti sarana prasarana lalu lintas keamanan transportasi meliputi fasilitas perlengkapan jalan/rambu, halte, trotoar,	Optimalisasi sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan Optimalisasi Pelayanan Dasar



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB I PENDAHULUAN

	berbasiskan lingkungan dan tata ruang	<ul style="list-style-type: none">a. penerangan jalan umum, dan terminalb. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang belum optimalc. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah masih rendahd. Pemenuhan sarana prasarana pengelolaan sampah belum optimale. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana objek wisata unggulanf. Masih banyak ditemui perumahan dan permukiman kumuhg. Belum optimalnya penggunaan lahan yang sesuai dengan perencanaan tata ruang	
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">a. Mutu pendidikan yang masih tergolong rendahb. Mutu tenaga pendidik masih rendah (masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi)c. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolahd. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolahe. Kurangnya jumlah guru atau tenaga pendidik yang berstatus ASNf. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikang. Belum optimalnya layanan kesehatanh. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Padang Pariamani. Rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH)j. Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta gizi burukk. Masih tingginya tingkat perkawinan usia mudal. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)m. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Optimalisasi Pelayanan Dasar



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB I PENDAHULUAN

5.	Peningkatan kemandirian masyarakat tangguh bencana	a. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan	Pembangunan Manusia
		b. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kebencanaan yang belum optimal	
		c. Pengembangan nagari tangguh bencana yang belum optimal	
		d. Pengelolaan kasus abrasi pantai yang belum optimal	
6.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis.	a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang belum optimal	Tata Kelola Pemerintahan
		b. Peningkatan kinerja dan pelayanan daerah yang belum optimal	
		c. Belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen keuangan daerah	
		d. Belum optimalnya peningkatan kualitas manajemen kinerja instansi pemerintah	
		e. Kualitas Pelayanan Publik yang masih rendah	
		f. Belum optimalnya pengembangan e-gov dan implementasi smart city Kabupaten Padang Pariaman	
7	Peningkatan pengamalan ABS SBK dalam kehidupan bermasyarakat	a. Masih rendahnya kualitas kehidupan beragama	Pembangunan Kebudayaan
		b. Lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan belum berperan aktif dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah	
		c. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kerukunan dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat	
		d. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya daerah	
		e. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan	

Sumber : RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024

padang pariaman
berjaya!

BAB II
PERENCANAAN KINERJA





alam rangka mendorong sistem Pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan tantangan, permasalahan, peluang dan isu-isu strategis, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui penetapan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja untuk mencapai prestasi (core area) sebagai ukuran pencapaian tujuh Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 menjadi dokumen acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diikuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026 sudah menjabarkan tiga pertanyaan dasar, yakni :

- 1) Apa yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang;
- 2) bagaimana cara mencapainya dan
- 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu :



Visi “Padang Pariaman Berjaya” merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Unggul **BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

- **Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- **seJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social budaya.
- **BerbudaYA** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Visi merupakan arah Pembangunan atau kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Visi tersebut, harus bisa menjawab permasalahan Pembangunan Daerah atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Serta sejalan dengan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 .

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, yang dapat dilihat atau diukur dari indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dapat digambarkan pada tabel 2.1 dan dibawah ini :

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (unggul BERkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA)		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum.	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan umum.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air

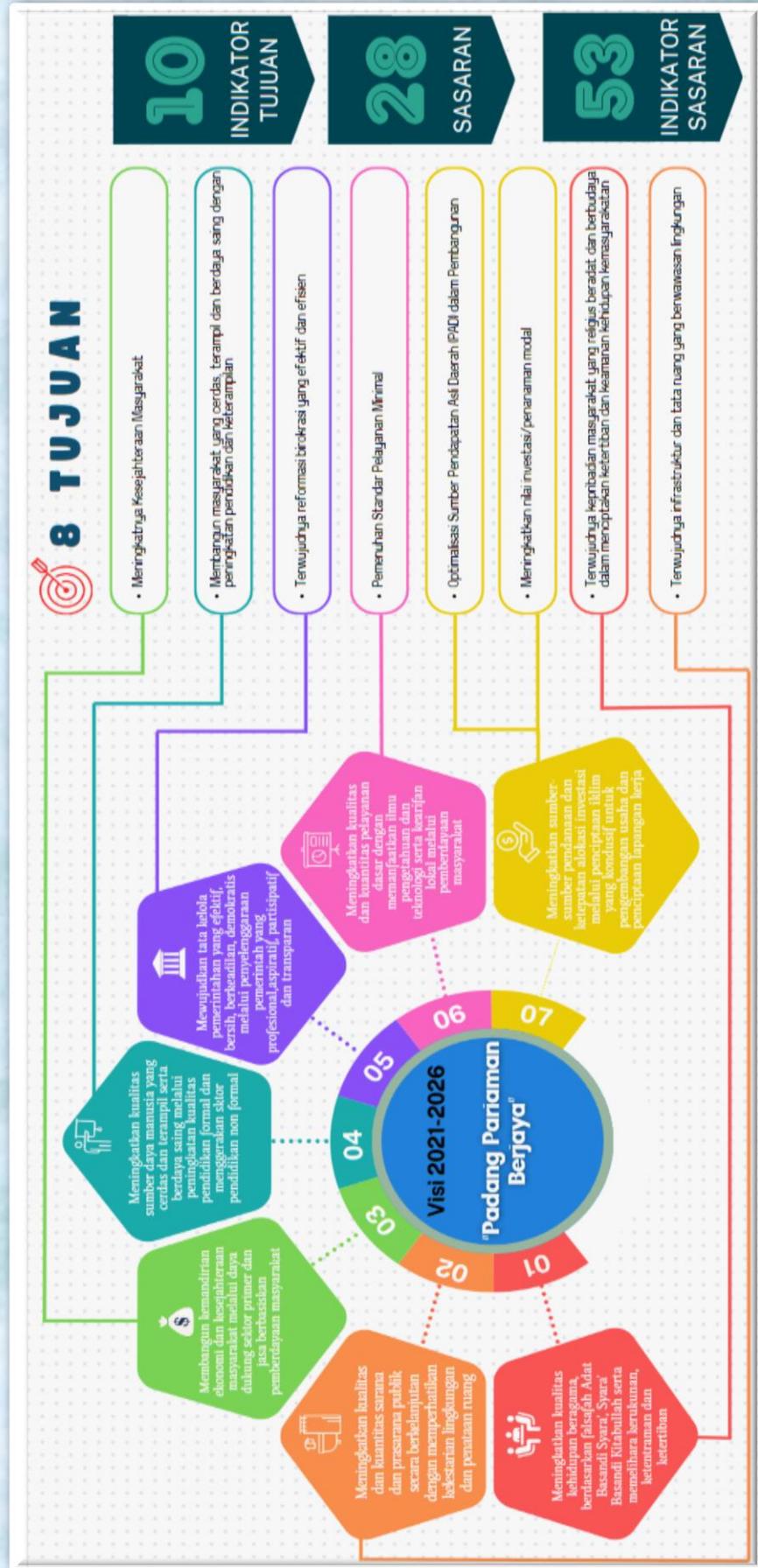


PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA

berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata Berkurangnya jumlah penduduk miskin Peningkatan daya beli masyarakat Kemandirian Desa
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum Peningkatan pengelolaan air limbah domestik Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni Penguatan layanan kebencanaan Pengurangan resiko kebakaran Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat Peningkatan penanganan masalah sosial
Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan Meningkatkan nilai investasi/penanaman modal	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026

Gambar 2.1
Visi, Misi dan Tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026



2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, realistis, analitik, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk suatu kebijakan dan program merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi pembangunan dan arah kebijakan sangat erat kaitannya karena arah kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah disusun. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan tersebut, maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Selanjutnya hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :



Foto : Meninjau Pengerjaan Normalisasi Dan Pemasangan Beronjong Sebagai Upaya Melindungi Lahan Pertanian Warga Tahun 2023

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
1,1 Tenwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat Gebu Pafa	1.1.1 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	1.1.1.1 Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengalaman nilai-nilai agama	1.1.1.1.1 Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Kesra
				1.1.1.2 Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1.1.1.2.1 Peningkatan kehidupan sosial harmonis dalam suasana multy culture	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Kesra
				Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.1.1.2.2 Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Kesbangpol
					1.1.1.2.3 Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya	kebudayaan	Disdikbud



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.2	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2.1.2.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	2.1.2.1.1	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
		Rasio Luas Kawasan Permukiman terlindungi Wilayah Sungai (WS)	2.1.2.2	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	2.1.2.2.1	Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
2.1.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	Persentase drainase dalam kondisi baik	2.1.3.1	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	2.1.3.1.1	Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.3.2	Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	2.1.3.2.1	Peningkatan pelayanan pengelolaan dan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi	pekerjaan umum dan penataan ruang dan lingkungan hidup	DPUPR dan DLHPKPP
			2.1.3.3	Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	2.1.3.3.1	Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	DLHPKPP

rencana tata ruang	perencanaan tata ruang	dan kawasan perkotaan	kawasan perkotaan	kawasan perkotaan	kawasan perkotaan	PU PR
		Persentase Ketaatan terhadap RTRW	2.1.4.2	Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	2.1.4.2.1	PU PR
		Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya	2.1.4.3	Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital	2.1.4.3.1	PU PR
		Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat	2.1.4.4	Meningkatkan fasilitas pengurusan sertifikat tanah Pemda	2.1.4.4.1	DLHKPP
			3.1.1.1	Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman	3.1.1.1.1	Distan KP / Peternakan dan Kesehatan Hewan
			3.1.1.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	3.1.1.2.1	Distan KP / Peternakan dan Kesehatan Hewan
3,1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		3.1	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata		
				Laju pertumbuhan ekonomi		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA

3.1.1.6	Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	3.1.1.6.1	Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM	koperasi dan UMKM	Disdagnake rkop UMKM
3.1.1.7	Mengembangkan wilayah dengan klasterisasi industri	3.1.1.7.1	Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	perindustrian	DPMPTP
3.1.1.8	Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	3.1.1.8.1	Pelestarian kawasan wisata	pariwisata	Disparpora
3.1.1.9	Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif	3.1.1.9.1	Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	pariwisata	Disparpora
		3.1.1.9.2	pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif	pariwisata	Disparpora
		3.1.1.9.3	Pemberdayaaan Pokdarwis dalam pengembangan wisata dan	pariwisata	Disparpora
	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB				
	Jumlah Kunjungan Wisata				

4,1	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Harapan lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	3.1.2	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	3.1.2.1	Menurunkan angka kemiskinan	3.1.2.1.1	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	ekonomi kreatif	social	Dinsos P3A
							3.1.3	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (ADHB)	3.1.3.1	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	3.1.3.1.1	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Urusan Penunjang	Setda Bagian ekonomi	
							3.1.4	Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	3.1.4.1	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	3.1.4.1.1	Pemanfaatan potensi desa/nagari	pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD	
							4.1.1	Peningkatan Mutu Pendidikan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	4.1.1.1	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	4.1.1.1.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan	perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan	
4.1.2	4.1.2.1	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	4.1.2.1.1	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	pendidikan	Disdikbud										
							4.1.2.2	Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	4.1.2.2.1	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	4.1.2.2.1	Peningkatan manajemen dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Disdikbud	
							4.1.2.3		4.1.2.3.1	Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	4.1.2.3.1	Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi			Disdikbud	
							4.1.2.4		4.1.2.4.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	4.1.2.4.1	Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD			Disdikbud	

4.1.3	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.1.3.1	Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	4.1.3.1.1	Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	tenaga kerja	Disdagnakerkop UKM
4.1.4	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	4.1.4.1	Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan dalam pembangunan	4.1.4.1.1	Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial	tenaga kerja	Disdagnakerkop UKM
		Jumlah atlet berprestasi	4.1.4.2	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	4.1.4.2.1	Peningkatan kualitas SDM pemuda	Kepemudaan	Disparpora
			4.1.4.3	Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	4.1.4.3.1	Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;	Olahraga	Disparpora

5,1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks reformasi birokrasi	5,1.1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	5,1.1.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5,1.1.1.1	Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi	fungsi lain (keuangan)	BPKD/Inspektorat	
							5,1.1.1.2	Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah	5,1.1.1.2.1	Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset	fungsi lain (keuangan)	BPKD, Bag. Keuangan, DLHKPP (Bid. Pertanian)
							5,1.1.1.3	Mengoptimalkan peran APIP	5,1.1.1.3.1	Peningkatan kapabilitas APIP	fungsi lain (pengawasan)	Inspektorat
							5,1.1.1.4	Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	5,1.1.1.4.1	Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	fungsi lain (pengawasan)	Inspektorat
							5,1.1.1.5	Meningkatkan kualitas pelaksanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	5,1.1.1.5.1	Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT	Non Urusan	Seluruh OPD
							5,1.1.6	Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	5,1.1.6.1	Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien	Fungsi Penunjang	Setwan
										5,1.1.6.2	Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman	Fungsi Penunjang



				5.1.1.7.1	Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)	fungsi lain (perencanaan dan pengembangan)	Bapelitbang da, Bag. Fispra
				5.1.1.7.2				Bapelitbang da
			5.1.1.7	5.1.1.7.1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	fungsi lain (perencanaan)	Bag. PBJ
				5.1.1.8	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan			
				5.1.1.9	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)			
				5.1.2	Birokrasi yang kapabel			
				5.1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN			
				5.1.2.1.1	Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	Peningkatan kapasitas aparatur dan Penempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Organisasi dan PANRB
				5.1.2.1.2		Peningkatan sistem manajemen kepegawaian	fungsi lain (kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan)	BKPSDM



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA

5.1.2.1.3	Peningkatan Budaya kerja yang profesional	fungsi lain (kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan)	BKPSDM
5.1.2.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana IT	Komunikasi dan informatika	Diskominfo
5.1.2.2.2	Peningkatan Pengamanan data daerah	Persandian	Diskominfo
5.1.2.3.1	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing2 Perangkat Daerah	Statistik kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
5.1.3.1.1	Peningkatan manajemen penyelenggara pelayanan publik	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Organisasi dan PANRB
5.1.3.1.2	pengembangan inovasi pelayanan publik	fungsi lain (penelitian dan pengembangan)	Bapelitbang da
	Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi		
	5.1.2.2		
	Indeks E-Government /SPBE		
	Indeks Kearsipan		
	Indeks Pelayanan Publik		
	5.1.3	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	

				5.1.3.1.3	Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				5.1.3.2	Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Organisasi dan PANRB
				6.1.1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat		
				6.1.1	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar		
				6.1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal		
				6.1			
				6.1.1.1	Angka usia harapan hidup		
				6.1.1.1	Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan		
				6.1.1.1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
				6.1.1.2	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
				6.1.1.2.1	Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar		
				6.1.1.3	Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman		
				6.1.1.3.1	Peningkatan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman		
				6.1.1.4	Meningkatkan Budaya Hidup Sehat		
				6.1.1.4.1	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA

				6.1.2.1.1	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DPPKB
				6.1.2.1.2	Peningkatan advokasi dan pergerakan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DPPKB
				6.1.3.1.1	Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
				6.1.3.1.2	Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum		
				6.1.4.1.1	Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S)	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
				6.1.2.1	Menurunkan Total fertility rate (FTR)		
				6.1.3.1	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum		
				6.1.4.1	Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik		
				6.1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk		
				6.1.3.1	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
				6.1.4.1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		
				6.1.2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		
				6.1.3	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum		
				6.1.4	Peningkatan pengelolaan air limbah domestik		



6.1.5	6.1.5	Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	6.1.5.1	Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	6.1.5.1.1	Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni	perumahan dan kawasan pemukiman	DLHPKPP
6.1.6	6.1.6	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	6.1.6.1	Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	6.1.6.1.1	Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	BPBD
6.1.7	6.1.7	Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	6.1.7.1	Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	6.1.7.1.1	Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Pol PP Damkar
6.1.8	6.1.8	Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	6.1.8.1	Meningkatkan bantuan sosial masyarakat an untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	6.1.8.1.1	Peningkatan kesejahteraan sosial	social	Dinsos P3A
6.1.9	6.1.9	Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan	6.1.9.1	Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	6.1.9.1.1	Peningkatan sumberdaya penangan kedaruratan	social	Dinsos P3A

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, penetapan Perjanjian Kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati. Perjanjian Kinerja ini setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2023, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2023.

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/190/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 menyampaikan bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, maka berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus menggunakan informasi dalam laporan kinerja tersebut sebagai dasar dalam penentuan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya sehingga tidak terdapat target yang lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Untuk itu, dilakukanlah perubahan terhadap Perjanjian Kinerja pada beberapa target sasaran dan indikator kinerja.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026
Kabupaten Padang Pariaman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN (RPJMD)	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	28%	28%
2	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	67,5%	67,5%
		Indeks Pembangunan Gender	94	94
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%	69%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%	70,00%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70,00%	70,00%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan,	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (Rp. Juta)	2,862,238.58	2,862,238.58

	Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,60%	10,75%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,3%	13,3%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	6,87%	5,80%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (Rp. Juta)	49,46	50,50
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88	18,88
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14,12 Tahun	14,12 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%	7,17%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KemenPAN RB	BB	BB
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD	2,800	3,300
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government/SPBE	2,76	2,76
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,66
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,29 Tahun	69,89 Tahun
16	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,29%	1,70%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum Sehari-hari	92%	92%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17 Nagari	17 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445,4 Milyar	470,4 Milyar

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026

Dari tabel perubahan Perjanjian Kinerja diatas terdapat beberapa perubahan target dari sasaran dan indikator kinerja yaitu :

1. Sasaran meningkatnya infrastruktur sumber daya air dengan indikator persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik dengan target 62,72% menjadi 70,00%. Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 62,72% lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 69,47%. Penetapan perubahan target ini dilakukan sebagai motivasi untuk meningkatkan persentase irigasi dalam kondisi baik di tahun berikutnya. Perubahan Target ini juga mempertimbangkan Sumber dana yang tersedia cukup memadai untuk menyelesaikan seluruh target output, Sumber daya manusia yang menjadi penanggungjawab kegiatan cukup memadai dari sisi kemampuan dan keterampilan serta adanya dukungan fasilitas serta kendaraan operasional yang memadai untuk mendukung kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun.

2. Sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin dengan indikator tingkat kemiskinan dengan target 6,87% menjadi 5,80%. Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 6,87% lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 6,25%. Penetapan perubahan target ini dikarenakan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman masih sangat dipengaruhi dengan besarnya laju pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan dan Tingkat Pengangguran.
3. Sasaran Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata dengan indikator Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan target 8,6% menjadi 10,75%.
Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 6,8% lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 10,44%. Penetapan perubahan target ini dikarenakan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan atau nilai tambah PDRB. Sektor perdagangan tersebut terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.
4. Sasaran Peningkatan daya beli Masyarakat dengan indikator PDRB/income perkapita dengan target 49,46 (juta) menjadi 50,50 (juta).
Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 49,46 (juta) lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 50,02 (juta). Penetapan perubahan target ini dikarenakan PDRB Kabupaten Padang Pariaman mengalami kenaikan yang bersumber dari sektor pertanian, perikanan, kehutanan, transportasi, perdagangan serta diiringi dengan kenaikan dari berbagai lapangan usaha lainnya.
5. Sasaran Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (nilai LPPD) dengan target 2,800 menjadi 3,300.
Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 2,800 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 3,2904. Penetapan perubahan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan kenaikan nilai LPPD jika kualitas pemenuhan data dukung capaian kinerja OPD dapat ditingkatkan terutama pada urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan pertanahan dan urusan lingkungan hidup.
6. Sasaran Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan indikator Indeks Pelayanan Publik dengan target 4,57 menjadi 4,67.
Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 4,57 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 4,65. Penetapan perubahan target ini dikarenakan peningkatan nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 4,65, sehingga target pada tahun 2023 di evaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kualitas perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
7. Sasaran Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Usia Harapan Hidup dengan target 68,29 Tahun menjadi 68,89 Tahun.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 68,29 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 69,34 Tahun. Penetapan perubahan target ini dikarenakan realisasi tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Sehingga untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat Kesehatan pada khususnya target indikator Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 diubah menjadi 69,89 Tahun.

8. Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk dengan target 3,29 menjadi 1,70.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 3,29 jauh lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 1,7332. Penetapan perubahan target ini dikarenakan tingginya realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2022 sebesar 1,7332, sehingga target pada tahun 2023 ditingkatkan menjadi 1,70 dengan tujuan untuk pengurangan pertumbuhan penduduk melalui Program Keluarga Berencana (KB) yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

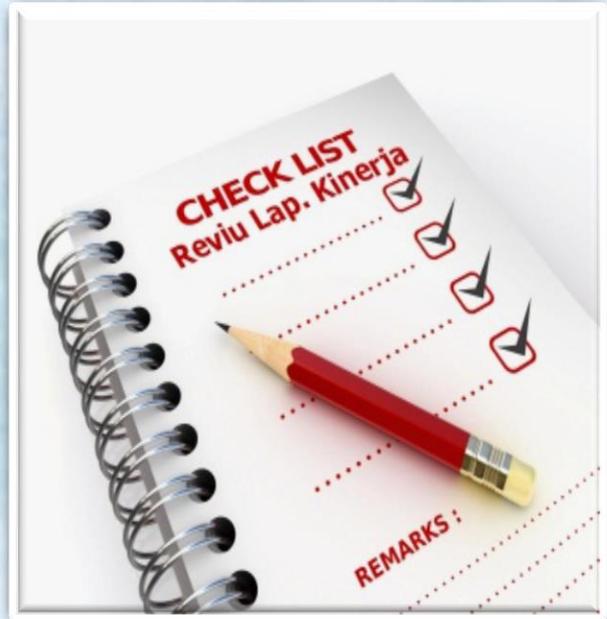
9. Sasaran Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas dengan indikator Jumlah Nilai Investasi yang berskala Nasional PMDN/PMA dengan target 445,4 Milyar menjadi 470,4 Milyar.

Berdasarkan analisa yang dilakukan, target ini dilakukan perubahan karena target tahun 2023 sebesar 445,4 Milyar lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 463,6 Milyar. Penetapan perubahan target ini dikarenakan peningkatan pada sektor konstruksi dengan adanya kegiatan proyek strategis nasional yang sedang proses seperti pengerjaan jalan tol Padang – Sicincin.

padang periaman
berjaya!

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja.



Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan informasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Adapun 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama serta penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Disdikbud, Setda (Kesra), Kecamatan
2	Peningkatan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	Satpol-PP Damkar
		Indeks Pembangunan Gender	Dinsos P3A

3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	Dis. PUPR
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Dis. PUPR
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Dis. PUPR
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Distan-KP, Disnakkeswan
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Disdagnakerkop & UKM
		Kontribusi ekonomi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB	Dis. PMPTP
7	Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	Dinsos P3A
8	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	Setda Bag. Ekonomi
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dis. Arsip & Perpustakaan
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Disdikbud
11	Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disdagnakerkop UKM
12	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD	Seluruh Perangkat Daerah
13	Birokrasi yang Efisien dan Efektif (Kapabel)	Indeks E-Government/SPBE	Diskominfo
14	Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
15	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinkes/RSUD
16	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	DPPKB
17	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dis. PUPR
18	Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	BPBD
19	Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dis. PMPTP

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, 2021-2026

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *out put* dan *out come* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2x \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara **Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri** dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.2
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Sangat Berhasil
$75 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 75$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permendagri

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Dokumen laporan kinerja ini tidak dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya (tahun 2021), dikarenakan laporan kinerja pada tahun 2021 masih memakai Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD 2016-2021, sehingga hanya dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 pada 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2023 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum								
Tujuan : Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat								
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	27,02	28	43	155	Sangat Berhasil
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan	Persentase penegakan perda	%	59,29	67,5	77,42	114,70	Sangat Berhasil
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,78	94	93,08	99,02	Berhasil



	perlindungan masyarakat							
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang								
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan								
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	62,02	69	65,63	95,11	Berhasil
2.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,47	70,00	68,50	97,86	Berhasil
3.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	69,57	70	72,86	104,08	Sangat Berhasil
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Rp. Juta	2,845,588.2	2.862.238,58	2.745.289,91	95,91	Berhasil
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,44	10,75	10,19	94,79	Berhasil
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	10,92	13,3	10,48	78,80	Berhasil
2.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	6,25	5,80	6,34	90,69	Berhasil
3.	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	Rp. Juta	50,02	50,50	55,54	109,98	Sangat Berhasil
Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan								
Tujuan 1 : Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan								
1.	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	1,97	18,88	67,74	358,79	Sangat Berhasil
2.	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,93	14,12	14,19	100,50	Sangat Berhasil
3.	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,60	7,17	6,69	106,69	Sangat Berhasil
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan								
Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien								
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
		Nilai SAKIP Pemerintah	Nilai	B	BB	B	98,83	Berhasil

2.	Dearah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	3,2904	3,300	3,2904*	99,71	Berhasil
		Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks EGovernment /SPBE	Indeks	2,60	2,76	2,62	94,93
	3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,65	4,66	3,88	83,26

Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat

Tujuan 1 : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,34	69,89	69,70	99,73	Berhasil
2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,7332	1,70	1,7327	98,08	Berhasil
3.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	72,05	92,00	76,57	83,23	Berhasil
4.	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	Nagari	16 Nagari	17 Nagari	16 Nagari	94,12	Berhasil

Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi mealui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja

Tujuan : Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal

1.	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	463,6	470,4	1.205	256,16	Sangat Berhasil
----	--	---	--------	-------	-------	-------	--------	-----------------

Sumber : Analisis Capaian IKU OPD & RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, 2023



SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Lembaga pendidikan Al-Quran Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah.

Lembaga Pendidikan Alqur’an merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah serta lulus dalam seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebu Pafa) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	28%	43%	155%	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dari Tabel 1 dapat di lihat, realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 yaitu sebesar 43% (253 Lembaga) sedangkan target yang ditetapkan adalah 28%, dengan capaian kinerja sebesar 155% (sangat berhasil). 253 dari 581 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an telah menghasilkan hafizh/ hafizhah serta lulus dalam proses seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alqur’an yang diadakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama ini yakni :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan AlQur'an Yang Menghasilkan Hafizh dan Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan AlQur'an Keseluruhan}} \times 100\%$$

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah pada tahun 2022 dengan Tahun 2023 :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase
Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	%	27	27,02	100,07	28	43,54	155	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 16,54%.

Peningkatan tersebut dikarenakan adanya tambahan dana dari APBD Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2023 serta tambahan bantuan dana dari donatur lainnya.

Keberhasilan peningkatan kehidupan yang religius terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam menghafal Al-Qur'an yang di dukung semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.1
Proses Seleksi Gebu Pafa di Kecamatan



Gambar 3.2
Penyerahan Beasiswa GEBU PAFA Tahun 2023



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah	%	26	27	28	10,32	27,02	43,54

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah pada tahun 2021 sebesar 10,32% dengan target RPJMD sebesar 26%. Pada tahun 2022 realisasi sebesar 27,02 dengan target RPJMD sebesar 27%. Sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 43,54% dari target RPJMD sebesar 28%.

d) Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan kinerja yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah

1. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan.
2. Kompetensi sumber daya manusia yang memadai dalam rangka pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 193.250.000,- sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 88.250.000,-. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 21%, dikarenakan APBD hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 88.250.000,- kemudian setelah dijalankan proposal kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para Hafiz/Hafizah yang berasal dari 253 Lembaga Pendidikan Alquran maka didapatkan bantuan dari donatur sebesar Rp. 105.000.000,00 sehingga realisasi mencapai Rp. 193.250.000,00 dari target yang dianggarkan APBD yaitu sebesar Rp. 88.250.000,00.

Dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh efisiensi sebesar 33% (anggaran sebesar Rp 83.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 195.500.000,00), setelah dijalankan proposal Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para Hafiz/Hafizah yang berasal dari 157 Lembaga Pendidikan Alquran maka didapatkan bantuan dari donatur sebesar Rp. 111.900.000,00 sehingga realisasi mencapai Rp. 195.500.000,00 dari target yang dianggarkan APBD yaitu sebesar Rp.83.600.000,00.

Persentase efisiensi ini secara teori sudah sangat baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Untuk pembinaan lembaga pendidikan AlQur'an dan Tahfiz pada Bagian Kesra tidak ada penganggaran. Sementara Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari *stake holder*, yaitu :

- Kegiatan ini dapat terlaksana karena dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya para Donatur seperti BAZNAS Padang Pariaman, Bank Nagari serta Tokoh Masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
- Terjalannya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Guru Mengaji/Guru Tahfiz yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
- Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi.

Inovasi Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) diluncurkan pada tahun 2020 untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman untuk menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/reward kepada para Hafizh/Hafizah.

Kemudian pada tahun 2021 dari 60 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 281 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 60.000.000,00.

Inovasi Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) diluncurkan pada tahun 2020 bertujuan untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman agar menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/reward kepada para Hafizh/Hafizah dan pada tahun 2021 dari 60 Lembaga Pendidikan Alquran telah menghasilkan 281 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 60.000.000,00. Kemudian pada tahun 2022 dari 157 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 406 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 195.500.000,00.

Pada tahun 2023 dari 253 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 445 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 193.250.000,00.

Berikut data Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan Hafiz/Hafizah pada tahu 2023 :

Tabel 3.7
Daftar Nama Lembaga Penghasil Hafizh/Hafizhah

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH HAFIZH/HAFIZHAH
1	TPA Darul Makmur	Sintuk Toboh Gadang	1
2	TPA Miftahul Jannah	Sintuk Toboh Gadang	2
3	TPA Nurul Yaqin	Sintuk Toboh Gadang	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

4	TPA Raudhatul Islam	Sintuk Toboh Gadang	3
5	TPA Tajul Karomah	Sintuk Toboh Gadang	2
6	Yayasan Nabila	Sintuk Toboh Gadang	2
7	TPA Ainul Yaqin	Sintuk Toboh Gadang	4
8	TPA Baburrahman	Sintuk Toboh Gadang	1
9	TPA Baitul Hadi	Sintuk Toboh Gadang	5
10	Rumah Tahfzh Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
11	Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
12	Rimbo Aka Padang Toboh	Sintuk Toboh Gadang	2
13	Nurul Yaqin Yaraka	Sintuk Toboh Gadang	1
14	MDTA Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
15	MDTA Jadid Attalaqi	Sintuk Toboh Gadang	1
16	TPQ Surau Kandih	Batang Gasan	5
17	TPQ Kularai	Batang Gasan	7
18	MDTA Aulia Mukminin	V Koto Timur	1
19	Pondok Tahfizh Al-Falah	V Koto Timur	1
20	TPA Birrul Walidain	V Koto Timur	1
21	MAS Kepala Hilalang	2x11 Kayu Tanam	1
22	Pes Nurul Yaqin Imam Ghazali	2x11 Kayu Tanam	2
23	Pesantren al-Hidayah	2x11 Kayu Tanam	1
24	Pondok Tahfizh Harun Arrasyid	2 x 11 Kayu Tanam	1
25	Pondok Tahfizh Hazima	2 x 11 Kayu Tanam	1
26	Rumah Tahfizh Shahibul Qur'an	2x11 Kayu Tanam	2
27	SD IT Hazima	2x11 Kayu Tanam	1
28	SD IT Usmani	2x11 Kayu Tanam	1
29	Taud Saqu Dar El Iman	2x11 Kayu Tanam	1
30	MDTA Nurul Anhar	Sungai Limau	6



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

31	MDTA Surau Batu	Sungai Limau	2
32	MTS Sei. Rambah	Sungai Limau	2
33	SDN 08 Sungai Limau	Sungai Limau	1
34	SD IT Al-Ma'arij	Sungai Limau	1
35	SD IT Al-Marhamah	Sungai Limau	1
36	SD IT Marhamah	Sungai Limau	1
37	SDN 01 Sungai Limau	Sungai Limau	2
38	SMP 3 Sungai Limau	Sungai Limau	1
39	SMP 1 Sungai Limau	Sungai Limau	1
40	Surau Batu	Sungai Limau	1
41	TPA Kalampayan	Sungai Limau	1
42	TPA Lamun Ombak	Sungai Limau	1
43	TPA Miftahul Huda	Sungai Limau	1
44	TPA Surau Dama Duku	Sungai Limau	1
45	TPA Al-Munawarah	Sungai Limau	1
46	TPA Baitul Hikmah	Sungai Limau	5
47	TPQ Darul Qur'an	Sungai Geringging	2
48	YPH Rosmani Aziz	Sungai Geringging	3
49	TPQ Surau Baru	Sungai Geringging	2
50	TPQ Al Mukminin	Sungai Geringging	4
51	TPQ Nurul Iman	Sungai Geringging	2
52	TPQ /TPSQ Surau Baru	Sungai Geringging	1
53	TPQ Harapan Bunda	Sungai Geringging	1
54	Raudhatul Qur'an	Sungai Geringging	3
55	TPA Surau Baru	Sungai Geringging	3
56	MITQ Ibnu Umar	Lubuk Alung	3
57	MT Jannatussalam PU	Lubuk Alung	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

58	MAN 2 Padang	Lubuk Alung	1
59	SD IT Buah Hati	Lubuk Alung	2
60	SDN 03 Lubuk Alung	Lubuk Alung	1
61	SDN 12 Lubuk Alung	Lubuk Alung	2
62	SDN 13 Lubuk Alung	Lubuk Alung	2
63	SDN 4 Lubuk Alung	Lubuk Alung	1
64	SMA Pembangunan	Lubuk Alung	1
65	SMA 1 Lubuk Alung	Lubuk Alung	1
66	TPQ Nurul Hidayah	Lubuk Alung	2
67	TPQ Al-Barakah	Lubuk Alung	1
68	TPQ Arrayyan	Lubuk Alung	4
69	SD IT Nur Hidayah	Lubuk Alung	4
70	TPQ Darul Hikmah	Lubuk Alung	1
71	TPQ Nurul Ikhlas	Lubuk Alung	1
72	MDA Al-Mubaraq	Ulakan Tapakih	3
73	Al-Mubaraq	Ulakan Tapakis	1
74	MDTA Kp. Paneh	Ulakan Tapakis	1
75	MTsN 5 Padang Pariaman	Ulakan Tapakis	2
76	MTsN Padang Panjang	Ulakan Tapakis	2
77	Ponpes Tartila	Ulakan Tapakih	2
78	RT Rambai Madani	Ulakan Tapakih	2
79	Rambai Madani	Ulakan Tapakih	1
80	SD IT Cahaya Hati	Ulakan Tapakis	3
81	TPA Surau Ampalam	Ulakan Tapakis	1
82	SMP 1 Ulakan	Ulakan Tapakis	1
83	SMAN 2 Pariaman	Ulakan Tapakis	2
84	Masjid Istiqamah	IV Koto Aur Malintang	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

85	Masjid Istiqamah Aur Malintang	IV Koto Aur Malintang	1
86	MDA Pinang Suri	IV Koto Aur Malintang	2
87	Mushalla Tabarok Batu Basa	IV Koto Aur Malintang	2
88	Nurul Amin	IV Koto Aur Malintang	2
89	Nurul Hidayah Kp. Tanjung	IV Koto Aur Malintang	3
90	Nurul Iman Batu Basa	IV Koto Aur Malintang	1
91	Nurul Yaqin Batu Basa	IV Koto Aur Malintang	2
92	Nurul Yaqin Kp. Pinang	IV Koto Aur Malintang	3
93	MDTA Mujahidin Balai Baik	IV Koto Aur Malintang	1
94	Surau Batuang	IV Koto Aur Malintang	2
95	Surau Kandis Kp. Tanjung	IV Koto Aur Malintang	1
96	Surau Kelok Simp. IV Amal	IV Koto Aur Malintang	2
97	Surau Lenggek Lancang	IV Koto Aur Malintang	2
98	MDTA Baitul Hidayah Sei. Pinang	Batang Anai	1
99	Pondok Tahfizh Jannatussalam Uj. Gunung	Batang Anai	4
100	Pondok Tahfizh Kampung Qur'ani	Batang Anai	3
101	Pondok Tahfizh Kampung Qur'ani Uj. Gunung	Batang Anai	3
102	RTQ Ar-Raudhah Padang Kunik	Batang Anai	3
103	RTQ Baity Jannaty Uj. Gunung	Batang Anai	4
104	RTQ Cahaya Qur'an Tj Basung II	Batang Anai	3
105	RTQ Darul Fikri Simpang Kataping	Batang Anai	2
106	RTQ Dzikra Titian Akar Buayan	Batang Anai	2
107	RTQ Nurul Huda	Batang Anai	2
108	RTQ Fajar Ilmi Kapalo Buayan	Batang Anai	2
109	SD Sabbihisma Batang Sariak	Batang Anai	2



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

110	SD IT Malik Karim Kasai	Batang Anai	1
111	SDN 08 Batang Anai	Batang Anai	2
112	SMAN 1 Batang Anai	Batang Anai	1
113	SMP 1 Batang Anai	Batang Anai	3
114	SMP 2 Batang Anai	Batang Anai	1
115	SDN 28 Batang Anai	Batang Anai	1
116	SMP 3 Batang Anai	Batang Anai	3
117	TPQ Istiqamah Pilubang	Batang Anai	1
118	TPQ Mushalla Mutiara Hasanah Kp. Apar	Batang Anai	2
119	TPQ Nur Sholihin Kuliek	Batang Anai	1
120	TPQ Nur Yaqin Petak Talao Mundam	Batang Anai	1
121	TPQ Al-Mubarak Palapa 3	Batang Anai	2
122	TPQ Al-Ikhlas Banda Gadang	Batang Anai	2
123	TPQ Al-Amin Kp. Apar	Batang Anai	1
124	Jabal Fiil	VII Koto	1
125	Darul Wustha	VII Koto	1
126	MTsS Balah Aia	VII Koto	4
127	Ponpes Jabal Fiil	VII Koto	1
128	Nahdatul Uqul	VII Koto	1
129	Ponpes Nurul Yaqin	VII Koto	3
130	Ponpes Salafiah Tarbiyah Islamiyah	VII Koto	2
131	Rumah Tahfizh Al-Qomariah	VII Koto	3
132	Rumah Tahfizh Darul Mustafa	VII Koto	2
133	SDN Unggung Terpadu	VII Koto	1
134	SDN 18 VII Koto	VII Koto	1
135	SDN 22 VII Koto	VII Koto	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

136	Surau Ketek Ampangan	VII Koto	2
137	TPA Al-Hidayah	VII Koto	1
138	TPA Al-Hidayah Sei. Ibur	VII Koto	2
139	TPA Darul Wustha	VII Koto	1
140	TPA Fisabilillah	VII Koto	1
141	TPA Jamiatul Muhiddin	VII Koto	2
142	TPA Madrasatul Ulum	VII Koto	1
143	TPA Silembang	VII Koto	1
144	TPA Surau Tengah Padang	VII Koto	1
145	TPQ Darul Wustha	VII Koto	1
146	Universitas PTIQ Jakarta	VII Koto	1
147	TPQ Darul Wustah Buluh Kasok	VII Koto	2
148	Tahfizh Surau Batu Ampalu	VII Koto	1
149	TPA Gadur	Enam Lingkung	2
150	MTsM Tonyok Koto Tinggi	Enam Lingkung	2
151	TPQ Parit Malintang	Enam Lingkung	2
152	SD IT Parit Malintang	Enam Lingkung	2
153	Pondok Qur'an Koto Tinggi	Enam Lingkung	2
154	Rumah Tahfizh Al-Mukmin	Enam Lingkung	2
155	TPQ Al-Mukmin	Enam Lingkung	1
156	TPQ An-Nahal	Enam Lingkung	2
157	TPQ An-Nahal Parit Malintang	Enam Lingkung	2
158	TPQ Nur Tanjung	Enam Lingkung	1
159	TPQ Nur Tanjung Beringin	Enam Lingkung	1
160	TPQ Rumah Tahfizh Al-Mukmin	Enam Lingkung	1
161	TPQ Surau Jawi-jawi	Enam Lingkung	3
162	TPQ Al-Ikhlas Padang Baru	Enam Lingkung	4

163	TPQ AlKautsar	Enam Lingkung	2
164	TPQ An-Nahl	Enam Lingkung	1
165	TPQ Nur Tanjung	Enam Lingkung	2
166	TPQ Surau Mansi	Enam Lingkung	1
167	TPQ Darus Salihin	Enam Lingkung	4
168	TPQ Babul Istiqamah	Enam Lingkung	1
169	TPA Al-Mubarak Koto Tinggi	Enam Lingkung	1
170	SMP 2 Enam Lingkung	Enam Lingkung	1
171	TPA Jawi-jawi	Enam Lingkung	3
172	TPA An-Nahl	Enam Lingkung	1
173	Ganting Subarang	Nan Sabaris	2
174	Dusun Parik	Nan Sabaris	2
175	Jiraik Baruah	Nan Sabaris	1
176	Kabun Mudiak	Nan Sabaris	4
177	Kampung Tengah	Nan Sabaris	1
178	Kampung Aua	Nan Sabaris	3
179	Kampung Jambak	Nan Sabaris	1
180	Kampung Kandang Koto Gadis	Nan Sabaris	2
181	Kapalo Koto	Nan Sabaris	2
182	Kampung Ladang	Nan Sabaris	1
183	Kampung Tengah	Nan Sabaris	1
184	Kurai Taji	Nan Sabaris	2
185	Lantak Mingkudu	Nan Sabaris	1
186	Lubuk Ipuh	Nan Sabaris	1
187	TPQ Nan Sabaris	Nan Sabaris	2
188	MTsN 02 Papa	Nan Sabaris	1
189	TPQ Padang Bintungan	Nan Sabaris	1



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

190	TPQ Padang Kalam	Nan Sabaris	1
191	Padang Kandang Pulau Air	Nan Sabaris	4
192	Paguh Dalam	Nan Sabaris	1
193	Paguh Duku	Nan Sabaris	1
194	Pasa Baru	Nan Sabaris	1
195	Pasa Dusun	Nan Sabaris	2
196	Pauh Kamba	Nan Sabaris	1
197	Pauh Kamba Hilia	Nan Sabaris	1
198	Rimbo Dulang Dulang	Nan Sabaris	1
199	TPQ Pinang	Nan Sabaris	3
200	Rumah Tahfizh Rahma Royan	Nan Sabaris	1
201	SMP IT Madinah Al-Fatih	Nan Sabaris	1
202	SMA 1 Nan Sabaris	Nan Sabaris	3
203	Rumah Tahfizh	Nan Sabaris	1
204	Rumah Tahfizh Nurul Qur'an	Nan Sabaris	1
205	SMP IT Pauh Kambar	Nan Sabaris	1
206	Teluk Nibung	Nan Sabaris	3
207	MDTA Al-Hikmah	Nan Sabaris	1
208	Sungai Laban	Nan Sabaris	1
209	Sunur Tengah	Nan Sabaris	1
210	Aisyiyah	2x11 Enam Lingkung	2
211	Cahaya Hati	2x11 Enam Lingkung	2
212	Dar El Iman	2x11 Enam Lingkung	2
213	Darul Mukminin	2x11 Enam Lingkung	1
214	Ashabul Kahfi	2x11 Enam Lingkung	3
215	Istiqamah	2x11 Enam Lingkung	1
216	Muhajirin	2x11 Enam Lingkung	2



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

217	Nur Muhammad	2x11 Enam Lingkung	1
218	Ponpes Modren Subulussalam	2x11 Enam Lingkung	1
219	SD IT Ashabul Kahfi	2x11 Enam Lingkung	1
220	SMA 1	2x11 Enam Lingkung	2
221	SMP IT	2x11 Enam Lingkung	2
222	Masjid Jami'	2x11 Enam Lingkung	2
223	Tawalib	2x11 Enam Lingkung	1
224	Syarafu Anam	2x11 Enam Lingkung	1
225	Ar- Rahman	Padang Sago	1
226	Al-Jamatul Rahman	Padang Sago	1
227	Bustanul Ulum	Padang Sago	2
228	MDA Darul Ulum Lubuk Aro	Padang Sago	1
229	MDA Dinul Ma'ruf	Padang Sago	2
230	MDA Madinatul Ilmi	Padang Sago	2
231	MTsN 10 Padang Sago	Padang Sago	2
232	Pesantren Tahfizh Darul Qur'an	Padang Sago	1
233	TPA Darul Ulum	Padang Sago	1
234	TPA Hidayatullah	Padang Sago	1
235	TPA Aro Jaya	Padang Sago	3
236	TPA Ar-Rahman	Padang Sago	1
237	TPA Nurul Ikhsan	Padang Sago	2
238	TPA Nurul Iman	Padang Sago	2
239	TPQ Aljamaturahmah	Padang Sago	1
240	TPQ Nurul Ikhsan	Padang Sago	2
241	TPQ Muhajirin	Padang Sago	1
242	TPQ An-Nur Pd. Sago	Padang Sago	2
243	TPQ Aro Jaya	Padang Sago	2

244	TPQ Ar-Rahman	Padang Sago	1
245	Al-Aziz Kp. Dalam	V Koto Kp. Dalam	1
246	Kampung Al-Qur'an	V Koto Kp. Dalam	3
247	Al- Huda	V Koto Kp. Dalam	1
248	Nurul Iman	V Koto Kp. Dalam	2
249	Nurul Umi	V Koto Kp. Dalam	2
250	Nuril Umi	V Koto Kp. Dalam	3
251	Nurul Hidayah	V Koto Kp. Dalam	2
252	Surau Kabun	V Koto Kp. Dalam	4
253	Sutan Jalan	V Koto Kp. Dalam	1
	Jumlah		445

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berikut data Hafizh/Hafizhah yang lolos Gebupafa tahun 2023 :

Tabel 3.8
Hafiz/Hafizah Yang Lolos Gebupafa 2023

No	KATEGORI HAFIZ/HAFIZHAH	JUMLAH (ORANG)
1	Kategori 1 Juz	350
2	Kategori 5 Juz	77
3	Kategori 10 Juz	17
4	Kategori 20 Juz	0
5	Kategori 30 Juz	1
	JUMLAH	445

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kabupaten Padang Pariaman pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

1. Meningkatkan jumlah Lembaga Pendidikan Alquran sebagai penghasil Hafiz/Hafizah;
2. Meningkatkan jumlah anggaran beasiswa bagi hafiz/hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) Kabupaten Padang Pariaman.



SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah : Persentase Penegakan Perda, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Analisa capaian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Penegakan Perda

Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkada Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan pada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2023. Salah satunya adalah meningkatkan Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2023				Interpretasi
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	67,5	77,42	114,70%	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda Perkada yang dilaporkan dan dipantau}} \times 100\%$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yaitu 77,42% dari target yang ditetapkan sebesar 67,5% dengan capaian 114,70% (interpretasi “ Sangat Berhasil”). Hasil tersebut didapat dari total 31 laporan masyarakat yang masuk 24 laporan tersebut dapat ditindak lanjuti atau diselesaikan.

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2022 dengan Tahun 2023 :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Capaian IKU
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	%	65	59,39	91,2	67,5	77,42	114,70	Sangat Berhasil

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Penegakkan Perda dan Perkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 sebesar 114,70%, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 91,2%. Artinya, capaian kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,5% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan target pada RPJMD 2021-2026 dengan realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Penegakkan Perda dan Perkada	%	62,5	65	67,5	62,5	59,29	77,42

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Penegakkan Perda dan Perkada” pada tahun 2021 sebesar 62,5% dengan target RPJMD sebesar 62,5%. Pada tahun 2022 realisasi turun menjadi 59,29 dengan target RPJMD sebesar 65%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 77,42% dari target RPJMD sebesar 67,5%.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Permasalahan pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal - Operasional dan patroli ketertiban umum, ketentraman masyarakat dalam Penegakan Perda serta perlindungan masyarakat terlaksana dengan baik namun anggaran yang ada belum cukup memadai; - Sejauh ini dirasakan bahwa upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. upaya yang dilakukan selama masih bersifat parsial, Oleh sebab itu diharapkan di masa yang akan datang forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah dapat diwujudkan secara maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama. Faktor penyebab kurang efektifnya pelaksanaan Perda di tingkat masyarakat adalah :

1. Masih terbatas/kurangnya kualitas SDM Anggota Satpol PP Damkar.
2. Belum maksimal dan meratanya sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda.
3. Masih belum memadainya Sarana dan Prasarana Penunjang Dalam Pelaksanaan Tugas.
4. Masih Kurangnya SDM PPNS, hal ini berpengaruh pada proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini jika dikaitkan dengan program dan kegiatan yang mendukung realisasi kinerja adalah dikarena tersedianya sumber dana atau anggaran yang telah dianggarkan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 409.490.950. Sebagai penunjang untuk belanja barang & jasa yang memfasilitasi program Peningkatan Kententraman Dan Ketertiban Umum berserta sub kegiatan Penanganan Gangguan Trantibum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Alternatif dan Solusi Permasalahan

Sejauh ini alternatif dan solusi yang diupayakan dalam pencapaian kinerja (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Padang Pariaman telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai efektif namun beberapa lainnya dinilai kurang efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa pengendalian yang telah ada atau yang telah terpasang diantaranya sebagai berikut : Pendekatan persuasif kepada pelanggar; Menyampaikan informasi razia kepihak tertentu; Pembelajaran mandiri terhadap perda; Menindaklanjuti laporan pelanggaran; Membentuk Tim terpadu dengan pihak TNI, POLRI, KEJARI; Membentuk Tim dan Melaksanakan patroli trantibum; serta Menyusun data pelanggaran PERDA PERKADA dengan teliti.

(e) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya Peningkatan Kententraman Dan Ketertiban Umum pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.12
Program dan Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Program
Peningkatan Kententraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan
Penanganan Gangguan Kententraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Tabel. 3.13
Anggaran untuk Kegiatan Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum

Uraian	Jumlah (Rp)
Anggaran	Rp. 409.490.950
Belanja Barang & Jasa	Rp. 376.920.050
Sisa Anggaran	Rp. 32.570.900

Berdasarkan data tabel diatas dalam kegiatan peningkatan kententraman dan ketertiban umum, total anggaran Satpol PP Damkar kabupaten Padang Pariaman untuk Kegiatan peningkatan kententraman dan ketertiban umum dengan Sub Penanganan gangguan kententraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebanyak Rp. 409.490.950. Pada tabel dapat dilihat total anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan di tahun 2023 sebesar Rp. 376.920.050 untuk belanja barang dan jasa. Adapun perbandingan anggaran dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU untuk kegiatan peningkatan kententraman dan ketertiban umum tahun 2022 dan 2023 dapat kami tampilkan pada tabel berikut :

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel. 3.14
Perbandingan Realisasi Anggaran & Realisasi Kinerja dalam Menunjang Keberhasilan Pencapaian IKU Tahun 2022 dan Tahun 2023

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Persentase Peningkatan
Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kententraman Dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Penanganan gangguan kententraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Rp. 353.267.650	Rp. 376.920.050	6,70%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 dengan realisasi anggaran 353.267.650 tercapai realisasi kinerja 59,39% sedangkan Tahun 2023 dengan realisasi anggaran Rp376.920.050 tercapai realisasi kinerja 67,5%. Dari perbandingan kedua data di atas peningkatan kinerja lebih besar dari pada peningkatan realisasi anggaran. Sehingga dengan kondisi tersebut terjadi efisiensi pada pencapaian kinerja.

Gambar 3.3
Penegakan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum



Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.4
Patroli 3 Pilar (TNI, Polri Dan Satpol PP) dalam rangka persiapan menjelang Pemilu



Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja utama "Indeks Pembangunan

Gender. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pembangunan Gender” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94	93,08	99,02	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari target 94 dengan realisasi tahun 93,08% sehingga capaian kinerja 99,02% yang berarti Sasaran IKU Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dinilai berhasil.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$$

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,60	92,78	99,12	94	93,08	99,02	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja IPG tahun 2023 mengalami peningkatan di dibandingkan dengan capaian IPG tahun 2022 selisih yaitu sebesar 0,3% . Pada tahun 2023 telah dilakukan advokasi dengan seluruh OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan untuk kegiatan yang refonsif Gender baik itu berupa fisik maupun berupa kegiatan di OPD masing-masing.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	%	93,3	93,6	94	92,69	92,78	93,08

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender” pada tahun 2021 sebesar 92,69% dengan target RPJMD sebesar 93,3%. Pada tahun 2022 realisasi meningkat menjadi 92,78 dengan target RPJMD sebesar 93,6%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 93,08% dari target RPJMD sebesar 94%. Realisasi kinerja indikator “Indeks Pembangunan Gender” dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

d) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Tahun 2023 dengan Provinsi

Adapun realisasi capaian indikator kinerja IPG Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.1
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Capaian IPG Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, Dimana realisasi IPG Provinsi tahun 2023 adalah 94,72% sedangkan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 93,08

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Ketidak berhasilannya IPG tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya keterwakilan Perempuan di Parlemen dan anggaran Responsif Gender yang belum ideal. DINSOSP3A dengan 27 OPD dan 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Anggaran Responsif Gender yang melonjak naik dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp. 48.850.010.604,- sedangkan tahun 2023 masih sebesar Rp. 48.850.010.604,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 47.265.566.006,-

Beberapa faktor penyebab ketidakberhasilannya mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten tahun 2021-2026 sebesar 94 antara lain :

1. Masih banyaknya fasilitas umum maupun pemerintah yang belum ramah gender. Fasilitas umum berbasis gender memiliki pesan khusus agar kelompok rentan dapat masuk dan menikmati taman terbuka, perkantoran, tempat wisata dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Kelompok gender ini rentan karena kondisi fisiknya yang memiliki kelemahan karena usia seperti yang dialami para lansia, karena kecacatan secara fisik seperti yang dialami para penyandang disabilitas atau karena perlu ke hati-hatian seperti bagi anak-anak yang harus didampingi. Ruang area merokok bagi pria juga merupakan fasilitas khusus bagi para perokok mengisi waktu luang sambil menemani keluarga belanja di tempat wisata atau pun diperkantoran khusus mengurus urusan pelayanan dasar masyarakat yang perlu ruang tersebut.
2. Diantara penyebab yang telah diuraikan diatas kemudian kurangnya minat Perempuan menjadi anggota legislatif.
3. Tidak adanya UPT P3A yang dapat menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak serta pemberdayaan Gender lebih luas lagi.

Adapun Solusi yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan IPG sesuai dengan RPJMD 2021-2026:

1. Membuat regulasi yang lebih berpihak pada pembangunan Gender
2. Menambah anggaran terkait dengan Program Gender di OPD dan Kecamatan.
3. Melakukan Kerjasama dengan dunia usaha dan pihak swasta lainnya.
4. Meningkatkan minat perempuan dalam bidang politik.
5. Membentuk UPT P3A .
6. Melakukan koordinasi dengan OPD mitra kerja untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penganggaran Responsif Gender yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi yang crosscutting dengan Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, BPKD, Inspektorat dan seluruh OPD terkait.

f) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2023.

Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Disamping Penanganan kasus kekerasan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan tingkat pemberdayaan perempuan khususnya perempuan sebagai kepala keluarga dengan memberikan pelatihan berupa bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

- PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan

Adapun Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi terhadap Anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Kab. Padang Pariaman bisa merubah pola pikir tentang keberadaan organisasi perempuan dan fungsi lembaga yang ada sebagai motivasi dan pemberi informasi yang membangun.
2. Dharma Wanita Persatuan yang merupakan kumpulan istri-istri Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat membantu suami dalam penyebaran informasi tentang pemberdayaan perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungannya, pembinaan anak dan remaja kearah yang lebih baik .
3. Dalam peringatan Hari Ibu yang ke 95 Tingkat Kab. Padang Pariaman, GOW dan DWP juga ikut berpartisipasi, Acara yang mengusung tema “Perempuan Berdaya, Indonesia Maju,” diselenggarakan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95 tahun 2023.
4. Untuk Tahun 2023 Padang Pariaman juga telah menseleksi Perempuan Berjasa dan Berprestasi di Bidang Kesehatan, diusulkan untuk Tingkat Provinsi yaitu Ondani dari Nagari III Koto Aur Malintang Kec. IV Koto Aur Malintang.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) menyelenggarakan Pelatihan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik dan pengambilan Keputusan, diikuti 50 perempuan dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis perempuan, kader partai politik, hingga perempuan yang ingin berkarier di bidang politik.
6. Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan pengolahan bahan dasar ikan untuk dapat dikembangkannya menjadi usaha penambahan ekonomi keluarga, dengan nara sumber dari Dinas Perikanan Kab. Padang Pariaman.

Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan mendapat Penghargaan APE Predikat NINDYA Tingkat Nasional.

Gambar 3.5
Launching Nagari Ramah Perempuan & Peduli Anak



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun pengukuran persentase efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Gender diperoleh PAGU sebesar Rp. 634.796.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 559.347.961,- dengan persentase sebesar 88,11% . Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 75.449.239,- atau 11,89%

h) Penghargaan

Gambar 3.6
Penerimaan Penghargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya)
Tingkat NINDYA Tahun 2023



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Penghargaan ini merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak baik dari tingkat kabupaten sampai ketinggian nagari, yang mana dibuktikan dengan ditetapkannya dua Nagari sebagai Nagari Ramah Perempuan & Peduli Anak (DRPPA) yaitu, Nagari Pauh Kamar dan Nagari Toboh Ketek.



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang. Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang merupakan salah satu indikator kinerja Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mencapai target sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi”.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 :

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	69	65,63	95,11%	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang jaringan jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang” sebesar 65,63%

dari target yang telah ditetapkan yaitu 69% sehingga memperoleh capaian 95,11% dengan kategori “Berhasil”.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	67,00	62,03	92,56	69	65,63	95,11	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Indikator Kinerja Utama “Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang” memperoleh capaian kinerja sebesar 95,11% pada tahun 2023. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Berhasil” untuk pencapaian sebuah indikator kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian kinerja tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,55% dimana pada tahun 2022 dari target 67% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 62,03% dengan capaian 92,56%.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	65,30	67	69	63,63	62,02	65,63

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang” pada tahun 2021 sebesar 63,63% dengan target RPJMD sebesar 65,30%. Pada tahun 2022 realisasi menurun menjadi 62,02% dengan target RPJMD sebesar 67%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan dengan realisasi sebesar 65,63% dari target RPJMD sebesar 69%.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui;
2. Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan;
3. Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan laju pembangunan jalan dan jembatan
2. Seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan
3. Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan.
4. Adanya Perubahan Sistem Penganggaran dari pemerintah pusat terhadap penggunaan dana DAU.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

1. Perbaikan kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
2. Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

(e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

1. Program Penyelenggaraan jalan dengan total anggaran program Rp. 116.060.110.264,- realisasi Rp. 107.325.887.630,00,- dengan persentase capaian 92,47%.
 - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan, antara lain :
 - a. Survei kondisi jalan/jembatan
 - b. Pembangunan jalan
 - c. Rehabilitasi jalan
 - d. Pemeliharaan rutin jalan
 - e. Pembangunan jembatan

f. Rehabilitasi jembatan.

Gambar 3.7
Peningkatan Jalan Hotmix DAU Paket 1 Tahun 2023



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

(f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 realisasi anggaran 2022 : Rp. 74.921.692.136,- dengan realisasi kinerja 2022 46,16 km. Sedangkan realisasi anggaran 2023 : Rp.107.325.88.630,00,- (Realisasi Kinerja 2023 : 65,37Km). Berdasarkan dari data realisasi anggaran dan realisasi kinerja tahunan diatas dapat diasumsikan bahwa penggunaan dana untuk pencapaian IKU "Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang" sudah efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan juga meningkat.

**SASARAN STRATEGIS 4****Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air**

Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan demi pemberdayaan terhadap masyarakat.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2023

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik “ tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	70,00	68,50	97,86	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” tahun 2023 yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman sebesar 68,50% dari target yang ditetapkan sebesar 70,00%. Persentase capaian realisasi lebih besar dari pada persentase target yang telah ditetapkan yaitu mencapai angka 97,86% dengan kategori “Berhasil”.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	58,72	69,47	118,30	70,00	68,50	97,86	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Indikator Kinerja Utama “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik”, mendapatkan realisasi 69,47% dengan persentase capaian sebesar 118,30% pada tahun 2022 dan termasuk kedalam kategori “Sangat Berhasil”. Pada tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap target kinerja, dimana target pada RPJMD 2021-2026 ditetapkan sebesar 62,72% sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2022 sebesar 69,47%. Realisasi tersebut telah melebihi target tahun 2023 sesuai RPJMD sehingga target kinerja tahun 2023 ditetapkan menjadi 70,00%. Adapun realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebesar 68,50% dengan persentase capaian sebesar 97,86%.

(c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	54,82	58,72	62,72	69,30	69,47	68,50

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” pada tahun 2021 sebesar 69,30% dengan target RPJMD sebesar 54,82%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 69,47% dengan target RPJMD sebesar 58,72%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 68,50% dari target RPJMD sebesar 62,72%.

(d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

- Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku ;
- Banyaknya Sumber daya Air yang terletak pada tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemda dapat mengelola SDA secara optimal.

- Adanya Perubahan Sistem Penganggaran dari pemerintah pusat terhadap penggunaan dana DAU

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, dilakukan beberapa upaya yakni :

- Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air ;
- Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi ;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang menyebabkan realisasi indikator kinerja bisa tercapai adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi.
- Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

(e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi Anggaran 2022 : Rp. 8.174.043.508, realisasi kinerja = 245,9 Ha + Luas 12 daerah D.I). Sedangkan realisasi anggaran 2023 : Rp11.586,894,937,00, dengan realisasi kinerja=521,22 Ha + Luas 22 daerah irigasi (DI) dengan kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa penggunaan dana untuk capaian IKU kinerja jaringan irigasi sudah efisien dan capaiannya juga meningkat.

Gambar 3.8
Pekerjaan Daerah Irigasi Maransi (DAK)



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023



SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang

Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Perencanaan Tata Ruang merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Persentase ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tata ruang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Konsekuensi logisnya adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2023

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	70,00	72,86	104,08	Sangat Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$$

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” tahun 2023 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 72,86% dari target yang ditetapkan sebesar 70,00%. Persentase capaian realisasi lebih besar dari pada persentase target yang telah ditetapkan sebesar 104,08%. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” dengan kategori “Sangat Berhasil”.

b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	68	69,57	102,30	70,00	72,86	104,08	Sangat Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang, dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Ketaatan terhadap RTRW, mendapatkan capaian persentase sebesar 104,08% pada tahun 2023. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Sangat Berhasil” untuk pencapaian sebuah indikator kinerja.
2. Pada tahun 2022 dengan target 68,00% mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 69,57% dengan persentase capaian sebesar 102,30% masuk kedalam kategori “Sangat Berhasil”.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	63	68	70	60,39	69,57	72,86

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” pada tahun 2021 sebesar 60,39% dengan target RPJMD sebesar 63%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 69,57% dengan target RPJMD sebesar 68%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 72,86% dari target RPJMD sebesar 70%.

d) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menunjang IKU

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

- Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidak seimbangan kepentingan Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Institusional);
- Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang ;
- Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat;
- Adanya Perubahan Sistem Penganggaran dari pemerintah pusat terhadap penggunaan dana DAU.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja adalah :

- Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaan) ;
- Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu ;
- Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.
- Penyusunan Kajian tata ruang yang sesuai dengan peruntukan lahan dan fungsinya.

Selain upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat juga beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja antara lain :

- Adanya kolaborasi Akademisi, Birokrasi, Dunia Usaha, Masyarakat (NGO Lingkungan) dan Dunia Pers dalam penyusunan rencana rinci Tata Ruang ;
- Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala ;
- Meningkatkan Koordinasi Lintas OPD;

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah, dengan rincian sub kegiatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Total Anggaran Program 2023 : 748.150.027.00 dengan realisasi Rp. 719.668.502.

Gambar 3.9
Pembahasan Lintas Sektor Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang di
Kementerian ATR/BPN



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

(c) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran 2022 : Rp. 525.373.483,00 (realisasi kinerja 2022 : 60,39%),
Realisasi anggaran 2023 : Rp. 719.668.502,00 (realisasi kinerja 2023 : 72,86%) dengan
kondisi tersebut dapat diasumsikan bahwa penggunaan dana untuk capaian IKU, Kinerja
Program Penyelenggaraan penataan ruang sudah efisien.

**SASARAN STRATEGIS 6****Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata**

PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product*) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi daerah sehingga menjadikan PDRB sebagai suatu sasaran strategis. Sehingga, PDRB dapat mengukur kondisi ekonomi suatu daerah dari kontribusi berbagai sektor ekonomi.

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 3 yaitu : “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah : Kontribusi Ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dan Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB. Masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kontribusi Ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Ekonomi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB didukung 3 Sub Sektor Utama, yaitu: Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Sub Sektor Perikanan dan Sub Sektor Perternakan. Dimana capaian kontribusi Pertanian/Perkebunan tersebut dapat di lihat pada uraian berikut ini.

a) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Juta	2.862.238,58	2.745.289,91	95,91	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada tahun 2023 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB mendapatkan realisasi kinerja sebesar Rp. 2.745.289,91 dengan target yang

ditetapkan sebesar Rp. 2.862.238,58. Hal ini termasuk kategori yang “Berhasil” dengan persentase pencapaian sebesar 95,91%. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Nilai PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan}}{\text{Target Tahun 2023}}$

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut akan disajikan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB” tahun 2022 dengan tahun 2023.

Tabel 3.28

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Juta	2,796,247.14	2,845,588.2	2.862.238,58	2.745.289,91	95,91

Sumber : BPS Padang Pariaman & Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp. 100.299,1.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

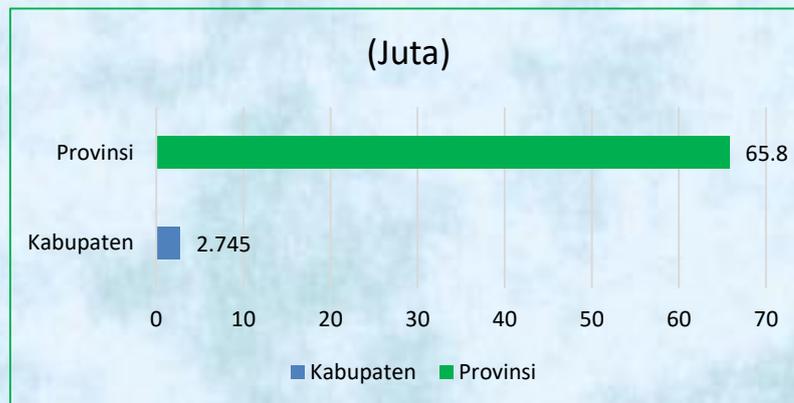
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Juta	2.731.777,20	2.796.247,14	2.862.238,58	2.608.426,6	2.845.588,2	2.745.289,91

Realisasi Indikator Kinerja “Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB” pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.608.426,6 (Juta) dengan target RPJMD sebesar Rp. 2.731.777,20 (Juta). Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar Rp. 2.845.588,2 (Juta) dengan target RPJMD sebesar Rp. 2.796.247,14 (Juta). Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar Rp. 2.745.289,91 dari target RPJMD sebesar Rp. 2.862.238,58.

d) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Provinsi dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2023

Berikut ini akan disajikan grafik mengenai perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023.

Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor
Pertanian/Perkebunan Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada tahun 2023 Nilai PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 65.800.583,43 (Juta) dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 2.745.289,91 (Juta). Pada sektor ini, ditahun 2023 nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.290.874 dan Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sebesar Rp. 100.299,1 dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2022.

Terdapat 2 (dua) sub sektor pendukung yang berkontribusi terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan yaitu Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan.

➤ **Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Peternakan :**

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Sub. Sektor Peternakan Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target	Tahun 2023		Kategori
				Realisasi	Capaian (%)	
Jumlah Produksi Hasil Ternak	Daging/Ton	16.227,23	17.342,12	11.636,21	67,09%	Kurang Berhasil
Jumlah Produksi Telur	Ton	31.036,534	25.447,92	30.093,70	118,25%	Sangat Berhasil

Sumber : Disnakkeswan Kab. Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Peternakan dimana jumlah produksi daging tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 16.227,23 daging/ton, Perhitungan Produksi daging melalui BPS berdasarkan jumlah dari pemotongan ternak sapi/kerbau. namun ketersediaan ternak sapi dan kerbau cukup

karena hasil produk yang biasa didapatkan dalam usaha peternakan di Kabupaten Padang Pariaman. Pada umumnya, peternak menjual hasil ternaknya dalam keadaan hidup dengan pekiraan atau taksiran bobot ketika akan disembelih. Sedangkan untuk jumlah produksi telur mengalami peningkatan hasil produksi sebesar 30.093.70 ton.

➤ **Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Perikanan :**

Tabel 3.31
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
1.	Meningkatkannya Produksi Perikanan	Persentase Tingkat Produksi Perikanan Tangkap	Persen (%)	2,07%	1,5 %	72,46 %	Cukup Berhasil
		Persentase Tingkat Produksi Perikanan Budidaya	Persen (%)	2,07%	2,08%	100,48 %	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkannya Produksi Hasil Olahan Ikan	Persentase Tingkat Produksi Ikan Olahan	Persen (%)	2,07 %	1,7%	82%	Cukup Berhasil
3.	Meningkatkannya Pemasaran hasil Perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	44,95	44,23	98,39	Berhasil
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelaporan	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Inspektorat	Huruf	BB	BB	BB	Berhasil

Berdasarkan perbandingan target dan realisasi indikator kinerja sasaran pada tahun 2023 di atas, capaian semua indikator sasaran yaitu ≤ 90 s.d > 100 atau dengan interpretasi “berhasil” hingga “Sangat berhasil”.

Pada tahun 2023 “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” adalah 19.380,5 ton/tahun dan “Jumlah Produksi Perikanan Tangkap” pada Tahun 2022 adalah 19.130,50. dengan realisasi kinerja IKU-1 Persentase Tingkat Produksi Perikanan dengan menggunakan formulasi (Produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi produksi perikanan tangkap tahun n-1) dibagi produksi perikanan tangkap tahun n-1 kali 100% maka didapatkan hasilnya Kenaikan sebesar 1,5 % menunjukkan bahwa realisasi kinerja sudah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan interpretasi “ berhasil”.

e) Faktor Penghambat Capaian Kinerja IKU PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2023

Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas tanaman pangan khususnya tanaman padi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terjadi serangan hama penyakit (OPT), serta terjadinya gagal panen akibat bencana alam.

Berikut dirincikan faktor-faktor yang ditenggarai sebagai penyebab tidak tercapainya target dan turunnya produksi tanaman padi pada tahun 2023:

1. Serangan hama tikus di beberapa kecamatan di Padang Pariaman. Luas areal sawah yang mengalami serangan 20,95 Ha dan luas tanaman yang terancam serangan seluas 336,50 Ha.
2. Serangan penyakit bulai di beberapa kecamatan di Padang Pariaman. Luas areal sawah yang mengalami serangan 9 Ha dan luas tanaman yang terancam serangan seluas 40 Ha.
3. Serangan hama wereng coklat di beberapa kecamatan di Padang Pariaman. Luas areal sawah yang mengalami serangan 41,45 Ha dan luas tanaman yang terancam serangan seluas 508 Ha.
4. Gagal panen akibat bencana banjir pada padi sawah seluas 332,45 Ha dan pada tanaman jagung seluas 42,50 Ha.
5. Luas kebun kakao rakyat cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya serangan hama penyakit yang menyebabkan penurunan produksi kakao.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian diantaranya berupa penyediaan sarana produksi, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, pemberantasan hama penyakit (organisme pengganggu tumbuhan/OPT).
2. Menyediakan benih padi bermutu kepada masyarakat tani sebanyak 35 ton yang bersumber dari dana APBN. Dari APBD Provinsi Sumbar, disalurkan sebanyak 2,45 Ton benih padi dan 1,5 ton benih jagung.
3. Membangun/merehabilitasi prasarana irigasi yang merupakan urat nadi dalam usaha pertanian, tujuan pengembangan prasarana irigasi untuk memenuhi kebutuhan air irigasi ke setiap areal/lahan kelompok tani.
4. Mendukung pembangunan sarana irigasi yaitu Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani (DAK Fisik Pertanian). Output dari kegiatan ini berupa tersedianya jaringan irigasi tersier.
5. Melaksanakan sebanyak 37 unit pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier, 12 unit Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan 2 Pembangunan Jalan Produksi. Kegiatan ini bersumber dari dana DAK Fisik Pertanian Tahun 2023.
6. Memberikan bantuan atau pinjaman sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada masyarakat tani. Alsintan yang dipinjamkan berupa alat pengolahan tanah (handtraktor), melalui Kegiatan Operasional Brigade Tanam. Kegiatan ini meminjam pakaikan handtraktor yang ada pada DistanKP.
7. Memberikan alat mesin pertanian kepada masyarakat melalui kelompok tani berupa *tractor roda 4, handtracktor, power thresher, corn seller, cultivator, pompa air, APPO, sepeda motor roda 3, mesin potong rumput dan hansprayer*. Kegiatan ini bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi maupun dana APBD Kabupaten Padang Pariaman.
8. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan melalui penerapan teknis budidaya, melalui tenaga teknis dilapangan terus berupaya mentrasfer teknologi-teknologi baru kepada masyarakat tani dengan menerapkan teknologi tanaman padi yang dikenal dengan tanaman jajar legowo. Diharapkan dengan

penerapan teknologi ini dapat mengoptimalkan lahan persawahan yang diusahakan.

9. Bekerja sama dengan Stasiun Klimatologi Sumatera Barat dan Bank Indonesia Perwakilan Sumbar melakukan penerapan sekolah lapang iklim dalam pengelolaan usaha tani padi sawah. Sekolah lapangan ini tidak melakukan pengolahan tanah terlebih dahulu sebelum penanaman benih padi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan organik untuk menggemburkan tanah, sehingga tanah tidak perlu di bajak. Perlakuan ini ternyata dapat menekan biaya produksi pengolahan tanah dan menimalisir penggunaan pupuk.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akuntabilitas keuangan menyajikan besarnya anggaran, realisasi anggaran dan realisasi fisik dari segenap kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman, sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Dimana secara keseluruhan persentase realisasi anggaran belanja langsung atau kegiatan sebesar 93,01%. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksanakan fisiknya dilapangan, hal ini disebabkan oleh terkendalanya penyaluran anggaran kas atau ketersediaan kas daerah. Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tahun 2023

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Fisik (%)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp.)	Ket
			(Rp)	(%)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	79,000,000		35,415,180	44.83	43,584,820	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	24,000,000		14,715,000	61.31	9,285,000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3,000,000	100.00	2,320,000	77.33	680,000	
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	18,000,000	80.00	11,415,000	63.42	6,585,000	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	3,000,000	80.00	980,000	32.67	2,020,000	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	25,000,000		4,408,000	17.63	20,592,000	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	25,000,000	20.00	4,408,000	17.63	20,592,000	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	30,000,000		16,292,180	54.31	13,707,820	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5,000,000	100.00	1,010,000	20.20	3,990,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25,000,000	100.00	15,282,180	61.13	9,717,820	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	10,000,000		9,209,500	92.10	790,500	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10,000,000		9,209,500	92.10	790,500	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10,000,000	100.00	9,209,500	92.10	790,500	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8,000,000		3,320,000	41.50	4,680,000	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8,000,000		3,320,000	41.50	4,680,000	



Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	3,000,000	50.00	1,400,000	46.67	1,600,000
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5,000,000	40.00	1,920,000	38.40	3,080,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10,882,994,985		9,868,321,769	90.68	1,014,673,216
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,177,040		16,817,750	30.48	38,359,290
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27,132,020	100.00	12,173,000	44.87	14,959,020
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,045,020	100.00	4,644,750	16.56	23,400,270
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,724,689,369		9,025,427,311	92.81	699,262,058
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9,589,939,369	100.00	8,895,498,011	92.76	694,441,358
Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	125,740,000	100.00	125,740,000	100.00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	9,010,000	100.00	4,189,300	46.50	4,820,700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	309,957,200		190,968,011	61.61	118,989,189
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,502,000	40.00	1,030,000	29.41	2,472,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,059,700	40.00	7,664,700	76.19	2,395,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	19,980,000	80.00	13,072,400	65.43	6,907,600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276,415,500	80.00	169,200,911	61.21	107,214,589
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29,257,056		200,000	0.68	29,057,056
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29,257,056	5.00	200,000	0.68	29,057,056
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690,624,320		613,053,697	88.77	77,570,623
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88,338,720	75.00	44,480,490	50.35	43,858,230
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,000,000	100.00	47,359,047	92.86	3,640,953
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,020,000	60.00	8,350,000	55.59	6,670,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	536,265,600	100.00	512,864,160	95.64	23,401,440
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73,290,000		21,855,000	29.82	51,435,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73,290,000	50.00	21,855,000	29.82	51,435,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	840,351,900		650,886,575	77.45	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	651,108,250		573,536,500	88.09	77,571,750
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	395,410,000	100.00	384,810,500	97.32	10,599,500
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	255,698,250	100.00	188,726,000	73.81	66,972,250
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	189,243,650		77,350,075	40.87	111,893,575
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	100,190,750	100.00	66,484,725	66.36	33,706,025
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	20,635,000	25.00	2,240,000	10.86	18,395,000
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	68,417,900	25.00	8,625,350	12.61	59,792,550
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	11,549,002,000		11,189,577,000	96.89	359,425,000
Pengembangan Prasarana Pertanian	552,810,000		520,515,000	94.16	32,295,000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2,010,000	100.00	470,000	23.38	1,540,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	550,800,000	100.00	520,045,000	94.42	30,755,000
Pembangunan Prasarana Pertanian	10,996,192,000		10,669,062,000	97.03	327,130,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	7,400,000,000	100.00	7,400,000,000	100.00	-
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,296,192,000	87.50	2,970,000,000	90.10	326,192,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	300,000,000	100.00	299,062,000	99.69	938,000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	21,459,000		17,045,000	79.43	4,414,000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	21,459,000		17,045,000	79.43	4,414,000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	21,459,000	100.00	17,045,000	79.43	4,414,000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	450,100,000		400,341,750	88.95	49,758,250
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	450,100,000		400,341,750	88.95	49,758,250

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	39,300,000	100.00	5,620,000	14.30	33,680,000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	200,000,000	100.00	199,582,750	99.79	417,250
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	210,800,000	100.00	195,139,000	92.57	15,661,000
JUMLAH	23,840,907,885		22,174,116,774	93.01	1,666,791,111

Sumber : Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

(d) Penghargaan Tahun 2023

Selama tahun 2023 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memperoleh penghargaan berupa:

1. Peringkat Terbaik 3 Kategori Komitmen Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Program Genius (Gerakan Edukasi dan Pemberian Makan untuk Siswa) dari Badan Pangan Nasional (BAPANAS).

Gambar 3.10 Penghargaan dari Badan Pangan Nasional Peringkat Terbaik 3 Kategori Komitmen Kepala Dinas Dalam Pelaksanaan Program Genius



Sumber : Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Peringkat 2 Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Sumbar an. KWT Matahari Bersinar Kec. Batang Anai.

Gambar 3.11 Penghargaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Peringkat 2 Kategori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan



Sumber : Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. Juara Teladan 3 Penyuluh Pertanian PPPK Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 3.12
Piagam Penghargaan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Juara Teladan 3 Penyuluh Pertanian PPPK



Sumber : Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,75	10,19	94,79	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran strategis Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata dengan indikator sasaran strategis tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB. Pada tahun 2023 target Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 10,75% dengan realisasi sebesar 10,19%, presentase capaian tersebut sebesar 94,79% (Berhasil). Target tahun 2023 sebesar 10,75% tersebut merupakan target yang telah di revisi berdasarkan capaian realisasi kinerja tahun 2022.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2022 dan 2023 yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	2023		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,44	10,75	10,19	94,79	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pencapaian Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2023 sebesar 10,19% lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 yakni sebesar 10,44% dengan selisih 0,25%. Adapun hal-hal yang mempengaruhi tingkat Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB yakni dari Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata.

Grafik 3.3
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB



Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.35
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,52	8,58	8,60	10,65	10,44	10,19

Realisasi Indikator Kinerja “Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB” pada tahun 2021 sebesar 10,65% dengan target RPJMD sebesar 8,52%. Pada tahun

2022 realisasi kinerja sebesar 10,44% dengan target RPJMD sebesar 8,58%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 10,19 dari target RPJMD sebesar 8,60%.

d) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Tahun 2023

Adapun Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
Terkait PDRB Tahun 2023



Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Realisasi Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebesar 10,19%. Angka lebih rendah jika dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 16,55% dan Nasional sebesar 12,94%. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri ini dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

e) Upaya-Upaya Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Untuk mencapai target Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa upaya yaitu :

1. Melakukan Monitoring terhadap penyaliran pupuk bersubsidi.
2. Menerbitkan Rekomendasi bagi pembangunan dan perpanjangan izin Gudang yang akan diteruskan ke DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman.
3. Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat yang melibatkan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.
4. Memantau Stabilitas harga kebutuhan Bahan Pokok.
5. Melakukan tera/tera ulang bagi alat ukur dan timbangan dalam upaya perlindungan konsumen.

6. Melakukan pemantauan terhadap pengepul dan eksportir.
7. Memfasilitasi promosi bagi produk unggulan daerah melalui berbagai event daerah/nasional.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain adanya refocusing anggaran diantaranya Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran dengan anggaran awal sebesar Rp. 432.434.390 menjadi Rp. 311,905,000. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan anggaran awal sebesar Rp. 199.999.630 menjadi Rp. 29,195,000. Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran awal sebesar Rp. 21.002.730 menjadi Rp. 10,000,000. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran awal sebesar Rp. 59.999.910 menjadi Rp. 52,062,300. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri untuk program ini anggaran awalnya sebesar Rp. 100.000.000 menjadi Rp. 99,999,090. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi anggaran awal Rp. 19.120.250 dilakukan efisiensi menjadi Rp. 12,040,000. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dari anggaran awal sebesar Rp. 37.185.000 menjadi Rp. 29,335,000. Program pendidikan dan latihan perkoperasian Rp. 406,770,000 anggarannya sama antara nggaran awal dan perubahan dikarenakan dana berasal dari DAK Non Fisik. Program penilaian kesehatan ksp/ usp koperasi dari anggaran awal Rp. 34.194.600 menjadi Rp. 13,850,000. Program pengembangan UMKM dengan anggaran awal Rp. 726.572.500 dilakukan efisiensi menjadi Rp. 241,913,000. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan anggaran awal sebesar Rp. 154.233.000 menjadi Rp. 87,022,000.

g) Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja

Untuk mencapai Indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 311,905,000 dan realisasi anggarannya Rp. 287,990,530 atau dengan persentase 92,33 % dengan kegiatannya sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dengan anggarannya Rp. 11,905,000 dan realisasi anggarannya Rp. 6,880,000 atau dengan persentase 57,79 % dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggarannya Rp. 11,905,000 dan realisasi anggarannya Rp. 6,880,000 atau dengan persentase 57,79 %.
 - b. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 300,000,000 dan realisasi anggarannya Rp. 281,110,530 atau dengan persentase 93,70 % dengan sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 300,000,000 dan realisasi anggarannya Rp. 281,110,530 atau dengan persentase 93,70 %

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah :
- Tercapainya Pembangunan Pasar Rakyat yaitu Pasar Rakyat Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung, yang mendapat Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2023.

Gambar 3.13
Pembangunan Pasar Rakyat di Pasar Pakandangan



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan anggaran Rp. 29,195,000 dan realisasi anggarannya Rp. 19,870,600 atau dengan persentase 68,06% dengan kegiatannya:
 - a. Kegiatan Pengendalian harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan anggarannya Rp. 15,000,000 dan realisasi anggarannya Rp. 12,270,000 atau dengan persentase 85,13 % dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggarannya Rp. 15,000,000 dan realisasi anggarannya Rp. 12,270,000 atau dengan persentase 85,13 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah :

- a) Target Jumlah Pasar yang dipantau ada 18 Pasar, tetapi hanya 10 Pasar yang tercapai pemantauannya hingga bulan November 2023
- b) Target Operasi Pasar yang akan dilakukan 11 kali, dan 11 kali Operasi Pasar yang terealisasi yaitu :
 - Pasar Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Operasi Pasar Murah Ramadhan 1444 H, tanggal 10 April 2023
 - Pasar Barebeh Kecamatan Sei. Limau, Operasi Pasar Murah Ramadhan 1444 H, tanggal 11 April 2023
 - Pasar Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Operasi Pasar Murah Murah Ramadhan 1444 H, tanggal 12 April 2023
 - Pasar Tandikat Kecamatan Patamuan, Operasi Pasar Murah Murah Ramadhan 1444 H, tanggal 13 April 2023
 - Pasar Balai Baru Kecamatan Sintoga, Operasi Pasar Murah Murah Ramadhan 1444 H, tanggal 17 April 2023
 - Kantor PKK Nagari Padang Bintungan Kecamatan Nan Sabaris, Operasi Pasar Murah Murah Ramadhan 1444 H, tanggal 18 April 2023

- Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingkung, tanggal 13 November 2023
- Pasar Kampung Galapung, Kec. Ulakan Tapakis tanggal 14 November 2023
- Pasar Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung tanggal 16 November 2023
- Pasar Basung, Kec. V Koto Kp. Dalam tanggal 20 November 2023
- Pasar Sungai Limau, Kec. Sungai Limau tanggal 21 November 2023

Gambar 3.14
Pemantauan Harga Bahan Pokok di Pasar Lubuk Alung



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- b. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggarannya Rp. 14,195,000 dan realisasi anggarannya Rp. 7,100,500 atau dengan persentase 50,02 % dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan anggarannya Rp. 14,195,000 dan realisasi anggarannya Rp. 7,100,500 atau dengan persentase 50,02 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah :

- a) Jumlah Distributor Pupuk yang memiliki legalitas lengkap sebanyak 5 Distributor yaitu :
- PUSKUD Sumbar di Kayu Tanam
 - CV. Wahana Prima Mandiri di Kab. Padang Pariaman
 - CV. KJPPS di Nan Sabaris
 - PT. Tina Dimans Raya di Lubuk Alung
 - PT. Farrel Atharhesa Pratama Padang di Kab. Padang Pariaman
- b) Jumlah Kios Pupuk bersubsidi yang memiliki legalitas lengkap sebanyak 7 Kios, yaitu :
- UD. Karya Tani di Batang Gasan
 - UD. Tani Jaya Mandiri di Kudu Ganting
 - UD. Sejahtera Tani di Sei. Asam Enam Lingkung
 - UD. Harvest Agriculture di Sicincin
 - UD. Poliagro Sejahtera di Pakandangan
 - UD. Dua Putra Tani di Sungai Geringging
 - UD. Agus di Pasar Sungai Geringging
 - UD. Damai Sejahtera di Nagari Campago
 - UD. Tani Makmur di Toboh Nagari Kampung Dalam
 - UD. Tani Subur di PasarKampung Dalam
 - UD. Aro Tani di Pasar Tandikat

- UD. Putra Sikumbang di Pasar Tandikat
- UD. Famili Tadi di Sintuk
- UD. Tani Subur di Sintuk
- UD. Harapan Tani di Sungai Laban
- UD. Bayur di Bayur Pauh Kamar
- UD. Anugrah Vio Tani Mandiri di Balah Hilir Lubuk Alung
- UD. Tani Mandiri di Aia Tajun
- UD. Bunda Tani di Pungguang Kasiak
- UD. Cahaya Tani di Singguling

Gambar 3.15
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
Di Tingkat Daerah Kabupaten



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran Rp. 10,000,000 dan realisasi anggarannya Rp. 6,910,000 atau dengan persentase 69,10 % dengan kegiatannya
- Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 10,000,000 dan realisasi anggarannya Rp. 6,910,000 dengan persentase realisasi 69,10% dari kegiatan tersebut terdapat sub Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 10,000,000 dan realisasi anggaran Rp. 6,910,000 dengan persentase realisasi 69,10 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah :

- Tercapainya Koordinasi dengan Instansi terkait dan pedagang Komoditi tentang Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah di Kecamatan, yaitu :

Tabel 3.36
Kecamatan Dan Komiditi Yang Dihasilkan

No.	Kecamatan	Komoditi
1.	Lubuk Alung	Pinang, Copra, Kulit manis, Cokelat, Cengkeh
2.	VII Koto Sei. Sarik	Pinang
3.	V Koto Timur	Pinang, Kulit Manis, Cengkeh, Cokelat, Pala, Kapulaga, Kopi
4.	IV Koto Amal	Pinang, Cokelat, Kopra, Pala, Kulit Manis, Kapulaga, Cengkeh
5.	Sei. Limau	Pinang, Cokelat
6.	Batang Gasan	Pinang, Coklat, Pala, Cengkeh, Kopra

7.	Sei. Geringging	Pinang, Coklat, Pala, Kapulaga, Cengkeh, Kulit Manis, Case, Bunga Pala
8.	Kayu Tanam	Pinang, Coklat, Kopra, Kulit Manis
9.	Patamuan	Pinang, Kulit Manis, Coklat, Pala, Kopra
10.	Kampung Dalam	Pinang, Kulit Manis, Coklat, Kapulaga, Cengkeh, Pala, Kopra
11.	Padang Sago	Pinang, Pala, Kulit Manis, Kopra, Kopi, Coklat, Kelapa

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.16
Survei Komoditi Ekspor



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp. 52,062,300 dan realisasi anggarannya Rp. 50,344,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 96,70 % dengan kegiatannya :

- Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan dengan anggaran Rp. 52,062,300 dan realisasi anggarannya Rp. 50,344,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 96,70 % dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 52,062,300 dan realisasi anggarannya Rp. 50,344,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 96,70 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu :

- Terlayannya pemilik UTTP untuk permintaan tera/tera ulang UTTP nya.
- Tersedianya data UTTP yang telah ditera ulang di Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis UTTP yang ditera ulang adalah:

- Pompa ukur BBM sebanyak 129 nozzle
- Timbangan jembatan sebanyak 12 unit
- Timbangan elektronik sebanyak 120 unit
- Timbangan Ashpalt Mixing Plant (AMP) sebanyak 24 unit
- Timbangan Batching Plant sebanyak 23 unit
- Anak timbangan sebanyak 151 unit
- Timbangan pegas sebanyak 183 unit
- Dacin logam sebanyak 15 unit
- Timbangan sentisimal sebanyak 32 unit
- Timbangan bobot insut sebanyak 2 unit
- Neraca sebanyak 6 unit

- Timbangan meja sebanyak 8 unit
- Timbangan crane sebanyak 2 unit dan Meter arus bahan bakar minyak sebanyak 6 unit
- c. Pasar-pasar yang dilaksanakan sidang tera, tera ulang adalah pasar batubasa, pasar pauh kamba, pasar lubuk alung, pasar sungai sarik, pasar lubuk alung, pasar padang sago, pasar sungai geringging, pasar sungai limau.
- d. Jumlah pelaksanaan tera, tera ulang pada UTTP terpasang sebanyak 18 perusahaan, 8 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, 3 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, 8 Pertashop, 1 Depot Pengisian Pesawat Udara, 1 Bandara dan 1 Bandara Cargo.

Gambar 3.17
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran Rp. 99,999,090 dan realisasi anggarannya Rp. 94,821,768 atau dengan persentase realisasi anggaran 94,82 % dengan Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 99,999,090 dan realisasi anggarannya Rp. 94,821,768 atau dengan persentase realisasi anggaran 94,82 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu :

- a. Pelaku UMKM yang terfasilitasi, yaitu dari Target 15 Orang Pelaku UMKM yang difasilitasi, dan baru tercapai 8 Orang Pelaku UMKM yang di fasilitasi dalam acara Pameran/Event yang dilaksanakan .
- b. Pameran / Event-Event yang diikuti, yaitu Pameran HUT Kabupaten Padang Pariaman yang ke- 190 dilaksanakan di IKK Parit Malintang pada tanggal 07-11 Januari 2023, Pameran Inacraft di Jakarta tanggal 01-05 Maret 2023, dan Pembukaan Galeri UMKM di BIM pada bulan Februari 2023
- c. Terlaksananya kegiatan Pelatihan untuk Kegiatan Promosi/Pameran untuk diikuti, yang di laksanakan di ZHM Premiere (Grand Zuri) Padang sebanyak 1 kali yaitu : tanggal 21 Juni 2023.

Gambar 3.18
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri
di Tingkat Kabupaten/Kota



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan anggaran Rp. 12,040,000 dan realisasi anggarannya Rp. 12,000,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,67 % dengan Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 12,040,000 dan realisasi anggarannya Rp. 12,000,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,67 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu :

- Persentase jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian
- Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT

Gambar 3.19
Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

7. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan anggaran Rp. 29,335,000 dan realisasi anggarannya Rp. 29,223,500 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,62 % dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 29,335,000 dan realisasi

anggaran Rp. 29,223,500 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,62 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu : Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan adalah untuk mendorong koperasi :

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip Koperasi;
- Dalam menjaga dan melindungi aset Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;

Gambar 3.20
Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

8. Program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan anggaran Rp. 406,770,000 dan realisasi anggarannya Rp. 397,864,300 atau dengan persentase realisasi anggaran 97,81 % dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan anggaran Rp. 406,770,000 dan realisasi anggarannya Rp. 397,864,300 atau dengan persentase realisasi anggaran 97,81 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu :

- a. Jumlah koperasi yang dilatih dalam kegiatan pelatihan perkoperasian bagi koperasi sebanyak 64 orang yang terdiri dari pengurus koperasi.
- b. Jumlah UMKM yang dilatih dalam kegiatan pelatihan pendidikan perkoperasian sebanyak 64 orang.

Gambar 3.21
Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

9. Program penilaian kesehatan KSP/ USP koperasi dengan anggaran Rp. 13,850,000 dan realisasi anggarannya Rp. 13,810,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,71 % dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 13,850,000 dan realisasi anggarannya Rp. 13,810,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,71 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah :

- Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kota/kabupaten dengan target kinerja 16 unit dan capaian kinerja 10 unit usaha serta persentase 62,5 %.

Gambar 3.22

Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

10. Program pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 241,913,000 dan realisasi anggarannya Rp. 232,458,727 atau dengan persentase realisasi anggaran 96,09 % dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi dengan anggaran Rp. 241,913,000 dan realisasi anggarannya Rp. 232,458,727 atau dengan persentase realisasi anggaran 96,09 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu :

- a. Jumlah UMKM yang dibantu dalam sertifikasi perizinan dengan target kinerja 100 UMKM dan Capaian Kinerja 100 UMKM serta Persentase sebesar 100%.
- b. Jumlah UMKM yang dilatih kewirausahaanya dengan target kinerja 64 UMKM dan Capaian Kinerja 64 UMKM serta Persentase sebesar 100%.
- c. Jumlah UMKM yang dibantu dalam sarana dan prasarana produksi produk dengan target kinerja 20 UMKM dan Capaian Kinerja 60 UMKM serta Persentase sebesar 300%.

Gambar 3.23
Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan
Produksi dan Pengolahan



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan anggaran Rp. 87,022,000 dan realisasi anggarannya Rp. 71,693,559 atau dengan persentase realisasi anggaran 82,39 % dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dan sub kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan anggaran 38,764,000 dan realisasi anggarannya Rp. 22,663,330 atau dengan persentase realisasi anggaran 58,46 %, Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan anggaran 28,338,000 dan realisasi anggarannya Rp. 28,047,229 atau dengan persentase realisasi anggaran 98,97 %, dan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro dengan anggaran 19,920,000 dan realisasi anggarannya Rp. 19,783,000 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,31 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas yaitu :

- Telah dilakukan Kegiatan pelatihan kewirausahaan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta masing-masing 32 peserta perpelatihan. Pelatihan kewirausahaan pertama dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 05 Juni 2023 dan pelatihan kewirausahaan kedua dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 13 September 2023 dengan tempat pelatihan yang sama yaitu Hotel Rocky Padang.

Gambar 3.24
Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

h) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Diharapkan

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa hambatan yang terjadi antara lain :

1. Banyaknya jumlah Pasar Rakyat yang harus di Rehab di Wilayah Kab. Pariaman, sementara Dinas kita kekurangan anggaran untuk itu.
2. Kurangnya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan biaya operasional untuk melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok tersebut.
3. Masalah Biaya / Anggaran :
 - Untuk melaksakan Pengawasan / Pemeriksaan Legalitas Dokumen Perizinan di butuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara anggaran yang tersedia di Dinas Dagnakerkop dan UKM Kab. Padang Pariaman terbatas .
 - Untuk melaksakan /mengikuti Kegiatan Promosi/Pameran, Bazar-Bazar di butuhkan anggaran yang tidak sedikit, sementara anggaran yang tersedia di Dinas Dagnakerkop dan UKM Kab. Padang Pariaman terbatas atau tidak memadai untuk mengikuti semua event-event Promosi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat maupun oleh Swasta / Organisasi-Organisasi. Hanya beberapa Pameran/Event yang bisa diikuti dengan Dana yang tersedia di Dinas Perdagangan, tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kab. Padang Pariaman.
 - Membatasi jumlah pelatihan dan jumlah peserta koperasi dan umkm yang mengikuti pelatihannya, kegiatan ini hanya baru berkisar pada pelaksanaan pelatihan saja sehingga untuk kegiatan pembinaan setelah pelatihan dibebankan ke kegiatan lain dan Pelatihan pendidikan perkoperasian ini dilaksanakan dengan menggunakan dana DAK non fisik yang anggarannya berasal dari kementerian koperasi dan umkm tanpa adanya dukungan dana DAU dari pemerintah daerah.
4. Kurangnya personil di bidang Perdagangan untuk personil kelapangan
5. Kurangnya Kesadaran Distributor atau Pemilik Kios masih agak kurang dalam melengkapi legalitas perizinannya
6. Pada awal tahun 2023, harga Komoditi Ekspor (Pinang) semakin merosot, sehingga banyak stok menumpuk di gudang Pengepul, dan hal tersebut memicu kerugian yang tidak sedikit bagi Pengepul.
7. Jumlah anggaran kegiatan yang terbatas tidak seimbang dengan jumlah koperasi aktif yang ada di kabupaten padang pariaman sehingga tidak dapat melaksanakan penilaian kesehatan koperasi KSP/USP diseluruh koperasi yang aktif
8. Jumlah UMKM yang dilatih dalam kegiatan pelatihan pendidikan perkoperasian sebanyak 64 orang
9. Jumlah koperasi yang aktif yang semakin berkurang dikarenakan tidak lagi melaksanakan RAT setiap tahunnya paling kurang 3 tahun berturut-turut

10. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) semakin berkurang dikarenakan ketidakmampuan pengurus dalam menyelenggarakan RAT setiap tahunnya yang disebabkan permasalahan internal pengurus, atau kredit macet yang tidak mampu diselsaikan oleh koperasi
11. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang sangat luas membuat pendataan belum dilakukan secara optimal.
12. Jaringan internet yang susah dilapangan serta Website terkait pendataan sering error sehingga perlu disempurnakan lagi.

i) Penghargaan

Dari kegiatan tersebut selain berdampak terhadap peningkatan kinerja juga melahirkan beberapa prestasi dengan diperolehnya beberapa penghargaan, antara lain:

Gambar 3.25
Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2023



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.26
Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi Madya Tahun 2023



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir

yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

IKU	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	13,3	10,48	78,80	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2023 mendapatkan realisasi sebesar 10,48% dari target sebesar 13,3% dengan capaian 78,80%. Capaian tersebut masuk ke dalam kategori berhasil. Pencapaian realisasi PDRB tahun 2023 sebesar 10,48% ini diakibatkan oleh meningkatnya jumlah IKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang baru memulai produksinya sebanyak 3,67%. Meskipun terjadi peningkatan jumlah IKM pada tahun 2023 ini, tetapi realisasi yang telah dicapai masih belum bisa untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya IKM yang ada baru memulai produksi, dari produknya masih terkendala dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Jumlah IKM yang baru memulai produksinya ini pada umumnya bergerak di bidang industri pengolahan makanan ringan yang tergolong usaha mikro rumahan, dimana modal usahanya masih minim.

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah rasio antara nilai PDRB sektor industri pengolahan dengan nilai PDRB kabupaten yang dinyatakan dalam persentase. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

Berikut akan disajikan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB” tahun 2022 dengan tahun 2023.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

IKU	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	12,6%	10,92	13,3	10,48	78,80	Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Nilai PDRB pada tahun 2022 adalah sebesar 10,92% dengan target 12,6% dan untuk nilai PDRB tahun 2023 adalah sebesar 10,48% dengan target 13,3%. Rendahnya realisasi PDRB pada tahun 2022 dan tahun 2023 disebabkan oleh minimnya kegiatan pendataan, sosialisasi dan pelatihan yang diberikan kepada IKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Rendahnya realisasi sektor industri terhadap PDRB pada tahun 2022 dan 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya adalah :

1. Produk yang dihasilkan oleh IKM tidak belum memiliki pangsa pasar yang bagus.
2. Kemampuan/kapasitas IKM dalam proses meningkatkan produksi masih rendah.
3. Produksi yang tidak konsisten yang tergantung pesanan
4. Kondisi ekonomi saat ini mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi berkurang.

Jumlah IKM yang bertambah setiap tahunnya tidak mampu mencapai target kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang telah ditetapkan di dalam RPJMD 2021-2025.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

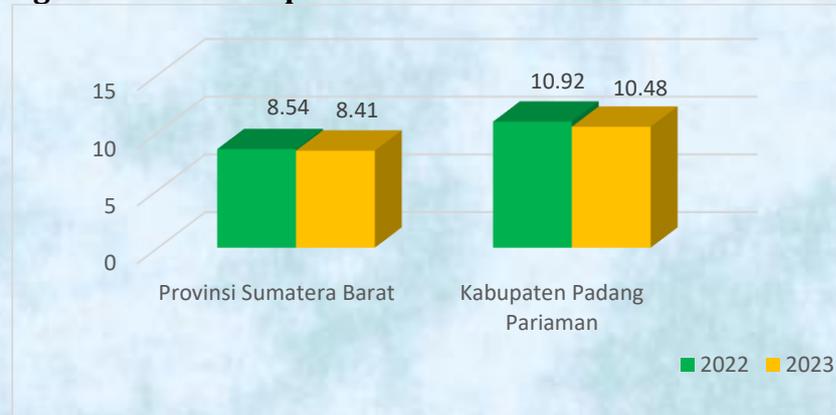
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	11,8	12,6	13,3	11,8	10,92	10,48

Realisasi Indikator Kinerja “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB” pada tahun 2021 sebesar 11,8% dengan target RPJMD sebesar 11,8%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 10,92% dengan target RPJMD sebesar 12,6%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 10,48 dari target RPJMD sebesar 13,3%.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Terkait Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2023

Berikut grafik perbandingan realisasi nasional, provinsi, dan kabupaten terkait PDRB pada tahun 20223 :

Grafik 3.5
Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2022 dan Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Jika dibandingkan persentase pencapaian Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman terkait Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (nilai distribusi barang dan jasa) tahun 2022 dan tahun 2023 yakni sama-sama mengalami penurunan. Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 0,13% sedangkan Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sebesar 0,44%.

e) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Capaian IKU

Dari hasil capaian dan interpretasi kinerja seperti uraian diatas dapat kita jelaskan beberapa hambatan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman antara lain dalam upaya pencapaian IKU antara lain :

1. Kenaikan harga bahan baku mempengaruhi jumlah produksi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang cenderung menurun pada Tahun 2023.
2. Keterbatasan Modal yang dimiliki Pelaku Usaha Industri Kecil dan menengah mempengaruhi Jumlah Produk yang dihasilkan.
3. Keterbatasan Sarana produksi berupa peralatan mesin dan pada umumnya masih mengolah produk dengan cara tradisional mengakibatkan terbatasnya hasil produk yang dibuat oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah.
4. Keterbatasan IKM dalam memasarkan produknya.
5. Belum ditetapkannya Perda RPIK.
6. Keterbatasan IKM dalam memasarkan produknya dimana IKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman masih kurang memiliki teknologi pemasaran dan belum melek teknologi.

Sedangkan faktor Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan adalah :

1. Kesadaran IKM terhadap pentingnya sertifikasi produk sudah meningkat
2. Keinginan IKM untuk menempati sentra IKM

f) Upaya-Upaya Pendukung Capaian IKU

Adapun upaya-upaya pendukung untuk mencapai keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada sektor industri yang potensial lainnya seperti industri *furniture*, industri farmasi dan obat-obatan untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu berkembang dan menyerap banyak jumlah tenaga kerja.
2. Mengembangkan munculnya sentra-sentra baru yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Memberikan panduan standarisasi produk bagi IKM dalam menjalankan usahanya sehingga mempermudah IKM dalam memperoleh sertifikat halal, sertifikat SNI dan sertifikat yang memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh BPPOM.
4. Memfasilitasi kemudahan perizinan usaha bidang industri (NIB).

g) Program-Program Pendukung Capaian IKU

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.52.220.000,- .

Adapun kegiatan yang terdapat dalam program ini, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Faktor Penghambat Capaian dari Pelaksanaan Program diatas adalah sebagai berikut:

1. Belum ditetapkannya Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Padang Pariaman.
2. Belum semua IKM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan sosialisasi dan pelatihan.
3. Operasional Sentra IKM Cokelat yang belum maksimal.

Gambar 3.27
Pelatihan Bagi IKM



Sumber DPMP TP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.28
Pembinaan IKM



Sumber: DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.29
Kunjungan Lapangan Kepada IKM



Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.30
Pendampingan IKM dalam Pembuatan Izin Usaha NIB



Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2023

**SASARAN STRATEGIS 7****Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin**

Sasaran strategis “Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin” merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi ketiga yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasiskan Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Tingkat Kemiskinan. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi kinerja IKU “Tingkat kemiskinan” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Tingkat kemiskinan	%	5,80	6,34	90,69%	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah Penduduk Miskin / Jumlah Penduduk Seluruhnya

Dari tabel diatas dapat dijelaskan target dan realisasi tahun 2023 bahwa Sasaran IKU Tingkat Kemiskinan dinilai berhasil dengan realisasi 6,34 % dari target 5,80% dengan persentase capaian sebesar 90,69%. Ditetapkannya target sebesar 5,80% karena realisasi IKU tahun 2022 adalah sebesar 6,25% dari target sebesar 6,99% dengan persentase capaian kinerja sebesar 110,59% (melebihi target).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU “Tingkat Kemiskinan” tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Tingkat Kemiskinan	%	6,99	6,25	110,59	5,80	6,34	90,69	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada tabel di atas dapat digambarkan bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tingkat Kemiskinan tahun 2022 yaitu sebesar 19,9%. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan bertambahnya angka kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2022.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023
dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Interpretasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tingkat Kemiskinan	%	7,26	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48	7,22	6,25	6,34	0	0	0	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Realisasi Indikator Kinerja “Tingkat Kemiskinan” pada tahun 2021 sebesar 7,22% dengan target RPJMD sebesar 7,11%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 6,25% dengan target RPJMD sebesar 6,99%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 6,34 dari target RPJMD sebesar 6,87%.

d) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023



Sumber : DinsosP3A Kabupaten Padang Pariaman,2023

Perbandingan realisasi tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman pada tahun 2023 dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dari tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman dengan selisih 0,39%.

Sementara tingkat kemiskinan Kab. Padang Pariaman pada tahun 2023 berada di bawah angka kemiskinan nasional dengan selisih 3,02%. Tingkat kemiskinan nasional yang naik dari data bulan Maret 2023 (9,36%) akibat inflasi kenaikan bahan pangan pokok seperti goreng dan cabai pada pertengahan tahun 2023.

Keberhasilan Padang Pariaman dalam menekan angka kemiskinan di tahun 2023 hingga menjadi di bawah target yang ditetapkan sebelumnya tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak dalam pemerintahan Kab. Padang Pariaman (Sekretariat Daerah, Bapelitbangda, BPKD, DistanKP, DPMD, Disdagnakerkop & UKM, DPMPTP, Dinkes, Disnakkeswan, Diskan) dan stakeholders yang berasal dari luar pemerintahan. Dengan kolaborasi tersebut membantu jalannya kegiatan-kegiatan yang memberikan efek baik secara langsung ataupun tidak langsung pada berkurangnya angka kemiskinan di Kab. Padang Pariaman, antara lain tersalurkannya bantuan sembako dan PKH secara maksimal, adanya BLT El-Nino dan peningkatan pelayanan dalam penanganan masalah-masalah PPKS.

Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat beberapa inovasi daerah :

1. **DUYAN BASO** (PengaDUan dan PelaYANan BAntuan SOsial).
Program inovasi ini berupaya untuk mengakomodir semua pengaduan dan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan sosial.
2. **PALAK KERAMAT** (Pengawasan Verifikasi Data Kelayakan Keluarga Penerima Manfaat).
Melalui Inovasi ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi wadah untuk membantu Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dalam memverifikasi kelayakan keluarga penerima manfaat, dengan data real di lapangan. Inovasi ini berfungsi untuk melihat secara jelas rumah keluarga penerima manfaat yang diusulkan melalui upload foto yang ada titik geo-tagging nya langsung. Tujuan dari memakai geo-tagging ini adalah untuk mengetahui dengan jelas apakah rumah masyarakat calon/penerima manfaat tersebut memang layak atau tidak layak.
3. **PERBANKAN** (Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak).
Inovasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat respon kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. **DUL PKK** (Dapur Umum Lapangan PKK).
Inovasi ini merupakan inovasi pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial dengan berbagai stakeholder terutama PKK baik itu tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari. Saat terjadi bencana dengan skala yang luas, posko yang ada di Nagari atau Kecamatan bisa membantu para korban Bencana dengan berkolaborasi dengan PKK, sedangkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Padang Pariaman akan memfasilitasi

posko dengan supply bahan makanan agar bisa dimasak dan dikonsumsi oleh korban yang terdampak bencana.

5. **GAPARI** (Gerakan Perempuan Ekonomi Mandiri).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi yang menjadikan perempuan sebagai kepala keluarga mampu mengembangkan usahanya yang telah ada atau menciptakan peluang - peluang usaha yang baru. Dalam wadah bernama PEKKA inovasi GAPARI akan menjadi kemitraan antara masyarakat dan pemerintah khususnya PEKKA dan Dinsos P3A.

6. **Please Care Papa** (Pusat Layanan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang Cepat, Akurat, Responsif dan Efektif di Kabupaten Padang Pariaman).

Inovasi ini merupakan sebuah inovasi pelayanan publik untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan sosial seperti pelayanan terkait kemiskinan, pelayanan untuk kelompok rentan, pelayanan untuk korban bencana, dan sebagainya yang merupakan upaya Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadikan pelayanan publik lebih efektif dan efisien.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mewujudkan agar indikator ini tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya. Adapun program yang dilakukan untuk mendukung sasaran ini adalah :

1. Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan berupa :

- Penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat miskin dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebanyak 150 orang di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang langsung diserahkan oleh Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) yaitu Ibu Yusrita Suhatri Bur dan didampingi Dinas Sosial P3A.
- Penyaluran bantuan sembako berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer rekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako melalui PT POS Indonesia yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,00 per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10. 474 KPM dengan nilai sebesar Rp. 25.137.600.000,00.

Gambar 3.31
Penyerahan Bantuan Sembako oleh Ketua LKKS



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- b. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatannya berupa Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ELNINO bagi 23.774 KPM dengan nilai Rp. 9.509.600.000,00 sesuai dengan DTKS. Nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp. 200.000,00 per bulan selama 2 bulan terhitung mulai bulan November sampai dengan Desember 2023.

Gambar 3.32
Penyaluran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ELNINO



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 236.454.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 233.909.461,00. Kegiatan pada program ini diantaranya adalah :

- a. Kegiatan Penyediaan Permakanan

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sembako dengan rincian sebagai berikut :

- Pemberian bantuan sembako kepada 50 orang disabilitas terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 99 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI;
- Pemberian bantuan sembako kepada 50 Orang lansia terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan 206 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.

- Pemberian bantuan sembako kepada 50 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan dan 95 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI
 - Pemberian bantuan Sembako kepada 1 orang gelandangan dari APBN Kemensos RI
- b. Kegiatan Penyediaan Sandang
- Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sandang dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian bantuan sandang kepada 99 orang disabilitas terlantar dari APBN Kemensos RI
 - Pemberian bantuan sandang kepada 160 orang lansia terlantar dari APBN Kemensos RI.
 - Pemberian bantuan sandang kepada 47 orang anak terlantar dari anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya dan dan 95 orang anak terlantar dari APBN Kemensos RI.
- c. Kegiatan Pemberian Alat Bantu
- Kegiatan ini berupa pemberian bantuan alat bantu. Kegiatan tersebut menggunakan APBN Kemensos RI, dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian alat bantu kepada 93 orang lansia terlantar
 - Pemberian alat bantu kepada 1 orang disabilitas terlantar
- d. Kegiatan pemberian bimbingan sosial keluarga penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar serta gelandangan
- Kegiatan ini berupa pembinaan dan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga. Kegiatan tersebut menggunakan anggaran DAU yang ditentukan penggunaannya, dengan rincian sebagai berikut :
- Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas sebanyak 33 orang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lansia terlantar sebanyak 33 orang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 34 orang
 - Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan sebanyak 1 orang

Gambar 3.33**Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia dan Disabilitas**

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. Program Perlindungan Jaminan Sosial

Telah dilakukan fasilitasi penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2023 sejumlah 17.833 KPM dengan nilai sebesar Rp. 59.862.014.634,00 yang bersumber dari APBN Kemensos RI

4. Program Penanganan Bencana

Program ini bertujuan untuk meringankan kebutuhan dasar korban bencana dengan anggaran DAU yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp. 807.335.052,00 dengan realisasi Rp. 752.930.600,00.

a. Penyediaan Permakanan dan Sandang

Telah disalurkan bantuan makanan dan sandang sebanyak 13.877 jiwa yang mengalami kejadian bencana alam dan bencana sosial.

b. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan sembako kepada kelompok rentan sebanyak 16 orang.

c. TAGANA Masuk Sekolah

Pada tahun 2023 DinsosP3A telah melaksanakan TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Masuk Sekolah sebanyak 8 Sekolah Dasar Negeri.

d. Program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara)

Terlaksananya koordinasi dengan Dinsos Batu Sangkar terkait Program PENA dan Gradurasi Mandiri.

Semua korban pasca bencana alam maupun sosial telah dibantu secara keseluruhan dengan berbagai program dan kegiatan yang telah diuraikan diatas. Keberhasilan pencapaian target kinerja 100 % tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Gambar 3.34

Penyerahan Bantuan Bahan Makanan Dan Logistik oleh Bupati Padang Pariaman Bantuan Musibah Banjir Kp. Galapuang 2023 dan Bantuan Korban Kebakaran Nagari Cimpago V Koto Kp. Dalam 2023 oleh KADIS DINSOSP3A



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.35
Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana Longsor di Kecamatan V Koto Kampung Dalam



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Disamping itu kesiapan Tim TAGANA juga tidak bisa dikesampingkan pada tahun 2023 TAGANA bersama DINSOSP3A melakukan kegiatan Tagana Masuk Sekolah (TMS) dengan 8 SDN di 2 Kecamatan.

Gambar 3.36
DinsosP3A dan TAGANA Kab. Padang Pariaman melakukan TAGANA Masuk Sekolah di Batang Gasan Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2023

(e) Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya

Pada tahun 2023 anggaran program dan kegiatan yang berkaitan dengan Kemiskinan memperoleh PAGU sebesar Rp. 1.752.915.312,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.689.429.544,00 dengan persentase sebesar 96,37% . Adapun efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 63.485.768,00 atau 3,63%.

**SASARAN STRATEGIS 8****Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

Salah satu indikator tingkat perekonomian di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena, itu besar kecil nya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah PDRB/Income Per Kapita. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
PDRB/Income Per Kapita	Juta	50,50	55,54	109,98	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai target PDRB/Income Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 55,54 Juta dari target yang ditetapkan sebesar 50,50 Juta dengan persentase capaian sebesar 109,98 (Sangat Berhasil). Realisasi tersebut merupakan yang tertinggi selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi PDRB pada tahun 2022 dengan Tahun 2023 :

Tabel 3.44
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022				Tahun 2023			Kategori
	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
PDRB/Income Per Kapita	Juta	46,98	50,02	106,47	50,50	55,54	109,98	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Realisasi indikator kinerja PDRB/Income Per Kapita tahun 2023 adalah 55,54 Juta dari 50,50 Juta target yang ditetapkan (109,98%). Sedangkan realisasi pada tahun 2022 sebesar 50,02 Juta dari 46,98 Juta target yang ditetapkan (106,47%). Artinya, jika

dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi indikator kinerja PDRB/*Income* Per Kapita tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,52 Juta dengan peningkatan persentase capaian kinerja sebesar 3,51%.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.45

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
PDRB/ <i>Income</i> Per Kapita	Rp. Juta	44,63	46,98	49,46	42,31	50,02	55,54

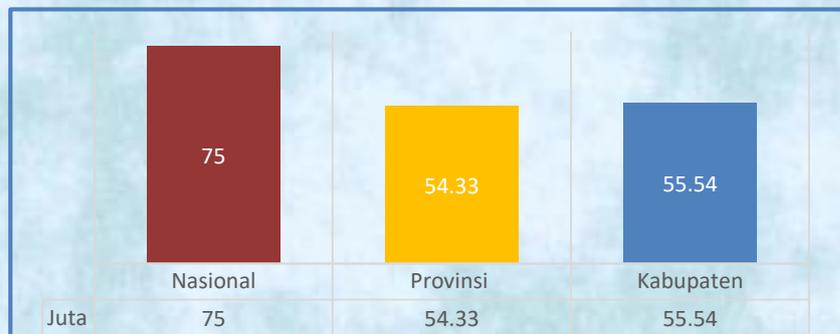
Realisasi Indikator Kinerja “PDRB/*Income* Per Kapita” pada tahun 2021 sebesar Rp. 42,31 Juta dengan target RPJMD sebesar Rp. 44,63 Juta. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar Rp. 50,50 Juta dengan target RPJMD sebesar Rp. 46,98 Juta. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar Rp. 55,54 Juta dari target RPJMD sebesar Rp. 49,46 Juta.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/*Income* Per Kapita

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional terkait PDRB PDRB/*Income* Per Kapita adalah sebagai berikut :

Grafik 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/*Income* Per Kapita Tahun 2023



Sumber : BPS dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian PDRB/*Income* Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman sebesar pada tahun 2023 adalah Rp. 55,54 juta dan termasuk kategori “Berhasil”, dimana realisasi PDRB/*Income* Per Kapita nasional tahun 2023 adalah 75 juta dan realisasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar 54,33 juta. Artinya, PDRB/*Income* Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Nasional dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi Sumatera Barat.

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Capaian IKU

Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh faktor meningkatnya produksi di sebagian lapangan usaha, diantaranya :

1. Peningkatan sektor pertanian dan perkebunan.
2. Peningkatan sektor perikanan dan perdagangan.
3. Peningkatan sektor kesehatan.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di capai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan kegiatan sosial sebesar 8,72 Persen dan paling rendah adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -10,54 persen. Membaiknya ekonomi masyarakat pulih sehingga meningkatnya kebutuhan dan pendapatan masyarakat, untuk komoditi hortikultura seperti cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih dan minyak goreng pada pertengahan tahun harganya naik sehingga daya beli masyarakat berkurang harga sudah turun dan stabil dan daya beli masyarakat kembali meningkat.

Disamping faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Tingkat perubahan harga yang naik dan tidak stabil;
2. Karena badai El-Nino dan Erupsi Gunung Merapi yang berdampak pada pelaku usaha ekonomi;
3. Faktor iklim dan cuaca menyebabkan para petani mengalami gagal panen dan kematian mendadak pada hewan ternak ;
4. Dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana dan sumber daya alam yang tersedia, kita masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya sembako yang beredar dipasar, walaupun daya beli masyarakat menurun karna adanya kenaikan harga yang sangat tinggi.

Adapun upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai PDRB/Income Per Kapita adalah sebagai berikut :

1. Menstabilkan harga kebutuhan pokok supaya daya beli masyarakat meningkat dengan cara menurunkan tingkat inflasi dengan menanam tanaman cabe, bawang dan sayur sayuran di pekarangan rumah.
2. Melakukan penanaman disaat iklim yang mendukung jika tidak bisa untuk mengganti dengan penanaman yang tahan terhadap iklim yang kurang baik (misalnya penanaman ubi kayu atau daun singkong) atau peningkatan produksi pada saat iklim baik dan bisa untuk melakukan penyimpanan cadangan pada saat iklim yang kurang baik.
3. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi pengangguran.
4. Berhemat dalam konsumsi barang-barang yang kurang begitu penting, atau meningkatkan produktivitas untuk penambahan *income* (usaha tambahan dan pekerjaan *part time*)
5. Mengkonsumsi kebutuhan yang lebih pokok dan utama (primer) dibandingkan dengan kebutuhan tersier.
6. Memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Pada tahun 2023 di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM pada bulan April mengadakan Bazar dan Operasi Pasar Murah Ramadhan 1444 H di Pasar Batu Basa Kec. IV Koto Aur Malintang, Pasar Barabeh Kec. Sei Limau, Pasar Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam, Pasar Tandikek Kec. Patamuhan, Pasar Balai Baru Kec. Sintoga dan di Kantor

PKK Nagari Padang Bintungan. Dan pada bulan September 2023 mengadakan operasi sidak pasar di Pasar Pakandangan, Pasar Lubuk Alung dan Pasar Kayu Tanam. Pada bulan November 2023 melakukan peninjauan kerjasama draft MoU dengan Perum Bulog Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang daya beli masyarakat:

1. Kegiatan Pengendalian Distribusi Dan Perekonomian
 - Melakukan kegiatan rapat rutin setiap minggu secara virtual terkait pengendalian inflasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Bappenas, BULOG, TNI/POLRI, BPS Pusat bersama dengan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Padang Pariaman.
 - Pada tahun 2023 di Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM bersama dengan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada bulan April mengadakan Bazar dan Operasi Pasar Murah Ramadhan 1444 H di Pasar Batu Basa Kec. IV Koto Aur Malintang, Pasar Barabeh Kec. Sei Limau, Pasar Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam, Pasar Tandikek Kec. Patamuan, Pasar Balai Baru Kec. Sintoga dan di Kantor PKK Nagari Padang Bintungan. Dan pada bulan September 2023 mengadakan operasi sidak pasar di Pasar Pakandangan, Pasar Lubuk Alung dan Pasar Kayu Tanam. Pada bulan November 2023 melakukan peninjauan kerjasama draft MoU dengan Perum Bulog Provinsi Sumatera Barat.
2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Terkait Sektor Perikanan, Pertanian dan Peternakan
 - Melakukan pengawasan dan survey dalam mendistribusikan bantuan benih ikan kepada 1 (satu) kelompok tani di Nagari Ulakan, Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sungai Asam.
 - Melaksanakan Rapat Koordinasi bersama OPD terkait mengenai Pengawasan Pendistribusian Pupuk Subsidi dan Pestisida.
 - Melakukan pengawasan dan survey dalam mendistribusikan Pupuk Bersubsidi ke Kios-kios Pupuk yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
 - Melakukan pemantauan harga daging dan telur ke pasar nagari dan pasar ternak di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup dan Energi Air.
 - Melakukan koordinasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat terkait penggunaan lahan hutan Padang Pariaman untuk proyek jalan tol.
 - Melakukan koordinasi ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat mengenai data tambang yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
 - Melakukan koordinasi ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat mengenai izin penggunaan air tanah di Kabupaten Padang Pariaman.
 - Melakukan koordinasi ke DLHPKPP Kabupaten Padang Pariaman tentang Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).
4. Kegiatan Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM bersama dengan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Padang Pariaman terkait operasi survey harga kebutuhan sembilan bahan pokok ke pasar-pasar nagari di 17 kecamatan.

5. Koordinasi dengan Disdagnakerkop dan UKM dalam melakukan kerjasama dengan BULOG, ITC, Baznas serta Bank Nagari untuk dilaksanakan Bazar/Pasar Murah untuk membantu daya beli masyarakat.

Gambar 3.37

Koordinasi dengan Dinas terkait Guna Melakukan Kerjasama



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.38

Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

6. Melaksanakan rapat koordinasi pasar yang akan di survey dan penentuan *database* untuk pemantauan harga bahan kebutuhan pokok Padang Pariaman (Si BAPOK PAPA)
7. Melakukan Bazar/Pasar Murah di Parit Malintang, Pasar Kampung Gelampung Kec. Ulakan Tapakis, Pasar Lubuk Alung, Pasar Kayu Tanam dan Pasar Kampung Dalam (Bazar kerjasama antara BULOG, Bank Nagari, Bank BRI, Bank BNI, Baznas dan Disdagnakerkop dan UKM)

Gambar 3.39

Kegiatan Bazar di Sejumlah Pasar



Sumber : Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023



SASARAN STRATEGIS 9

Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih menfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator sasaran dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Sasaran Strategis Terwujudnya Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan berbasis inklusi sosial untuk memperkuat Budaya Literasi tahun 2020 – 2024. Untuk mendukung indikator sasaran strategis Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai Indikator Kinerja pada sasaran RPJMD Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Misi ke 4.

Agar terwujudnya kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan tujuan pada Renstra 2021 s.d 2026 yakni Peningkatan Gerakan Literasi dan Budaya Membaca dengan sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca Masyarakat. Dengan terukurnya tingkat pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dapat dijadikan dasar sebagai pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat khususnya masyarakat Padang Pariaman.

Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mulai dari tahun 2021 dan tahun 2022 yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur yakni :

1. UPLM 1 Pemerataan layanan perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan lembaga perpustakaan dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
2. UPLM 2 Ketercukupan koleksi perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan koleksi perpustakaan (satuan judul) dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
3. UPLM 3 Ketercukupan tenaga perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.

4. UPLM 4 Tingkat kunjungan masyarakat per hari yaitu perbandingan antara tingkat kunjungan masyarakat (pemustaka dan pengunjung), baik secara luring maupun daring, dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaan.
5. UPLM 5 Jumlah anggota perpustakaan yaitu perbandingan antara jumlah anggota perpustakaan dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaan.
6. UPLM 6 Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi yaitu perbandingan antara jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi dengan aspek masyarakat berupa jumlah populasi penduduk di suatu wilayah.
7. UPLM 7 Perpustakaan yang dibina sesuai standar yaitu perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar, baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, dengan aspek masyarakat berupa jumlah total perpustakaan per jenis yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Padang Pariaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh program dan kegiatan pada tahun 2023 berupa Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan bahan pustaka
 - ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
2. Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
 - ✓ Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - ✓ Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
 - ✓ Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.46
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	18,88	67,74	358,79	Sangat Berhasil

Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Formulasi pengukuran indikator “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat” adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat}}{\text{Aspek Literasi Masyarakat}} \times 100\%$$

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 berhasil melampaui target RPJMD 2021-2026 yaitu 18,88 dimana realisasinya sebesar 67,74, persentase capaian kinerja sebesar 358,84% dengan interpretasi “Sangat Berhasil”.

- b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023**
Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2023:

Tabel 3.47
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	1,97	18,88	67,74	358,79	Sangat Berhasil

Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Terjadi peningkatan yang signifikan realisasi kinerja IPLM tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat hanya sebesar 1,97 dan Tidak Berhasil mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 18,85. Berbeda dengan tahun 2023 realisasi kinerja IPLM naik secara signifikan di angka 67,74 dengan kategori sedang. Kenaikan nilai IPLM ini disebabkan karena adanya perubahan metode pengukuran dari Perpustakaan Nasional dimana sebelumnya untuk masing-masing UPLM itu pembagiannya jumlah penduduk diwilayahnya. Pada tahun 2023 metode tersebut berubah dengan pembagiannya berdasarkan persentase untuk setiap kategorinya, sehingga nilai IPLM masing-masing Kabupaten/ Kota mengalami kenaikan dan terukur secara sistematis sesuai dengan kondisi minat baca masyarakat di daerah tersebut. Selain itu kenaikan nilai IPLM di tahun 2023 juga disebabkan adanya kenaikan anggaran, dimana anggaran untuk urusan perpustakaan sebesar Rp234.390.800 di tahun 2023 naik menjadi 2.456.998.098. Kenaikan tersebut disebabkan adanya PMK 212 mengenai penggunaan DAU ditentukan atau Spesific Grant. Urusan Perpustakaan termasuk kedalam kategori penerima DAU ditentukan sehingga semua program kegiatan dan sub kegiatan dapat terlaksana secara maksimal dan indikator output dari Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

c) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.48
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	RPJMD			Capaian 2023			Interpretasi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88	67,74	358,79	18,88	67,74	358,79	Sangat Berhasil

Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

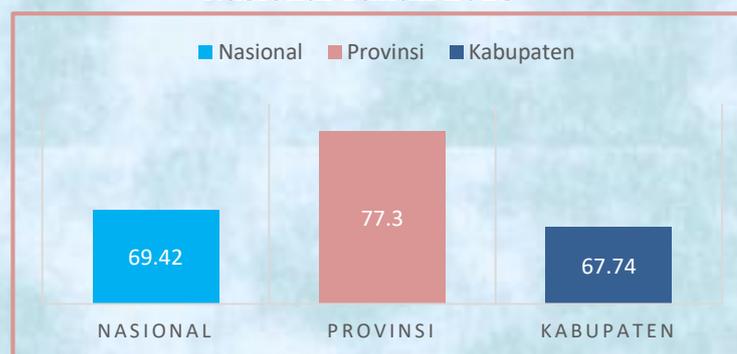
Dari tabel di atas dengan Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berhasil mencapai target yang ditetapkan sesuai pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2023 realisasinya sebesar 67,74 dengan target 18,88 persentase capaian 358,79% dengan interpretasi Sangat Berhasil.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2023 dengan nilai 67,74 ini termasuk kedalam kategori Sedang. Artinya sudah terjadi peningkatan pemerataan layanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan, ketersediaan perpustakaan dan kelengkapan koleksi perpustakaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pengukuran ini merupakan metode pengukuran yang dilaksanakan secara bersama-sama mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

d) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2023

Berikut ini adalah grafik perbandingan realisasi IKU Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi tahun 2023 :

Grafik 3.8
Capaian Kinerja IPLM Kabupaten dibandingkan Capaian Provinsi dan Capaian Nasional Tahun 2023



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Realisasi IPLM tingkat Nasional adalah 69,42%, Provinsi Sumbar 77,30% dan Kabupaten Padang Pariaman 67,74%. Dari tabel tersebut dapat tergambar IPLM

Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah capaian IPLM Provinsi Sumbar dan Nasional untuk tahun 2023.

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Terdapat 7 aspek dalam pengukuran IPLM tersebut yakni ; aspek Pemerataan layanan perpustakaan, aspek ketercukupan koleksi perpustakaan, Aspek Ketercukupan tenaga perpustakaan, aspek tingkat kunjungan masyarakat per hari, aspek perpustakaan yang ber SNP, aspek keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan aspek anggota perpustakaan.

Berikut rincian capaian kinerja ke 7 aspek IPLM di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 :

1. Aspek Pemerataan Layanan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, sebaran perpustakaan, serta potensi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia baik perpustakaan umum, perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus, diantaranya : Gedung, Infrastruktur IT, Anggaran dan Regulasi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio sebaran perpustakaan di wilayahnya. Pada tahun 2023 nilai pemerataan layanan perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,004102. Dengan penghitungan 50% jumlah Perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk, 20% jumlah Perpustakaan Sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah, 20% jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademik dan 10% jumlah Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk berkerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk. Dimana angka tersebut didapat dari jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 608 perpustakaan per jumlah penduduk 438.022. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 perpustakaan dapat melayani 735 pendudukan di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Aspek Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui ketercukupan koleksi perpustakaan seluruh jenis perpustakaan, diantaranya ; jumlah koleksi (judul dan eksemplar), judul koleksi digital, berkala yang berlangganan, sirkulasi per bulan dalam 1 tahun dan anggaran pengadaan koleksi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk per kapita dan rasio penduduk. Koleksi bahan perpustakaan berbasis wilayah. Capaian ketercukupan koleksi perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 2,369665 dengan penghitungan 50% jumlah koleksi Perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk, 20% jumlah koleksi Perpustakaan Sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah, 20% jumlah koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi jumlah civitas akademik dan 10% jumlah koleksi Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk berkerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk.. Angka tersebut didapatkan dari jumlah koleksi 226.410 judul per jumlah penduduk

438.022 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 judul buku dapat diakses oleh 2 orang penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

3. Aspek Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan semua jenis perpustakaan, diantaranya ; Jumlah SDM, Kualifikasi SDM, Jumlah Pustakawan, Jumlah Pustakawan yang bersertifikasi, jumlah tenaga yang bersifat diklat, jumlah sdm yang bersertifikasi pustakawan. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga. Capain kinerja ini berada pada angka 0,001209 dengan penghitungan 50% jumlah tenaga Perpustakaan umum dengan jumlah populasi penduduk, 20% jumlah tenaga Perpustakaan Sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah, 20% jumlah tenaga Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi jumlah civitas akademik dan 10% jumlah tenaga Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk berkerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk. Dengan rincian penghitungan 133 tenaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman per jumlah penduduk 438.022 jiwa. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 tenaga perpustakaan dapat melayani 3362 penduduk Kabupaten Padang Pariaman.

4. Aspek Kunjungan Masyarakat Per hari

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui pengunjung perpustakaan semua jenis perpustakaan, diantaranya ; jumlah kunjungan pemustaka per bulan/ tahun. Sehingga tergambar rasio penduduk, pemanfaatan perpustakaan berbasis wilayah, rasio penduduk, pemanfaatan perpustakaan basis lembaga. Dengan rincian terdapat 5.166.643 kunjungan pengunjung perpustakaan ke perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023, untuk capaian kinerja tersebut adalah sebesar 0,143100 dengan penghitungan 50% jumlah kunjungan masyarakat per hari untuk Perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk, 20% jumlah kunjungan masyarakat per hari untuk Perpustakaan Sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah, 20% jumlah kunjungan masyarakat per hari untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademik dan 10% jumlah kunjungan masyarakat per hari untuk Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk berkerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 dari 25 penduduk mengunjungi perpustakaan setiap hari di Kabupaten Padang Pariaman.

5. Aspek Perpustakaan yang dibina sesuai standar

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui perpustakaan ber Standar Nasional Perpustakaan. Terdapat 89 Perpustakaan yang Ber-SNP di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan nilai capaian 0,819504 dari hasil penghitungan 50% jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk Perpustakaan umum dibagi dengan jumlah populasi penduduk, 20% jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk Perpustakaan Sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah, 20% jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk Perpustakaan

Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademik dan 10% jumlah Perpustakaan yang dibina sesuai standar untuk Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk bekerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk Padang Pariaman. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 dari 7 perpustakaan sudah dibina sesuai dengan standar.

6. Aspek Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan. Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2023 sebanyak 5.911 orang per jumlah penduduk 438.022 dengan nilai capaian 0,016912 berdasarkan hasil penghitungan 50% jumlah Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi untuk Perpustakaan umum dibagi dengan jumlah kepadatan penduduk, 20% jumlah Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi untuk Perpustakaan Sekolah dibagi dengan civitas sekolah, 20% jumlah Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi dengan civitas akademik dan 10% jumlah Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi untuk Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk bekerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk Padang Pariaman. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 dari 107 penduduk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan.

7. Aspek Jumlah anggota perpustakaan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui Jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 88.767 Pemustaka per jumlah penduduk 438.022 dengan nilai capaian 1.388142 berdasarkan hasil penghitungan 50% jumlah anggota untuk Perpustakaan umum dibagi dengan jumlah penduduk, 20% jumlah anggota untuk Perpustakaan Sekolah dibagi dengan jumlah civitas sekolah, 20% jumlah anggota untuk Perpustakaan Perguruan Tinggi dibagi dengan jumlah civitas akademik dan 10% jumlah anggota untuk Perpustakaan Khusus dibagi dengan jumlah populasi penduduk berkerja dikali dengan angka korelasi berdasarkan kepadatan penduduk Padang Pariaman. Berdasarkan hasil hitung tersebut dapat disimpulkan 1 dari 5 penduduk merupakan anggota perpustakaan.

Dari ke 7 rincian nilai aspek tersebut didapatkan total nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman sebesar **67,75%** dengan kategori **Sedang**. Nilai tersebut naik secara signifikan dari tahun sebelumnya yakni 1,97% dan berhasil mencapai target RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mulai dari Pejabat eselon II hingga sampai ke level staf atau tenaga pengelola perpustakaan dalam mengumpulkan data perpustakaan dan melakukan kegiatan sosialisasi maupun pembinaan kepada seluruh pengelola perpustakaan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Dukungan anggaran juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman naik secara signifikan di tahun 2023 ini. Dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendapatkan alokasi anggaran untuk Bidang Pendidikan sub bidang Perpustakaan sebesar Rp2.456.998.098, nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran pada tahun 2022.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mampu merealisasikan belanja tersebut sebesar Rp2.318.293.591 atau 94,35%. Seluruh belanja digunakan untuk menunjang pencapaian indikator IPLM Kabupaten seperti pengadaan mobil layanan antar jemput pemustaka, pengadaan sarana dan prasarana penunjang administrasi tenaga perpustakaan dan sarana prasarana untuk menunjang fasilitas layanan bagi pemustaka serta adanya pembangunan gedung perpustakaan Nagari Kudu Gantiang Barat dan dilakukan kegiatan pembinaan serta sosialisasi bagi seluruh tenaga perpustakaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga untuk tahun 2023 nilai IPLM kabupaten Padang Pariaman berhasil naik menjadi **67,75%** dengan kategori **sedang**.

Keberhasilan capaian IPLM ini juga didukung oleh peran serta Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan penguatan Perpustakaan Sekolah, Perguruan tinggi dan Perpustakaan Nagari atau Desa. Dalam mencapai target kinerja IPLM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sosialisasi Aplikasi Inlislite untuk mewujudkan perpustakaan elektronik;
2. Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar;
3. Pengadaan koleksi bahan pustaka;
4. Layanan perpustakaan keliling;
5. Layanan antar jemput pemustaka;
6. Sosialisasi budaya baca dan literasi;
7. Pelaksanaan lomba bercerita Tk. SD/MI;
8. Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial;
9. Layanan ekstensi Pojok Baca Digital (Pocadi) di Kantor Bupati Padang Pariaman.

Untuk langkah kedepannya Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan akan terus berusaha meningkatkan nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendataan perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman agar terciptanya pemerataan layanan Perpustakaan Di Kabupaten Padang Pariaman yang nantinya akan berdampak terhadap kualitas SDM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga dapat mewujudkan Visi Padang Pariaman Berjaya dengan Misi ke 4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.

f) Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.

Berikut analisis capaian Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.49
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

NO	Sub Kegiatan	Capaian Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengembangan dan Pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Perpustakaan Umum/ Sekolah yang berbasis IT	40 Perpustakaan	16 Perpustakaan	40%
2	Pengembangan Perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah lokasi yang mendapatkan layanan mobil perpustakaan keliling	50 Lokasi Layanan Puskel	21 Lokasi Layanan Puskel	42%
3	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sekolah, Nagari yang dibina, dinilai dan di evaluasi	17 Perpustakaan Sekolah dan 10 Perpustakaan Nagari	17 Perpustakaan Sekolah dan 10 Perpustakaan Nagari	100%
4	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah pengadaan bahan pustaka/ elektronik	350 Eksemplar	2.517 Eksemplar	719%
5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi buku yang terpelihara	500 Eksemplar	1.100 Eksemplar	220%
6	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	50 Peserta	68 Peserta	100%
7	Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	Jumlah Peserta Lomba	34 Peserta	40 Peserta	117%
8	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan/ keterampilan inklusi sosial	50 Peserta	64 Peserta	128%
9	Pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang di akuisisi dan di alih mediakan	20 Naskah	10 Naskah	50%

Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Secara keseluruhan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan namun ada beberapa sub kegiatan yang belum memenuhi target. Namun hal tersebut tidak berpengaruh terlalu besar terhadap capaian IPLM Kabupaten Padang Pariaman.

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya pada urusan perpustakaan adalah sebesar Rp2.456.998.098,- dengan realisasi Rp2.318.293.591,- atau 94,35%, jumlah ini naik sangat signifikan dibandingkan dengan sumber daya pada tahun 2022 sebesar Rp234.390.800,- dengan realisasi Rp209.877.900,- atau 89,54%. Kenaikan ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan Perpustakaan pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Artinya dengan penggunaan sumber daya tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mendorong peningkatan nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman dengan kategori Sedang atau 67,74%. Nilai tersebut menggambarkan bagaimana telah terjadi kenaikan tingkat literasi di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya hal tersebut merupakan efisiensi dari pemanfaatan penggunaan sumber daya sehingga anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman.

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pendanaan merupakan faktor penting dalam rangka pencapaian kinerja suatu organisasi. Pada tahun 2023 total pagu belanja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman untuk urusan Perpustakaan sebesar Rp2.456.998.098,- dengan realisasi sebesar Rp2.318.293.591,- capaian persentase 94,35%.

Berikut realisasi belanja urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023:

Tabel 3.50

Realisasi Belanja Urusan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA ANGGARAN (Rp.)	%
I	Program Pembinaan Perpustakaan	2.419.068.293	2.293.878.591	125.189.702	94,82
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.337.539.938	2.220.532.091	117.007.847	94,99
a	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	311.050.023	266.721.623	44.328.400	85,75
b	Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.696.233.835	1.668.863.868	27.369.967	98,39
c	Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan	29.306.680	27.136.500	2.170.180	92,59

	Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				
d	Sub Kegiatan Pengembangan Bahan Pustaka	291.429.600	249.802.000	41.627.600	85,72
e	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	9.519.800	8.008.100	1.511.700	84,12
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.528.355	73.346.500	8.181.855	89,96
a	Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	27.244.255	26.863.000	381.255	99,60
b	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	29.165.000	27.127.700	2.037.300	93,01
c	Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25.119.100	19.355.800	5.763.300	77,06
II	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	37.929.805	24.415.000	13.514.805	64,37
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	37.929.805	24.415.000	13.514.805	64,37
a	Sub Kegiatan Pengembangan, Pengolahan, dan Pengalihmediaan Naskah Kuno Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	37.929.805	24.415.000	13.514.805	64,37
	JUMLAH	2.456.998.098	2.318.293.591	138.704.507	94,35

Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.40
Sosialisasi Insilite



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.41
Pembinaan Perpustakaan



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.42
Layanan Perpustakaan Umum Daerah



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.43
Layanan Perpustakaan Keliling



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.44
Layanan Antar Lemput Pemustaka



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.45
Pengadaan Buku Perpustakaan



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.46
Lomba Bercerita dan Story Telling Tingkat SD/MI



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.47
Pembangunan Perpustakaan Nagari Kudu Gantiang Barat



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.48
Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Perpustakaan Umum Daerah



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.49
Kegiatan Sosialisasi TPBIS



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2023

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya pada urusan perpustakaan adalah sebesar Rp2.456.998.098,- dengan realisasi Rp2.318.293.591,- atau 94,35%, jumlah ini naik



sangat signifikan dibandingkan dengan sumber daya pada tahun 2022 sebesar Rp234.390.800,- dengan realisasi Rp209.877.900,- atau 89,54%. Kenaikan ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan urusan Perpustakaan pada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Artinya dengan penggunaan sumber daya tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan secara baik oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk mendorong peningkatan nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman dengan kategori Sedang atau 67,75%. Nilai tersebut menggambarkan bagaimana telah terjadi kenaikan tingkat literasi di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya hal tersebut merupakan efisiensi dari pemanfaatan penggunaan sumber daya sehingga anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan secara baik dan tepat sasaran untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman.



SASARAN STRATEGIS 10

Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu pilar utama pembangunan suatu negara. Perkembangan pendidikan menjadi fokus utama dalam upaya mencapai kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Indikator Kinerja Utama “Harapan Lama Sekolah” merupakan indikator kinerja dengan Sasaran Strategis “Peningkatan Mutu Pendidikan. Lama Sekolah menunjukkan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembagunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Angka Harapan lama Sekolah merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Semakin tinggi tingkat harapan lama sekolah maka akan menciptakan masyarakat yang berwawasan tinggi, Apabila jumlah masyarakat yang berwawasan tinggi semakin banyak nantinya capaian indeks pembangunan manusia (IPM) juga akan semakin tinggi.

Penggunaan sumber daya dalam pencapaian angka harapan sekolah di tuangkan dalam program dan kegiatan untuk pendukung peningkatan capaian Angka Harapan Sekolah diantaranya program Pengelolaan Pendidikan di tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.473.415.382,00 dan terealisasi sebesar Rp 88.442.205.462 atau sebesar 81%. Angka Harapan Lama sekolah ini juga didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 70.285.186.000,- dan terealisasi Rp. 24.843.671.529,- atau sebesar 72,21%
2. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.062.134.782 dan terealisasi Rp. 25.163.583.628,- atau sebesar 96,55%
3. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.425.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.300.800.000,- atau sebesar 91.27%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Selama Tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dikategorikan “Sangat Berhasil” dengan capaian sebesar 14,19 dari Target 14,12 sehingga persentase ketercapaian nya sebesar 100,50%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 14.19 tahun (hingga Diploma III). Target dan realisasi capaian kinerja dari angka harapan lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.51
Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.12	14.19	100,50%	Sangat Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berikut adalah formulasi pengukuran untuk menghitung realisasi indikator kinerja “Harapan Lama Sekolah” :

Formulasi Pengukuran : **Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan di rasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang**

b) Perbandingan Realisasi IKU Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi IKU “Harapan Lama Sekolah” tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.52
Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama sekolah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 & 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.97	13.93	99,71	14.12	14.19	100,49	Sangat Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,26 poin yang mana pada tahun 2022 capaian Angka Harapan Lama sekolah sebesar 13,93 dan realisasi tahun 2023 mencapai 14.93.

Dengan naiknya Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten Padang Pariaman, maka hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang lebih baik bagi seluruh warga dan pendidikan yang lebih lama dapat membuka pintu peluang yang lebih besar bagi masing-masing individu. Pada tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman berada di posisi 9 sementara untuk tahun 2023 setingkat lebih tinggi di posisi 8 diantara Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Untuk capaian tersebut dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini:

Tabel 3.53
Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 dan Tahun 2023
Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat

NO	PROVINSI KABUPATEN/ KOTA	Harapan Lama Sekolah [Tahun]	
		2022	2023
	Sumatera Barat	14,10	14,11
1	Kota Padang	16.54	16.56
2	Kota Padang Panjang	15.07	15.29
3	Kota Bukittinggi	14.99	15.01
4	Kota Pariaman	14.61	14.79
5	Kab. Tanah Datar	14.59	14.78
6	Kota Solok	14.34	14.36
7	Kota Payakumbuh	14.29	14.3
8	Kab. Padang Pariaman	13.93	14.19
9	Kab. Agam	13.88	13.89
10	Kab. Pasaman Barat	13.69	13.7
11	Kota Sawahlunto	13.42	13.69
12	Kab. Solok	13.30	13.55
13	Kab. Lima Puluh Kota	13.40	13.41
14	Kab. Pesisir Selatan	11.35	13.36
15	Kab. Pasaman	13.05	13.25
16	Kab. Kepulauan Mentawai	12.89	12.9
17	Kab. Solok Selatan	12.73	12.8
18	Kab. Sijunjung	12.64	12.72
19	Kab. Dharmasraya	12.51	12.68

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman

**c) Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Kabupaten
Tahun 2023**

Tabel 3.54
Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama	RPJMD			Capaian 2023			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Harapan Lama Sekolah	14,12	14,19	100,50	14,12	14,19	100,50	Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

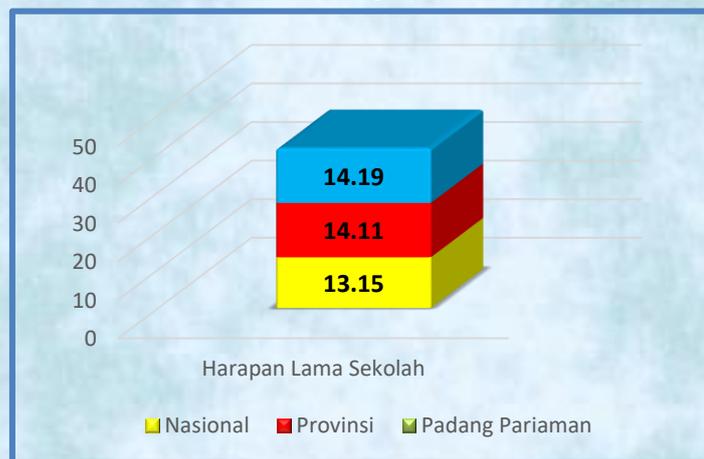
Dari capaian diatas dapat dilihat ketercapaian angka Harapan lama sekolah tahun 2023 sudah memenuhi target yang ada di Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) kab. Padang Pariaman dimana target harapan lama sekolah yang ada di RPJMD sebesar 14,12 dan terealisasi sebesar 14,19 di tahun 2023.

d) Perbandingan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023

Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten padang pariaman masih bisa dikatakan cukup tinggi dibanding beberapa Kabupaten lain di Sumatera Barat seperti kabupaten Agam, Kab, Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dhamasraya, Kab. Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai yang rata-rata capaian Angka Harapan Lama Sekolah nya berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2022 Kabupaten Padang Pariaman berada di Posisi 9 sementara untuk tahun 2023 setingkat lebih tinggi di posisi 8 diantara 19 kabupaten dan kota di Sumatera barat. Untuk capaian tersebut dapat dilihat dari grafik yang ada di bawah ini:

Grafik 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah
Padang Pariaman Tahun 2023 dengan Standar Nasional Tahun 2023



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan data BPS tahun 2023, dari grafik diatas dapat dilihat capaian realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman melampaui dari realisasi Provinsi sebesar 0.83 dan di atas rata-rata nasional sebesar 0.96.

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman di tunjang oleh beberapa Program dan kegiatan yang berkaitan dengan mutu Pendidikan dan akses Pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah dapat dikategorikan “Berhasil” karena didukung oleh beberapa faktor berikut :

1. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan menjadi indikator yang mempengaruhi harapan lama sekolah. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu selaras dengan peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah. Banyak aspek yang terkait dalam mutu Pendidikan dalam peningkatan angka harapan lama sekolah diantaranya :

a. Program Bantuan Pembiayaan Peserta Didik

Dalam memastikan semua anak sekolah mendapatkan hak pendidikannya, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan berupa dana Bantuan Operasional (BOS). Program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Dana BOS sekolah dengan pagu sebesar Rp.43.484.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.925.793.260,- atau sebesar 96,41% untuk Tingkat SD sedangkan untuk Tingkat SMP Dana BOS sebesar Rp. 17.378.000.000,- dengan realisasi Rp.17.224.680.539,- atau 99%.

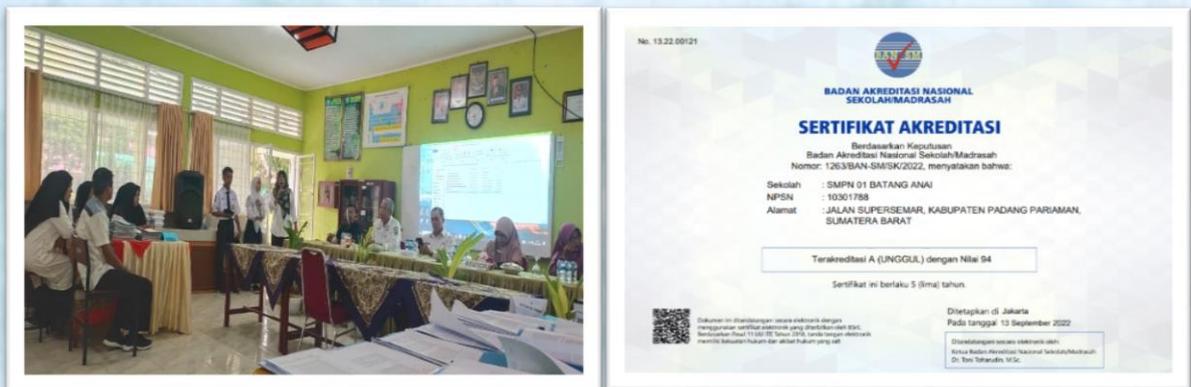
Selain BOS juga terdapat bantuan pembiayaan bagi peserta didik dari kalangan tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Peserta didik tingkat SD berhak menerima PIP pada tahun 2023 sebanyak 25.006 siswa dengan nilai 450.000/siswa. Sementara untuk tingkat SMP yang menerima PIP selama tahun 2023 sebanyak 8.942 siswa dengan nilai Rp.750.000/siswa.

b. Peningkatan mutu Satuan Pendidikan

Salah satu penilaian mutu di Satuan Pendidikan di berbagai jenjang dapat dilihat dari penilaian akreditasi satuan Pendidikan. Mekanismenya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Pada tahun 2023 Nilai akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu Akreditasi A : 49 Sekolah, akreditasi B : 294, dan Akreditasi C: 58 Sekolah. Sementara untuk akreditasi satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Akreditasi A :19 Sekolah, Akreditasi B : 27 sekolah dan Akreditasi C :12 Sekolah.

Gambar 3.50
Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

c. Peningkatan Manajemen pelayanan Pendidikan

Peningkatan Manajemen pelayanan Pendidikan untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap unsur-unsur Pendidikan mulai dari peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan serta sarana dan

prasarana satuan Pendidikan yaitu dengan penggunaan sistem aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Kegiatan yang mendukung penerapan dapodik ini yaitu penataan pendistribusian pendidik dan tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Nonformal dengan pagu anggaran sebesar Rp 81.000.000,-.

d. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal

Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal yaitu Melalui Paket A, B dan C dan program pelayanan Pendidikan lainnya. Untuk memastikan setiap warga negara memperoleh Pendidikan terkhusus bagi warga yang mengalami putus sekolah. Pendidikan non formal ini ditujukan untuk penduduk yang berusia 7-18 yang belum menamatkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Pendidikan Paket A diperuntukan setara Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Program Paket B diperuntukan setara Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Program Paket C di peruntukan setara Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu Penyediaan Biaya Personil yang diperuntukan bagi peserta didik di tingkat satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan. Pada tahun 2023 BOP ini dianggarkan dengan pagu sebesar Rp. 1.405.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.281.000.000,- yang di salurkan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ada di Padang Pariaman

Gambar 3.51

Kegiatan Proses Belajar Paket B di PKBM



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

e. Program Peningkatan mutu Pendidik

Pada program ini diutamakan untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik (guru) dengan mengutamakan beberapa program seperti peningkatan kapasitas dan kualitas guru mengajar melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Kondisi keterbatasan tenaga pendidik di jenjang Pendidikan SD dan SMP dipenuhi dengan adanya tenaga pendidik dan Kependidikan yang bersifat honor yang didukung oleh anggaran berupa insentif yang di bayarkan kepada guru

honor, operator dan penjaga sekolah. Pada jenjang SD diberikan pagu anggaran sebesar Rp.12.540.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.270.560.900,- atau sebesar 89,88%. Sementara untuk jenjang SMP diberikan pagu sebesar Rp.2.526.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.077.500.000,- atau sekitar 82,24%.

Gambar 3.52
Kegiatan Rakor Terkait Guru Penggerak



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Peningkatkan akses Pendidikan

Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan kondisi baik, didukung oleh APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2023 kondisi Sekolah Dasar (SD) dengan Kondisi ruang kelas baik yaitu sebesar 54%, kondisi rusak sedang 30% dan rusak berat 16%. Kegiatan peningkatan kondisi sarana prasarana sekolah ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.661.825.340,- dan terealisasi sebesar Rp.10.544.265.343,-.

Untuk satuan Pendidikan sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan bangunan baik sebanyak 81%, kondisi rusak sedang sebanyak 14% dan rusak berat sebanyak 5%. Pagu Anggaran dalam mendukung perbaikan kondisi sarana dan prasana di tingkat satuan SMP pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.305.184.782,- dan terealisasi sebesar Rp.4.097.397.375,- yang dialokasikan dari pusat melalui dana DAK tahun 2023.

Gambar 3.53
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Mobiler
SMPN 5 Sungai Limau



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

e) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Solusi Yang Telah Dilakukan

Hambatan dalam Peningkatan capaian Angka Harapan Lama Sekolah dapat berupa :

1. Masih tingginya angka putus sekolah baik di tingkat SD maupun SMP. Beberapa faktor yang menyebabkan putus sekolah diantaranya :
 - a. Faktor ekonomi, banyak peserta didik yang akhirnya memilih untuk putus sekolah karena keterbatasan kemampuan ekonomi yang dimiliki.
 - b. Minat belajar dan faktor lingkungan juga mempengaruhi angka putus sekolah. Kemajuan teknologi digital memberikan dampak pengaruh menurunnya minat belajar karena peserta didik lebih memilih menghabiskan waktu untuk kegiatan lainnya.
2. Sarana prasarana yang belum memadai dan membutuhkan rehabilitasi, karena kondisi bangunan sekolah masih ada yang berkategori Rusak berat.
3. Keterbatasan Jumlah pendidik (guru) dengan rombongan belajar yang ada. Idealnya tingkat Pendidikan SD harus memiliki 1 guru untuk 1 rombongan belajar.
4. Masih adanya pendidik yang belum berkualifikasi S1

Strategi yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut antara lain:

1. Untuk memberantas angka putus sekolah di jenjang SD, dilakukan pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak dan orang tua dan apabila usia anak sudah melewati batas usia masuk SD maka anak ditampung di paket A.
2. Untuk memberantas angka putus sekolah di jenjang SMP diantaranya :
 - a. memotivasi peserta didik untuk menumbuhkan minat melanjutkan ke jenjang selanjutnya sehingga di harapkan dapat menekan angka putus sekolah.
 - b. Apabila Anak yang sudah melewati usia memasuki SMP dapat ditampung di Paket B
3. Pemenuhan guru per rombongan belajar harus dilakukan perekrutan tenaga pendidik dan untuk mendorong serta memberikan akses bagi tenaga Pendidik yang ingin melanjutkan pendidikan.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 mengalami efisiensi sebesar Rp. 41.473.381.006,-. Efisiensi tersebut dilakukan pada beberapa kegiatan diantaranya kegiatan perencanaan dan penganggaran, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan penyediaan gaji. Efisiensi dan penyesuaian tersebut dilakukan karena kegiatan tersebut tidak signifikan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

g) Inovasi-inovasi

Inovasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman sebagai pengampu IKU “Harapan Lama Sekolah” antara lain :

1. SIPINTAR (Siswa Praktek Ibadah Tiap Hari)

SIPINTAR merupakan kegiatan yang dilakukan sekolah dengan tujuan meningkatkan iman dan taqwa siswa. Praktek ibadah setiap hari siswa dapat memberikan tambahan ilmu baik dari segi gerakan dalam shalat maupun dalam segi hafalannya.

Gambar 3.54
SIPINTAR



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. SIBERSERI (Siswa Bersedekah Setiap Hari)
Siberseri merupakan kegiatan yang di terapkan kepada peserta didik (siswa) yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan ini mengajak para siswa untuk melakukan kegiatan amal berupa sedekah setiap harinya dengan tujuan menumbuhkan rasa senang berbagi dan praktek penerapan ilmu agama langsung.

Gambar 3.55
SIBERSERI



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. GEBU SIPAFA (Gerakan Seribu Siswa Penghafal Al Qur'an)
Gebu Sipafa ini merupakan Gerakan yang mengajarkan peserta didik mengenai pemahaman dan penghafalan Al-Qur'an. Peserta didik tingkat SD dan SMP sebelum memasuki kelas dan memulai pelajaran siswa diharuskan membaca beberapa ayat pendek dan menghafalkannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta

didik dapat menghafal Al-qur'an dan menerapkan nilai-nilai kebaikan terkandung di dalamnya.

Gambar 3.56
GEBU SIPAFA



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

h) Penghargaan Yang Diraih

1. Penghargaan terkait Gelar Bukti Karya & Penganugerahan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Hari Guru Nasional 2023.

Gambar 3.57

Penghargaan terkait Gelar Bukti Karya & Penganugerahan Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Hari Guru Nasional 2023



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Perhargaan Dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Bidang Pendidikan.

Gambar 3.58

Piagam Perhargaan Dalam Forum Nasional Replikasi Inovasi Pelayanan Bidang Pendidikan



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2023

**SASARAN STRATEGIS 11****Peningkatan Tenaga Kerja Yang Terampil dan Berdaya Saing**

Indikator Kinerja Utama “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan Sasaran strategis “Peningkatan Tenaga Kerja Yang Terampil dan Berdaya Saing” merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal”. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat sebagai berikut :

a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Perbandingan target dan realisasi IKU “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.55
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,17	6,69	106,69	Sangat Berhasil

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Adapun pengukuran indikator ini dilakukan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dari tabel diatas dapat dijelaskan target dan realisasi tahun 2023 bahwa Sasaran IKU Tingkat Kemiskinan dinilai berhasil dengan realisasi capaian 6,69% dari target 7,17%. Meskipun tahun 2023 diwarnai dengan inflasi yang cukup mengganggu perekonomian masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan tetap mencapai target karena bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tergolong kedalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU tahun 2022 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

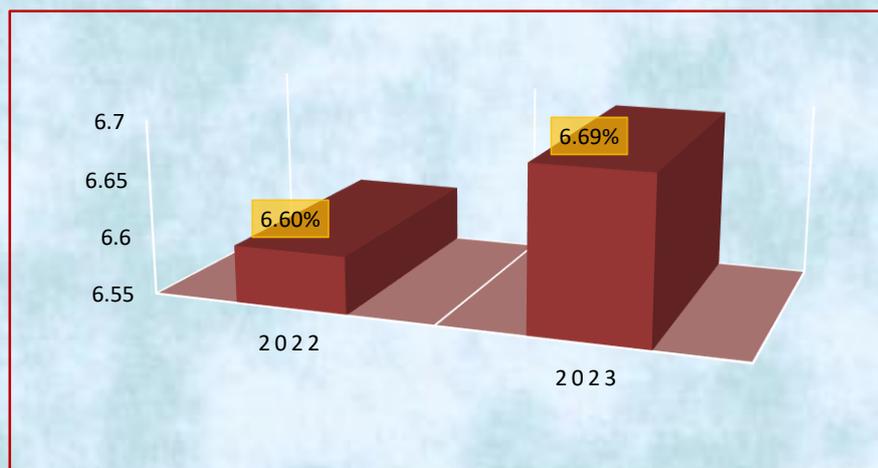
Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Interpretasi
		Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,60%	7,17	6,69	106,69	Sangat Berhasil

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Jika dilihat dari capaian realisasi diatas, pada tahun 2022 indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” mengalami pencapaian dengan Kategori” sangat Berhasil” dengan realisasi 6,60% sedangkan pada tahun 2023 tercapai sebesar 6,69% dari target 7,17% dan Capaian 106,69% dengan Kategori “Berhasil”. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti berikut ini :

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022
dengan Tahun 2023



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pencapaian tingkat pengangguran pada tahun 2023 merupakan pencapaian yang lebih tinggi dari pencapaian tahun 2022 sebesar 6,60 %. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan bertambahnya jumlah pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman masih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,94 % dan Tingkat pengangguran Terbuka Nasional 5,32 %. Berdasarkan data dari BPS Sumatera Barat berdasarkan Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman Menduduki nomor 2 tertinggi setelah Kota Padang sebesar 10,86 %.

c) **Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah**

Tabel 3.57

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,61	7,15	7,17	8,61	6,60	6,69

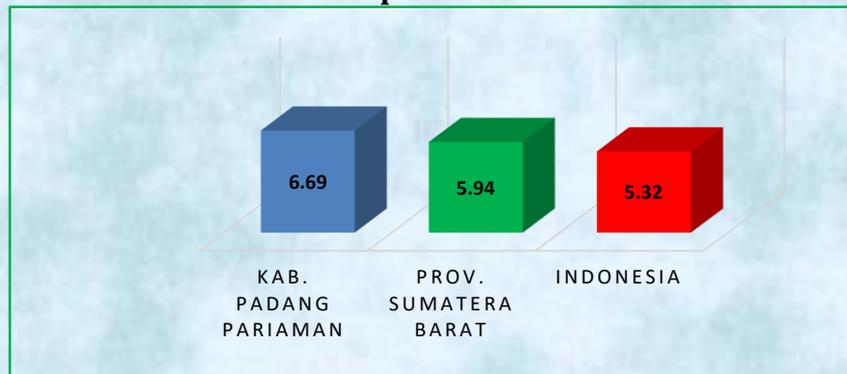
Realisasi Indikator Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” pada tahun 2021 sebesar 8,61% dengan target RPJMD sebesar 7,61%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 6,60% dengan target RPJMD sebesar 7,15%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 6,69% dari target RPJMD sebesar 7,17%.

d) **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023**

Perbandingan realisasi kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman terkait IKU dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.11

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman masih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,94 % masih lebih tinggi sebesar 0,75 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional sebesar 5,32 % perbandingannya masih tinggi sebesar 1,37%. Berdasarkan perbandingan tersebut Alternatif solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

Peningkatan produktivitas tenaga kerja harus segera dilakukan

1. Memperbaiki instruktur, kemudian para siswa lulusan vokasi juga harus tersertifikasi untuk menjamin upah atau gaji yang diterima sesuai dengan keahliannya.
2. Untuk mengetahui tingkat pengangguran di sektor Tenaga Kerja perlu di lakukan

pendataan tenaga kerja yang Produktif yang menganggur di setiap Nagari dan Potensi pengembangan Usaha yang akan di lakukan di Nagari tersebut sesuai dengan Minat peserta Pelatihan, dan juga perlu perhatian pemerintah Daerah agar menyalurkan Dana yang optimal terhadap Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja yang berbasis di Nagari.

3. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja
4. Mengadakan bursa kerja
5. Menjalini Komunikasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Perusahaan dan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi)

e) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 299.964.950 dan realisasi anggarannya Rp. 297.322.350 dengan kegiatannya :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 271.012.450 realisasi anggarannya Rp. 268.754.010 atau sebesar 99.17% dan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 271.012.450. capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2023 adalah sebanyak 240 orang di pelatihan di BLK dengan dana yang bersumber dari APBN dan sebanyak 119 dengan dana yang bersumber dari APBD.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebanyak 119 orang tenaga yang punya minat dan bakat tersebut telah meningkat keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki dengan mengikuti pelatihan menjahit, pelatihan barista dan pelatihan Make Up.
- Sebanyak 240 orang dengan Tiap-tiap paket diikuti 16 orang sehingga total untuk 15 Paket di pelatihan di BLK dengan dana yang bersumber dari APBN. Dengan ketrampilan yang telah dimiliki diharapkan peserta dapat menumbuhkan jiwa wirausaha mandiri serta terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, kompeten dan produktif pada bidang masing-masing kejuruan.

Gambar 3.59
Pelatihan Barista



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.60
Pelatihan Menjahit



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.61
Pelatihan Make UP



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- b. Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan anggaran sebesar Rp. 28.952.500 realisasi anggarannya Rp. 28,568,340 atau sebesar 98.67 %. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan anggaran Rp. 28.952.500 realisasi anggarannya Rp. 28.568.340 atau sebesar 98.67 %.

Hasil-hasil yang dicapai :

Hasil yang dicapai dimana persentase Pembinaan Lembaga Kerja Swasta Padang Pariaman sesuai dengan target dan LPKS yang terakreditasi baru satu LPKS. Semakin meningkatnya LPK yang ingin dibina dan mengurus rekomendasi izin usaha.

Gambar 3.62
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.63
Kegiatan diluar program dalam bentuk Pelayanan Antar Kerja atau AK1



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Program Hubungan Industrial

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 57.678.000 dan realisasi anggarannya 51.424.000 atau dengan persentase sebesar 89,20% dengan rincian kegiatan:

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 39,488,500 realisasi anggarannya Rp. 35.824,000 atau sebesar 90,72 %. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan

Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 21,270,500 realisasi anggarannya Rp. 20,394,000 atau sebesar 95,88 %. Metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan lapangan ke Perusahaan (Kunjungan dalam rangka pendataan, pembinaan dan monitoring ke perusahaan tentang kelengkapan persratan kerja dan norma kerja), dan Konsultasi Ke Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya.

Capain kinerja untuk kegiatan ini dengan indikator Jumlah Perusahaan menerapkan K3, Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan pengesahan PP/PKB dan Jumlah PKWT dan PKWTT yang dicatatkan. Untuk Perusahaan menerapkan K3 dengan target untuk tahun 2023 sebanyak 75 perusahaan realisasi capaiannya sebanyak 78 perusahaan atau sebesar 104 %. Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan pengesahan PP/PKB pada tahun 2023 target sebanyak 12 perusahaan dan realisasi sebanyak 10 perusahaan atau sebesar 83,3 %. Berdasarkan hasil kunjungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan telah diterbitkan PP, PKWT dan PKWTT, PKB dan PKPP tahun 2023 sebanyak 544.

Gambar 3.64
Kegiatan Monitoring tentang Tata tertib Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan *Update* Data Perusahaan ke Perusahaan PT. Coca Cola Distribution



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.65
Kegiatan Monitoring tentang tertib Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan *Update* Data Perusahaan ke PT Anai Land



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- 2) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan anggaran sebesar Rp. 18,218,000 realisasi anggarannya Rp. 15,430,000 atau sebesar 84,70 %.

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Kegiatan

Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
Hasil	Persentase Tenaga Kerja yang Menjadi Anggota Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	73%	96,35%	131,98%
Keluaran	Jumlah Tenaga Kerja yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan	9.474 orang	9.128 orang	96,35%
	Jumlah Perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	227 Perusahaan	224 perusahaan	98,67%
	Jumlah perusahaan yang dilakukan sosialisasi, pembinaan dan monitoring	50 Orang	60 orang	120%

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Ada pun keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak antara lain :

- Meminta kepada Perusahaan untuk melampirkan bukti lunas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan para Pekerja/Buruh.
 - Menjalinkan Komunikasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi) terkait Update Data dan Informasi Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 18,159,500 realisasi anggarannya Rp. 15,600,000 atau sebesar 85,91 %. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah
- 1) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 18,159,500 realisasi anggarannya Rp. 15,600,000 atau sebesar 85,91 %.

Tabel 3.59
Capaian Kinerja Kegiatan

Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	%
Hasil	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan/ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Keluaran	Jumlah Kasus- kasus Hubungan Industrial yang Di Fasilitas	10 kasus	4 kasus	40%
	Jumlah Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring perusahaan yang dilaksanakan	10 perusahaan	11 perusahaan	90,90%

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- 2) Kunjungan, pembinaan dan monitoring sarana hubungan industrial ke Perusahaan-perusahaan yang ada dilingkungan Kabupaten Padang Pariaman dan telah dikunjungi sebanyak 11 perusahaan sesuai dengan dana yang tersedia dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.60
Perusahaan Yang Telah Dikunjungi

No.	Perusahaan
1	PT BPR Cincin Permata Andalas
2	PT Japfa Comfeed Kasang
3	PT Bumi Sarimas Indonesia
4	PT Usaha Inti Padang
5	PT Beta Farma Nusantara
6	PT Keluarga Sakato Sejahtera
7	PT Pasar Usang Bina Sejati
8	PT Jaya Sentrikon Indonesia
9	CV Blue Sky Succes

10.	PT Japfa Comfeed Kayu Tanam
11.	PT Orsoindo Sejahtera

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.66
Kegiatan Sosialisasi dan Implementasi Awal Perlindungan Jamsos
Bagi Pelaku Koperasi dan UMKM



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.67
Koordinasi Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pada Perusahaan Srinjanya



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.68
Fasilitasi Bipartit Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
PT Mandiri Karya Kirana



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.69
Dalam Rangka Kunjungan Pengacara Kuasa Hukum
Karyawan ter PHK PT Jaya Sentrikon Indonesia



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2023

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain adanya refocusing anggaran diantaranya :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 299.964.950 ;
2. Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp. 57.678.000.

g) Strategi Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa strategi yaitu:

1. Melakukan MOU dengan Asosiasi pengusaha dan kerja sama dengan perusahaan.
2. pemaksimalan Lembaga Kerja Swasta (LKS).
3. Meningkatkan Koptensi Calon Tenaga Kerja melalui Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja.
4. Melakukan Pembinaan bagi BLK Komunitas.
5. Memfasilitasi penerbitan Kartu Pencari Kerja (Ak1) bagi calon pencari kerja.
6. Melakukan pembinaan dan memberi bantuan peralatan bagi masyarakat.
7. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.
8. Memberikan bantuan berupa Layanan Konsultasi bagi Pekerja yang terkena PHK.
9. Memberikan Rekomendasi pelatihan dan informasi lowongan bagi Pekerja yang terkena PHK.
10. Memfasilitasi bagi Tenaga Kerja untuk bekerja di luar Negeri.
11. Melakukan Verifikasi terhadap Draf Peraturan Perusahaan yang bertujuan untuk menjamin hak pekerja.
12. Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada perusahaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

**SASARAN STRATEGIS 12****Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**

Sasaran Strategis “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” merupakan turunan dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang ke-5 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan. Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu : Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji materi. Oleh sebab itu, opini WTP merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena merupakan cerminan terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, agar pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk kesekian kalinya berhasil kembali meraih Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI.

Berikut ini perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.61
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama “Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah” adalah sebagai berikut :

Tabel 3.62
Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022		TAHUN 2023		Interpretasi
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	Sangat Berhasil

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Tabel 3.63
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019 s/d 2023

NO	LKPD TAHUN	OPINI
1.	2019	WTP
2.	2020	WTP
3.	2021	WTP
4.	2022	WTP
5.	2023	WTP

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Jika dilihat capaian indikator kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat bahwa capaian IKU Kabupaten Padang Pariaman “Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah” ini konsisten dikarenakan realisasi yang didapatkan adalah sama yaitu “WTP”.

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Standard Akuntansi Pemerintahan
2. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
3. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (*no material uncertainties*), pengelolaan atas cash flow dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (Unqualified Opinion)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (Qualified Opinion)
3. Tidak Wajar (Adverse Opinion)
4. Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu.

Opini WTP ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini WTP ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

(c) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Sebagai upaya memperoleh opini WTP dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.64
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Tahun 2023

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%



		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%
		Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	100%
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Standar Harga	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah	100%
		Penilaian Barang Milik Daerah	100%

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berikut dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan sasaran strategis IKU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 :

Gambar 3.70
Penyerahan LHP atas LKPD Tahun 2022



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.71
Pembukaan Rekonsiliasi Dana BOS di Hall Saiyo



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.72
Pembahasan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.73
Penerimaan Penghargaan KPPN Award Kategori Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Semester 1 (Penyaluran Tercepat Dana Desa Dan Blt Melalui Aplikasi Omspan) kepada Kab. Padang pariaman oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.74
Rapat Banggar DPRD dengan TAPD



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.75
Pelaksanaan Rapat Terkait Kebijakan Akuntansi



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.76
Pelaksanaan Rapat Rapat TP TGR



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.77
Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD dan Dana BOK



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.78
Koordinasi dan Pembelajaran Perekaman Data/ Informasi ASN Kab Padang Pariaman pada Aplikasi SIMGAJI



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.79
Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.80
Pemusnahan Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.81
Inventarisasi Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.82
Pelaksanaan Lelang Online Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

(c) Upaya Yang Dilakukan Untuk Pencapaian IKU

Berikut beberapa upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman :

1. Menindaklanjuti Temuan BPK RI

Dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun sebelumnya semua pihak terkait bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI atas Laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan pemetaan terhadap Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan. Status tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat berupa telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dalam proses (belum selesai tindak lanjutnya), dan belum ditindaklanjuti.

2. Peningkatan Peran APIP

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperkuatnya peran pengawasan internal pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. APIP juga melakukan review sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pendampingan pada saat pemeriksaan oleh BPK.

Gambar 3.83
FGD Penyusunan PPBR BPKD dengan Tim Inspektorat



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Kemudian dalam rangka pengawasan internal, inspektorat Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada kegiatan pengawasan/audit tapi juga melakukan fungsi pembinaan terhadap Perangkat Daerah. Disamping itu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah berupaya :

- a) Meningkatkan level maturitas SPIP.
 - b) Meningkatkan Kapabilitas APIP.
 - c) Meningkatkan Anggaran APIP sesuai dengan aturan yang berlaku.
- #### 3. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah

Untuk mencapai suatu tata kelola keuangan daerah yang handal dan profesional juga dilakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan berupa dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan maupun

bimbingan teknis terhadap aparatur pengelola keuangan, sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

Gambar 3.84
Evaluasi Kinerja THL di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.85
Mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi Surat Menyurat (SRIKANDI)



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi maka hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman adalah menggunakan aplikasi SIPD, membangun simda online yang terkoneksi dengan semua perangkat daerah di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain kedepan aplikasi simda ini akan terintegrasi antara pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang daerah serta melaksanakan SP2D Online dengan Bank Nagari.

5. Koordinasi yang baik antara unit terkait baik internal maupun eksternal

Upaya yang tidak kalah penting dalam rangka meraih kembali opini WTP atas laporan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Ini sangat

perlu dilaksanakan untuk keselarasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga menjadi komitmen dari semua pihak dalam rangka memperoleh kembali opini WTP.

6. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan

Menghindari potensi temuan tahun berikutnya, maka APIP berperan aktif dalam peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pencegahan pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

d) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2023 menyelesaikan banyak program pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Target kinerja tahunan dan juga penambahan beban kinerja tahun berjalan baik dari pemerintahan pusat melalui penerbitan regulasi baru terkait peraturan pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap penyesuaian dan tindaklanjut yang melahirkan kebijakan-kebijakan ditingkat daerah. Selain itu juga faktor internal dan eksternal lainnya yang membutuhkan penanganan yang cepat, sehingga menambah beban kinerja ditahun 2023.

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dan telah diturunkan melalui Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026, maka capaian target kinerja diakhir tahun anggaran telah dapat dicapai 100% dengan diraihnya opini WTP yang menjadi tujuan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Proses pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2023 yang disertai dengan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga berdampak terhadap kinerja dari porsi anggaran yang telah disediakan. Dalam hal anggaran berbasis kinerja, dampak yang mempengaruhi anggaran sangat menentukan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan capaian target kinerja, telah berhasil menggunakan efisiensi anggaran belanja dan langkah efisiensi lainnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap diraihnya capaian kinerja serta IKU yang ditetapkan 100%. Target anggaran pada DPA Perubahan tahun 2023 Rp.205,577,697,641,00 dengan realisasi sebesar Rp.148,045,440,201,00. Adapun untuk realisasi belanja BPKD memang berkisar pada 72.01%, hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk melakukan realisasi belanja. Namun hal ini tentunya tidak mengurangi kualitas dan capaian kinerja program dan kegiatan yang ada.

e) Faktor-faktor Pendukung/Penghambat Capaian Kinerja

- SDM Pengelola Keuangan pada perangkat daerah belum maksimal dalam memahami aturan pencairan dana dan tidak taat dalam penyusunan anggaran kas.

- Masih terdapat beberapa temuan yang ditindaklanjuti dan belum tepenuhinya kelengkapan data dari perangkat daerah dalam penyusunan LKPD
- Penerapan SPBE dalam pelaksanaan kegiatan yang belum optimal dalam penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan antara SIPD dan Simda, serta Penerapan Digitalisasi dalam rangka mewujudkan SPBE dengan E-Government dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- Kualitas kesepahaman tujuan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD.
- Terlambatnya kelengkapan persyaratan batas pencairan oleh perangkat daerah yang berpengaruh terhadap transferan pusat.
- Masih kurangnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan BMD, sehingga banyak pekerjaan pengelolaan BMD tertumpu ke bidang Aset BPKD.
- Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat yang berdampak atas keakuratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Padang Pariaman.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola barang milik daerah sehingga belum maksimal dalam merencanakan kebutuhan BMD
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Keuangan dan BMD.

Alternatif solusi yang dilakukan :

- Pelaksanaan pembinaan, workshp dan bimtek terhadap pengelolaan, penatausahaan keuangan dan BMD
- Perlunya Komitmen antara Kepala Perangkat Daerah, Tim Majelis dan perangkat daerah yang terkait atas urusan tindak lanjut LHP
- Penggunaan aplikasi perencanaan dan penganggaran melalui SIPD serta penatusahaan dan pelaporan keuangan melalui Simda Keuangan, sedangkan Penggunaan aplikasi Simda BMD untuk pengelolaan barang milik daerah.
- Melakukan inovasi dalam pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan system atau aplikasi.
- Meningkatkan koordinasi dan pemahaman dengan pihak legislatif dalam penyusunan APBD Kabupaten Padang Pariaman.
- Meningkatkan koordinasi dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah.
- Membangun komitmen seluruh kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna/kuasa pengguna barang daerah beserta seluruh jajarannya untuk melakukan tata kelola aset daerah dibawah kekuasaan secara tertib administrasi.

- Meningkatkan kualitas rekon melalui monitoring dan evaluasi dari data rekon BMD, sehingga inventarisir barang lebih akurat dan akuntabel.
- Optimalisasi sumberdaya yang ada dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan BMD.

f) Penghargaan Yang Diterima

Penyerahan hasil evaluasi merupakan bagian akhir dari serangkaian proses evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah. Salah satu tujuan penyelenggaraannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance.

Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku instansi yang memiliki fungsi tata kelola keuangan selama tahun 2023 telah melakukan berbagai strategi konkrit yang berdampak langsung terhadap layanan keuangan di Kabupaten Padang Pariaman dengan dibuktikan diperolehnya beberapa penghargaan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.65
Penghargaan yang Diterima Tahun 2023

NO	PENGHARGAAN
1.	Opini WTP atas LKPD Tahun 2023 dari BPK RI
2.	Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Semester I Tahun 2023 Lingkup KPPN Padang

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dari tabel diatas terlihat tercapainya salah satu tujuan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu dengan diraihnya opini WTP atas laporan keuangan daerah tahun 2022. Penerimaan penghargaan tersebut diraih dengan berbagai upaya dan strategi serta inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini merupakan wujud kerja keras yang dilakukan oleh seluruh pihak karena melibatkan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan opini tersebut.

Selain opini WTP yang diterima pada tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan Daerah juga menerima beberapa penghargaan baik tingkat Kabupaten Padang Pariaman maupun tingkat provinsi Sumatera Barat serta dari instansi pemerintahan lainnya.

Penghargaan selanjutnya yang diterima yaitu Pengelolaan Dana Desa Terbaik Semester I Tahun 2023 Lingkup KPPN Padang. Hal itu membuktikan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melakukan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan daerah telah memanfaatkan anggaran secara maksimal untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai 69,19 atau predikat "B" dengan capaian sebesar 94,84%. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Berikut capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB :

Gambar 3.86
Entry Meeting SAKIP Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

a) Perbandingan Realisasi IKU “Nilai Evaluasi SAKIP” Tahun 2022 dan Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Nilai Evaluasi SAKIP” Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB	B	98,35	BB	B	98,83

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya dengan formula pengukuran sebagai berikut :

Formulasi = Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Padang Pariaman memperoleh predikat “B” dengan poin 69,19 pada tahun 2023. Artinya, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan “BB” dengan poin minimal 70,01. Capaian tersebut masih sama dengan capaian predikat nilai SAKIP Tahun sebelumnya yaitu “B”. Meskipun tidak memenuhi target, jika dilihat dari perolehan poinnya nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 68,86 di tahun 2022 menjadi 69,19 pada tahun 2023.

Berikut ini perbandingan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dengan tahun 2023 berdasarkan aspek evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :

Tabel 3.67
Aspek Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50	22,54
2	Pengukuran Kinerja	30	21,15	21,25
3	Pelaporan Kinerja	15	10,76	10,81
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,45	14,59
Nilai Hasil Evaluasi			68,86	69,19
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dilihat dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Hasil Evaluasi SAKIP berdasarkan aspek evaluasi tahun 2023 yang dilakukan oleh Kemenpan RB mendapatkan total nilai sebesar 69,19. Nilai tersebut dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “B” dan belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu kategori “BB”. Namun secara jumlah poin mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan

tahun 2022 yang mendapatkan poin 68,86 dengan peningkatan poin sebesar 0,33(0,45%).

b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.68

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B	B	BB	68,50 (B)	68,86 (B)	69,19 (B)

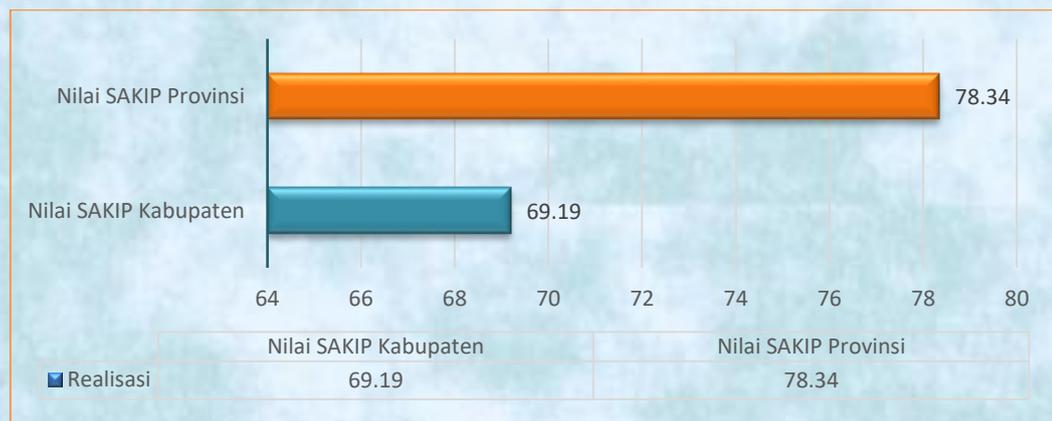
Realisasi Indikator Kinerja “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB” pada tahun 2021 yaitu 68,50 predikat “B” dengan target RPJMD sebesar BB. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan poin sebesar 0,36 menjadi 68,86 predikat “B” dengan target RPJMD “B”. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 69,19 predikat “B” dari target RPJMD BB. Capaian tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD, namun jika dilihat dari perolehan poinnya nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan sebesar 0,33.

c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman terkait IKU dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.12

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat. Nilai SAKIP Kabupaten adalah sebesar 69,19 (B) sedangkan Nilai SAKIP Provinsi adalah sebesar 78,34 (BB) dengan selisih nilai sebesar 9,15.

d) Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencapaian IKU

Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen yang kuat dari Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) dalam rangka mendorong peran serta seluruh OPD guna peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peningkatan komitmen dari seluruh OPD untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD dengan Bupati Padang Pariaman dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD 2021-2026.
3. Menetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman SAKIP Kabupaten Padang Pariaman.
4. *Reengineering* dan pengembangan aplikasi e-SAKIP Kabupaten Padang Pariaman menjadi aplikasi Sistem Informasi Kinerja (Simak Kinerja) Kabupaten Padang Pariaman kerjasama antara Tim SAKIP dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Aplikasi tersebut dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah untuk melaporkan data akuntabilitas kinerja masing-masing.
5. Melakukan *workshop* penyesuaian pohon kinerja dan dokumen perencanaan bagi seluruh Kepala OPD dan jajarannya.
6. Melakukan gladi presentasi seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka persiapan Evaluasi SAKIP Tahun 2023 KemenPAN RB.
7. Optimalisasi kinerja Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dengan Tim Reviu dan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah dengan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD dan Kecamatan dalam pelaksanaan Reviu LAKIP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP OPD dan Kecamatan.
8. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja.
9. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal.
10. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.
11. Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu.
12. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan.

Gambar 3.87
Perbaikan Dokumen Perencanaan dan Pohon Kinerja Perangkat Daerah



Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.88
Sosialisasi Aplikasi SIMAK Kinerja Kepada Seluruh Perangkat Daerah



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, 2023

d) Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB”

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama “**Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB**”, Kabupaten Padang Pariaman telah merumuskan beberapa Program dan kegiatan diantaranya Program Penataan Organisasi dengan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang diampu oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Namun Target Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan target Nilai SAKIP “BB” belum dapat dicapai karena masih terdapatnya hambatan-hambatan dalam pengimplementasian SAKIP antara lain :

1. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART.
2. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
3. Masih terdapat perjanjian kinerja Perangkat Daerah yang belum berorientasi hasil (*Outcome*).
4. Pimpinan Perangkat Daerah belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi kinerja internal, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja perangkat daerah belum berkualitas dan masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.
6. Rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan dan belum seluruhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
7. Belum seluruh perangkat daerah memanfaatkan aplikasi Simak Kinerja sebagai alat pelaporan kinerja perangkat daerah secara berkala. Hal ini terlihat dari masih banyaknya Perangkat daerah yang tidak mengisi pada aplikasi tersebut.

Gambar 3.89
Evaluasi SAKIP Tahun 2023 oleh Kemenpan RB



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

e) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU “Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB”

Tabel 3.69

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Capaian IKU Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 597.822.350,00	Rp.344.015.708,00	57,54
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 45.230.750,00	Rp. 24.042.000,00	53,15
2	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 39.499.500,00	Rp. 37.613.618,00	95,22
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 76.211.000,00	Rp.69.833.550,00	91,63
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp. 509.066.256,00	Rp. 442.080.453,00	86,84

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 917.585.329,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 1.267.829.856,00 . Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 27,63%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh efisiensi sebesar 1,66% (anggaran sebesar Rp 3.382.673.042,108 realisasi sebesar Rp 3.326.569.574.317). Persentase efisiensi ini secara teori jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya serta pada kegiatan dan hasil nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya.

3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 bahwa :

“Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menjadi salah satu indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.70
Perbandingan Target dan Realisasi IKU
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	Nilai	3,300	3,2904*	99,71*	Berhasil

Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2023 masih menunggu proses penetapan peringkat melalui keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum ditetapkan. Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman yang ada pada saat ini adalah nilai pada tahun 2022 dengan skor 3,2904 (sedang).

Berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi LPPD seluruh Indonesia oleh Tim nasional EPPD sudah ada di Kemendagri, akan tetapi untuk penetapannya melalui Keputusan Menteri belum ada, sedangkan untuk membahas keputusan tersebut Tim nasional akan melakukan rapat kembali pada tanggal 26 Januari 2023 yang langsung dipimpin oleh Bapak Sekjen Kemendagri dengan peserta eselon 1 dari Kemenkeu, KemenpanRB, KemenPPN/Bappenas, BPKP, BPS dan Kemitraan.

Berikut ini adalah formulasi pengukuran Indikator Kinerja Utama “Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD” :

Formulasi = Nilai LPPD Hasil Penilaian Kemendagri

b) Perbandingan Target dan Realisasi Nilai LPPD Kabupaten Tahun 2022 dan 2023

Tabel 3.71
Perbandingan Target dan Realisasi IKU Nilai LPPD Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	TAHUN 2022			TAHUN 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	Nilai	2,700	3,2904	121,87	3,300	3,2904*	99,71*	Berhasil

Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel, diketahui bahwa nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun terakhir sudah melebihi target dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2023 masih menunggu proses penetapan peringkat melalui keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum ditetapkan. Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman yang ada pada saat ini adalah nilai pada tahun 2022 dengan skor 3,2904 (sedang).

c) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk memperoleh capaian nilai LPPD yang lebih baik, dilakukan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya :

- (1) Pengumpulan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang diampu oleh seluruh OPD terkait ;
- (2) Reviu terhadap data Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman ;
- (3) Melaksanakan workshop atau bimbingan teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- (4) Finalisasi penyusunan LPPD Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama yang berperan sebagai leading sector dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun, yang dimana masih terdapat kendala dalam pemahaman yang kurang dari pengelola data pada masing-masing Perangkat Daerah terkait definisi operasional IKK. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah agar dapat memaksimalkan kinerja

guna mencapai nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang lebih baik lagi.

Berikut beberapa dokumentasi dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan LPPD selama tahun 2023.

- (1) Pelaksanaan Reviu LPPD bersama Inspektorat.

Gambar 3.90
Reviu LPPD bersama Inspektorat



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- (2) Reviu Lanjutan/Perbaikan Data LPPD.

Gambar 3.91
Reviu Lanjutan/Perbaikan Data LPPD



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- (3) Rapat Finalisasi LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Gambar 3.92
Rapat Finalisasi LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- (4) Penyerahan Laporan LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023.

Gambar 3.93
Penyerahan Laporan LPPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Crosscutting dengan OPD Lain

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama yang berperan sebagai leading sector dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dari tahun ke tahun, yang dimana masih terdapat kendala dalam pemahaman yang kurang dari pengelola data pada masing-masing Perangkat Daerah terkait definisi operasional IKK. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah agar dapat memaksimalkan kinerja guna mencapai nilai Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang lebih baik lagi.

d) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian IKU

Kendala yang dihadapi dalam mencapai nilai LPPD sebagai berikut :

1. Tidak semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilaksanakan oleh OPD pengampu karena keterbatasan anggaran ;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pelaksanaan program kegiatan menyangkut Indikator Kinerja Kunci (IKK) ;
3. Indikator kinerja IKK dalam LPPD banyak yang belum sinkron dengan dokumen perencanaan.

Strategi pemecahan masalah :

1. Memprioritaskan anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan ;
2. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk pelaksanaan program kegiatan menyangkut Indikator Kinerja Kunci (IKK) ;
3. Sinkronisasi Indikator kinerja IKK dalam LPPD dengan dokumen perencanaan.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menunjang target pencapaian indikator kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya untuk nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.72
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023

IKU	Program	Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Nilai LPPD	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2023	Rp.126.072.000	Rp.121.426.552	96,31%

Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Nilai LPPD

Pemerintah Daerah melakukan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD untuk memperoleh capaian nilai LPPD yang lebih baik. Adapun upaya yang dilakukan diantaranya :

- (1) Pengumpulan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang diampu oleh seluruh OPD terkait ;
- (2) Reviu terhadap data Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman ;
- (3) Melaksanakan workshop atau bimbingan teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- (4) Finalisasi penyusunan LPPD Kabupaten Padang Pariaman.



SASARAN STRATEGIS 13

Birokrasi Yang Efisien dan Efektif (Kapabel)

Sasaran Strategis “Birokrasi Yang Efisien dan Efektif (Kapabel)” merupakan turunan dari Misi ke-5 Kabupaten Padang Pariaman. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Indeks E-Government/SPBE”. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Nilai Indeks SPBE ditentukan berdasarkan hasil Evaluasi dari KemenpanRB terhadap seluruh K/L/D. Indeks SPBE ini diukur berdasarkan tingkat kematangan berdasarkan struktur domain (terdiri dari empat (4) domain), aspek (terdiri dari delapan (8) aspek) dan indikator (terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator). Keempat domain meliputi Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan SPBE. Berikut merupakan formulasi pengukuran indeks SPBE adalah sebagai berikut :

Formulasi = **Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB**

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2023

Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman pada 2023 mencapai 2,60. Nilai tersebut sudah masuk kategori baik, namun perlu didorong lagi. Terlebih, mulai 2021 ada indikator yang baru sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Poin-poin yang ada di Permenpan RB Nomor 59 itu meliputi domain kebijakan SPBE, domain tata kelola SPBE, domain manajemen SPBE, dan domain layanan SPBE. Berikut perbandingan target dan realisasi capaian kinerja tahun 2023 :

Tabel 3.73
Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2023		%	Interpestasi
		Target	Realisasi		
1	Indeks E-Government/SPBE	2,76	2,62	94,93	Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada tahun 2023, upaya untuk peningkatan capaian pada IKU ini dilakukan sesuai target dan standar penilaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Menteri

PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 2,62 dari target 2,76 yang ditetapkan dengan kategori “Berhasil”. Berikut Keputusan Kemenpan RB Nomor 13 Tahun 2024 terkait Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.74
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2023

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	4,17	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota	3,29	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,22	Baik
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik
5	Pemerintah Kabupaten Solok	3,49	Baik
6	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,17	Baik
7	Pemerintah Kota Padang	3,54	Sangat Baik
8	Pemerintah Kota Sawahlunto	3,09	Baik
9	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,92	Baik
10	Pemerintah Kota Solok	3,37	Baik
11	Pemerintah Kota Pariaman	2,65	Baik
12	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
13	Pemerintah Kota Bukit Tinggi	2,49	Cukup
14	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
15	Pemerintah Kabupaten Agam	2,55	Cukup
16	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
17	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
18	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
19	Pemerintah Kab. Pasaman	2,38	Cukup

Sumber : Keputusan Kemenpan RB Nomor 13 Tahun 2024

(b) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan capaian realisasi Nilai SPBE tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.75
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	2022		2023		%	Interpestasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks E-Government/ SPBE	2,44	2,68	2,76	2,62	94,93	Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Meskipun belum 100% tercapai Pada Tahun 2023, namun upaya untuk meningkatkan nilai sudah dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya partisipasi dan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal stakeholder yang terkait dalam penilaian SPBE.

Untuk mendukung penilaian ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman harus melengkapi seluruh evidence yang diminta KemenpanRB saat dilakukan evaluasi mandiri pada Aplikasi Monitoring Evaluasi SPBE dari KemenpanRB. Namun atas kerja keras dan usaha yang telah dilaksanakan, berdasarkan Kepmen PAN & RB Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima Indeks 2,62.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan mencapai nilai 2,76 pada penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 ini. Berpatokan kepada hasil yang diperoleh, maka dapat dipastikan pelayanan kepada masyarakat pun meningkat, meskipun nilai yang diperoleh masih belum mencapai target.

Tabel 3.76
Predikat Nasional Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.77
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks E-Government/SPBE	Nilai	2,15	2,44	2,76	2,60	2,68	2,62

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks E-Government/SPBE” pada tahun 2021 yaitu 2,60 dengan target RPJMD sebesar 2,15. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan 2,68 dengan target RPJMD 2,44. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 2,62 target RPJMD 2,76. Capaian tahun 2023 belum memenuhi target yang di tetapkan pada RPJMD, namun jika dilihat dari perolehan Indeks E-Government/SPBE Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan sebesar 0,02.

d) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Nasional dan Kabupaten Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi standar nasional dengan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.78
Capaian Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Standar Nasional
Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Standar Nasional	Realisasi Kabupaten Tahun 2023	%	Interpretasi
Indeks E-Government/SPBE	Nilai	4	2,62	65,50	Cukup Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dibandingkan dengan realiasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka Nilai Indeks SPBE yang diperoleh terlihat baik. Karena dengan penetapan Skala 4 (empat) tertinggi, pada tahun 2023 saja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mampu meraih 65.5% realisasi dari target yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun 2024 hasilnya mampu melampau nilai yang diraih pada tahun 2023.

e) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi total dana sebanyak Rp. 7.895.306.035,- dengan proyeksi/komposisi anggaran tersebut, tidak semua dialokasikan untuk pencapaian IKU tersebut. Dengan segala daya dan upaya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meng-efisiensikan Sumber Daya yang ada.

Berikut kesenjangan atas efisiensi penggunaan Sumber Daya yang ditemui selama kurun waktu tahun 2023 :

➤ KEBIJAKAN DAN TATAKELOLA

- Belum ditetapkannya arsitektur SPBE
- Pada tingkat strategis belum ada Tim Pengarah yang merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengembangan SPBE.
- Kurangnya peran serta tim pengarah dan tim koordinasi dalam pengembangan SPBE
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan SPBE tidak ada, hal ini merupakan konsekuensi logis ketiadaan Tim Pengarah pada tingkat strategis.
- Belum terdapat perencanaan dan pelaksanaan pengendalian risiko SPBE secara sistematis.
- Kurangnya Regulasi dalam implementasi SPBE;
- Operasional kegiatan Sistem Informasi dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing Perangkat Daerah

➤ SUMBER DAYA MANUSIA

- Jumlah sumber daya manusia SPBE secara keseluruhan masih kurang. Termasuk untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola dan pengembang semua sistem .
- Ketersediaan sumber daya manusia SPBE yang belum mampu memenuhi seluruh aspek penerapan sistem informasi;

- c. Kesulitan yang sering timbul akibat dinamika organisasi (mis. mutasi, promosi ke bidang lain, dsb.) pada sumber daya manusia SPBE, sementara tenaga pengganti belum tersedia.

➤ **APLIKASI LAYANAN SPBE**

- a. Belum tersedia perencanaan sistem informasi yang up-to-date pada tingkat strategis, yang melingkupi seluruh lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.
- b. Belum tersedia arsitektur rinci yang mendefinisikan kebutuhan dan interaksi antar sistem aplikasi.
- c. Belum tersedia panduan dan/atau rujukan bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam pengembangan sistem informasi.
- d. Belum tersedia kebijakan, standar, dan prosedur pada pengembangan sistem informasi misalnya terkait dengan manajemen proyek/kegiatan, penjaminan kualitas, manajemen konfigurasi, manajemen perubahan, dan sebagainya.
- e. Belum tersedia kerangka koordinasi pengembangan sistem informasi yang dapat dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informasi Pemerintah Daerah Padang Pariaman.

➤ **INFRASTRUKTUR SPBE**

- a. Jaringan lokal antar Perangkat Daerah tidak semuanya berfungsi dengan baik karena pemanfaatannya belum optimal;
- b. Belum terdapat kebijakan yang secara formal mengatur pengelolaan infrastruktur jaringan serta kebijakan dan standar yang mengatur pengelolaan tingkat ketersediaan layanan (Service Level Management) pada penyelenggaraan infrastruktur jaringan;
- c. Belum terdapat dokumentasi perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan yang disepakati dan tersosialisasi dengan baik;
- d. Data center sebagai pusat sumber daya data dan informasi sudah tersedia tetapi perlu dioptimalkan dan belum semua aplikasi di simpan pada data center sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharannya.
- e. Jaringan Internet sudah terkoneksi keseluruh OPD , kecamatan dan puskesmas tetapi akses internetnya belum maksimal

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.79

Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

1.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
	Tahun	2022 2023
	Jumlah Anggaran	2.959.643.470 2.767.044.650

2.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	
	Tahun	2022	2023
	Jumlah Anggaran	183.466.190	47.499.000
3.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	
	Tahun	2022	2023
	Jumlah Anggaran	28.878.510	24.433.350
4.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	Tahun	2022	2023
	Jumlah Anggaran	32.172.000	36.350.000
5.	Program	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
	Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	
	Tahun	2022	2023
	Jumlah Anggaran	27.183.530	22.600.000
6.	Program	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
	Tahun	2022	2023
	Jumlah Anggaran	33.985.150	38.114.000
7.	Program	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	
	Tahun	2022	2023
	Jumlah Anggaran	38.099.815	27.710.000

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Keberhasilan pencapaian target indeks SPBE Tahun 2023, didukung dengan pemenuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang berdampak kepada SPBE. Dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2023, SPBE Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, namun belum dapat meningkatkan capaian target yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Berdasarkan hasil penilaian SPBE Kabupaten Padang Pariaman, dari 4 Domain SPBE yang dinilai, Padang Pariaman baik dalam pelaksanaan 2 aspek yaitu aspek kebijakan dan aspek layanan. Sedangkan 2 aspek lagi masih bernilai rendah yaitu aspek Tata Kelola dan Aspek Manajemen. Dengan demikian untuk meningkatkan indeks SPBE dibutuhkan dukungan SDM dan anggaran yang memadai untuk meningkatkan dua aspek yang masih bernilai kurang dimaksud.

Gambar 3.94
Peresmian Command Centre Kabupaten Padang Pariaman



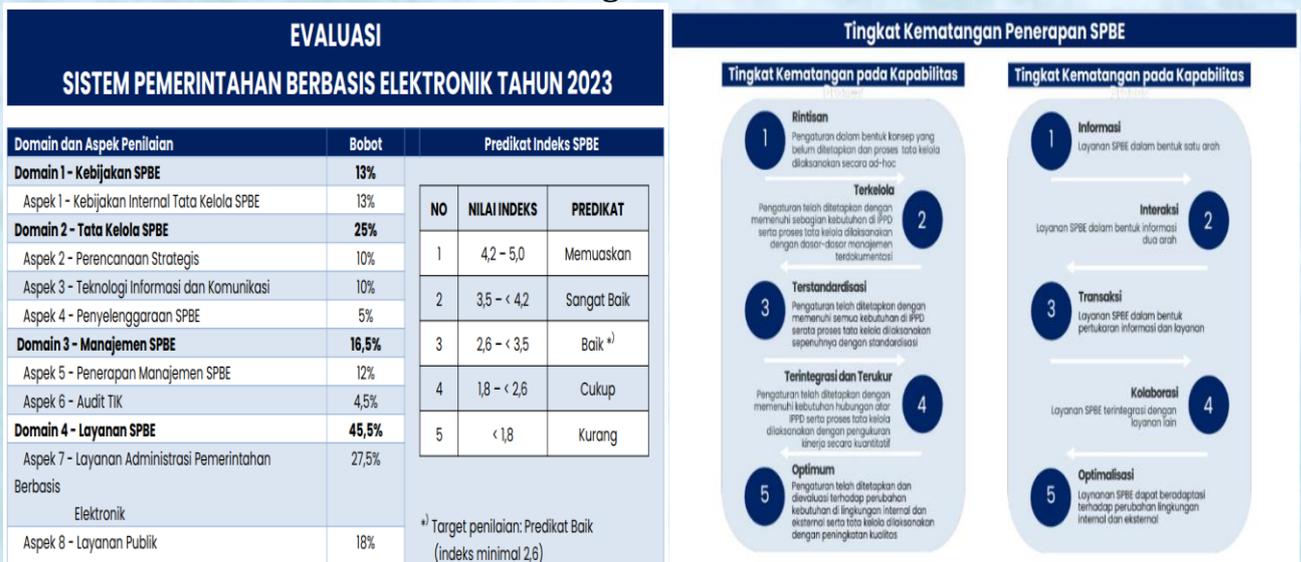
Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023

f) Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IKU

- **Metodologi Evaluasi SPBE**

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

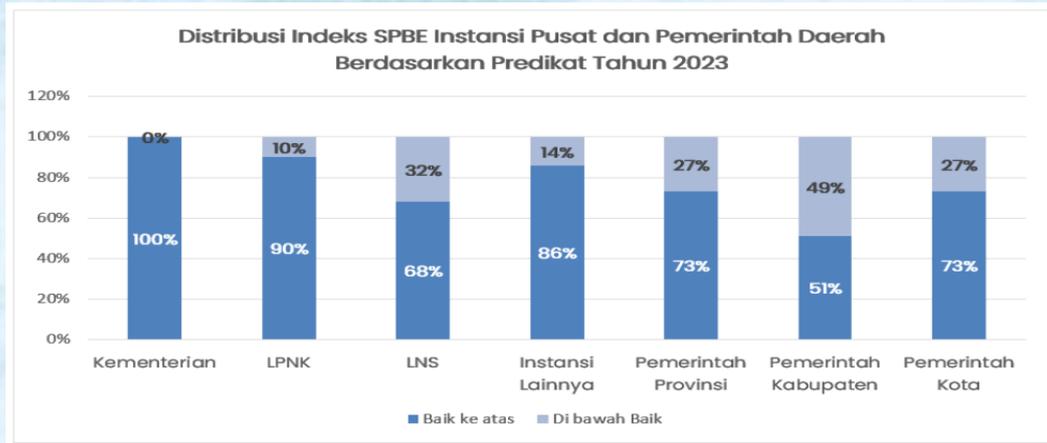
Gambar 3.95
Metodologi Penilaian SPBE



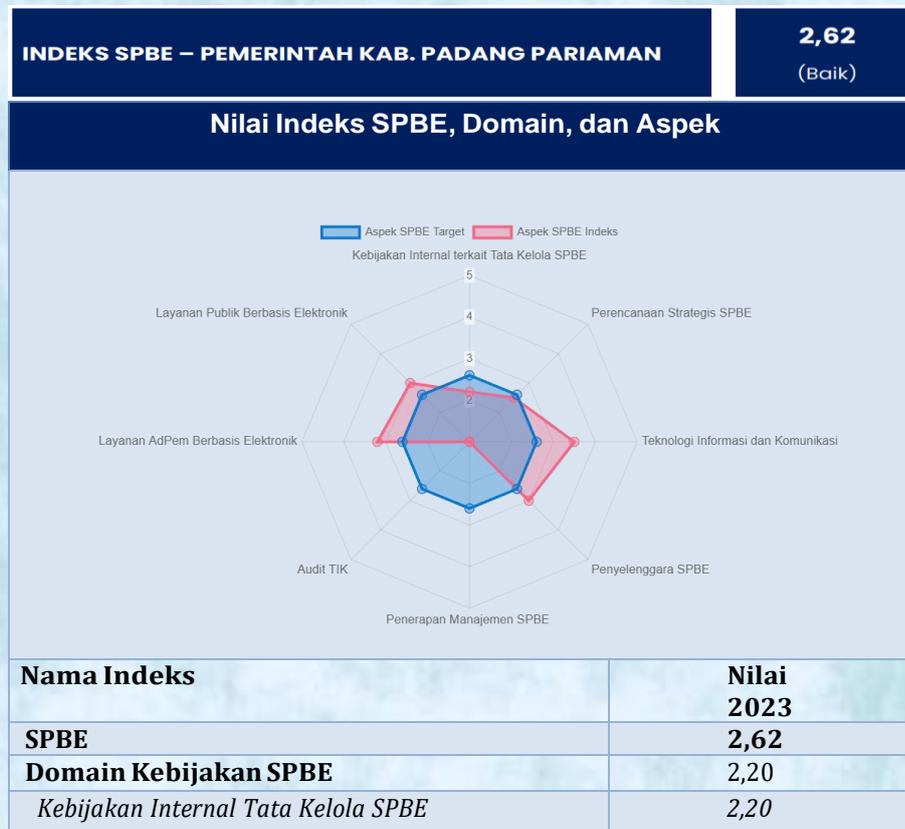


PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023



Domain Tata Kelola SPBE	3,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	3,12
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,20
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,00

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- **Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman mencakup Kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana, dan Audit TIK

- Kekuatan

Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE yang sudah mencakup 6 Domain Arsitektur secara lengkap.

- Kelemahan

Ada 2 indikator dalam Kebijakan Internal yang dimiliki oleh Pemkab Padang Pariaman yang memiliki tingkat kematangan 1-2 yaitu Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi (belum mengatur siklus pembangunan aplikasi secara lengkap serta belum mengatur terkait koordinasi dengan unit pengelola TIK di IPPD), Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, Sistem Penghubung Layanan (belum mengatur penggunaannya untuk IPPD), Manajemen Keamanan Informasi (belum mencakup cakupan MKI secara lengkap) dan belum mengatur tentang Tim Koordinasi SPBE.

- **Perencanaan Strategis SPBE**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman mencakup ketersediaan Dokumen Arsitektur, Peta Rencana, dan Inovasi Proses Bisnis

- Kekuatan

Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE belum ada yang mencapai tingkat kematangan 4-5 oleh sebab itu belum ada kekuatan dalam aspek ini.

- Kelemahan

Semua indikator SPBE Pemkab Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 karena Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE IPPD secara lengkap, masterplan tidak/belum mencakup muatan Peta Rencana SPBE IPPD secara lengkap, belum terlihat adanya rencana dan anggaran SPBE.

- **Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman mencakup Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- **Kekuatan**
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ada 1 indikator yang mencapai tingkat kematangan 4-5 yaitu Layanan Jaringan Intra IPPD yang sudah digunakan oleh semua unit di IPPD dan telah dilakukan review
- **Kelemahan**
Ada 2 indikator SPBE Pemkab Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 yaitu Pembangunan Aplikasi (belum ada bukti konsultasi kepada unit pengelola TIK di IPPD) dan Layanan Pusat Data (data center sudah ada secara virtual di PDNS, namun baru digunakan oleh sebagian IPPD)
- **Penyelenggara SPBE**
Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman mencakup Tim Koordinasi dan Kolaborasi Penerapan SPBE.
 - **Kekuatan**
Pada Aspek Penyelenggara SPBE belum ada yang mencapai tingkat kematangan 4-5 oleh sebab itu belum ada kekuatan dalam aspek ini.
 - **Kelemahan**
Semua indikator SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 yaitu karena Tim Koordinasi yang sudah terbentuk belum memiliki program kerja yang terencana serta bukti pelaksanaan dari program kerja tersebut sedangkan Tim kolaborasi belum dengan formal ditetapkan (beda dengan tim koordinasi).
- **Penerapan Manajemen SPBE**
Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum ada yang dipenuhi oleh Kabupaten Padang Pariaman.
 - **Kekuatan**
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum ada yang mencapai tingkat kematangan 4-5 oleh sebab itu belum ada kekuatan dalam aspek ini.
 - **Kelemahan**
Semua indikator SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 yaitu karena belum tertuang di dalam Dokumen Peta Rencana.
- **Audit TIK**
Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK belum ada yang dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman.
 - **Kekuatan**
Pada Aspek Audit TIK belum ada yang mencapai tingkat kematangan 4-5 oleh sebab itu belum ada kekuatan dalam aspek ini.
 - **Kelemahan**
Semua indikator SPBE Pemkab Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 karena belum tertulis di Dokumen Peta Rencana.

- **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman mencakup Layanan Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan BMN/D, Pengawasan Internal, dan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ada 1 yang mencapai tingkat kematangan 4-5 yaitu Layanan Perencanaan

- Kelemahan

Ada 5 indikator SPBE Pemkab Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 yaitu Layanan Penganggaran, Keuangan, Kepegawaian, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Pengawasan Internal.

- **Layanan Publik Berbasis Elektronik**

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Padang Pariaman mencakup Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, JDIH, Layanan E-BPHTB, DUKCAPIL CERIA MOBILE dan SIKDA Generik (Dokter di Puskesmas).

- Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ada 2 yang mencapai tingkat kematangan 4-5 yaitu Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N Lapor) dan E_BPHTB (sudah ada kolaborasi dengan layanan elektronik lain dan sudah ada evaluasi dan pembaharuan aplikasi)

- Kelemahan

Ada 2 indikator SPBE Pemkab Padang Pariaman pada aspek ini yang memiliki tingkat kematangan 1-2 yaitu Layanan Data Terbuka (data dukung tidak sesuai) dan JDIH (belum ada menu untuk persetujuan atau tanda tangan digital).

g) Penghargaan Yang Diraih

Gambar 3.96
Penghargaan Kabupaten Terinformatif
pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2023



SASARAN STRATEGIS 14

Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas

Birokrasi merupakan suatu jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Misi Kabupaten yang Ke-5 terkait Sasaran Strategis Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, Dan Transparan”. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja pelayanan publik itu sendiri, diantaranya faktor individu birokrat penyelenggara pelayanan, faktor organisasi penyelenggara pelayanan dan faktor sistem dalam penyelenggara pelayanan publik. Guna mewujudkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas dalam penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dipahami dan dicermati serta dilesaikan dengan baik kondisi faktor-faktor tersebut agar kualitas pelayanan publik yang prima dapat terwujud.

a) Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.80
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,66	3,88	83,26	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2023 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai 3,88 kategori “B” atau Baik, dengan rincian : Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak memperoleh nilai 4,11 kategori “A-” atau Sangat Baik, Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman memperoleh nilai 4,63 kategori “A” atau Pelayanan Prima dan Kecamatan Lubuk Alung memperoleh nilai 2,89 kategori “C” atau Cukup. Perangkat Daerah yang menjadi lokus evaluasi KemenPANRB untuk penilaian penyelenggaraan publik pada Tahun 2023 berbeda

dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 yang menjadi lokus evaluasi adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sedangkan pada tahun 2023 terdapat 3 Unit Penyelenggara Pelayanan yang menjadi lokus evaluasi, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (sebagai pelayanan barang), Rumah Sakit Umum Daerah (sebagai pelayanan jasa) dan Kecamatan (sebagai pelayanan administrasi). Dengan demikian, realisasi tahun 2023 nilai indeks pelayanan publik hanya terealisasi sebesar 3,88 dengan capaian hanya 84,9%. Indeks pelayanan publik adalah nilai indeks pelayanan publik hasil evaluasi KemenPANRB. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

**Formulasi Pengukuran = Nilai Indeks Pelayanan Publik
Hasil Evaluasi KemenPANRB**

b) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.81
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Selisih (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,65	4,66	3,88	83,26	Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebesar 4,65 dengan Kategori “A” atau Pelayanan Prima, dengan rincian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 4,74 dengan Kategori “A” atau Pelayanan Prima dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memperoleh nilai 4,56 kategori “A” atau Pelayanan Prima, sehingga presentase capaian tahun 2022 sebesar 101,97%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan indeks pelayanan publik dimana presentase capaian hanya sebesar 83,26% dari target yang ditetapkan sebesar 4,66 hanya terealisasi sebesar 3,88 mengalami selisih penurunan indeks capaian kinerja sebesar 18,71% dari tahun sebelumnya.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.82
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,56	4,57	4,49	4,65	3,88

Realisasi Indikator Kinerja “Indeks Pelayanan Publik” pada tahun 2021 yaitu 4,49 dengan target RPJMD sebesar 4,56. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 4,65 dengan target RPJMD 4,56. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami penurunan menjadi 3,88 dengan target RPJMD 4,57. Capaian tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD karena adanya perubahan pada Lokus yang dievaluasi oleh Kemenpan RB.

d) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Provinsi dan Kabupaten Tahun 2023

Adapun perbandingan capaian realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” Provinsi dan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.83
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2023	Realisasi Kinerja Kabupaten Tahun 2023	Selisih
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,34	3,88	0,54

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Grafik 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten dan Provinsi Tahun 2023



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Nilai Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 realisasinya sebesar 3,34 dengan Kategori “Baik dengan Catatan”. Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2023 yang diperoleh Kabupaten Padang Pariaman lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi Provinsi, dimana Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai 3,88 dengan kategori “B” atau Baik .

e) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penunjang IKU

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna layanan, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan,

namun dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB pada tahun sebelumnya sebagai salah satu patokan dalam perbaikan pelayanan.
3. Bagian Organisasi berupaya melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan serta pendampingan terhadap UKPP yang menjadi lokus evaluasi.
4. Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/yang dinilai, termasuk juga komitmen dari Kepala Dinas terkait/UKPP dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan di UKPP.
2. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kompetensi jabatan pada UKPP.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
4. Lokus evaluasi yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

f) Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Anggaran Rp. 50.000.000 dan realisasi anggarannya Rp. 49.062.000 atau dengan persentase 98,12%. Hasil dari SKM ini menjadi salah satu patokan atau standar perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tertuang sebagai janji perbaikan layanan pada UKPP.

Gambar 3.97
Publikasi Hasil SKM dan Sosialisasi Pelaksanaan SKM



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- ✓ Sub Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana dengan Anggaran Rp. 29.994.875 dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 43.903.967 atau dengan persentase 97,53%. Salah satu yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI setiap tahunnya. Tahun 2023 hasil penilaian Kepatuhan penyelenggaraan pelayanan Padang Pariaman berada pada Zona Hijau dengan indeks kepatuhan rata-rata 81,23 opini kepatuhan kualitas tinggi. Hasil penilaian tersebut menjadi bagian terpenting dalam pengukuran/indikator perbaikan standar pelayanan pada UKPP.

Gambar 3.98
Penganugerahan Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI yang diberikan oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2023

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 917.585.329,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 155.033.200. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 27,63%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 diperoleh efisiensi sebesar 1,66% (anggaran sebesar Rp 3.382.673.042,108 realisasi sebesar Rp 3.326.569.574.317). Persentase efisiensi ini secara teori jauh lebih besar dibandingkan tahun 2022, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya serta pada kegiatan dan hasil nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya.

h) Upaya Penunjang IKU

Salah satu upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit penyelenggara pelayanan. Pelaksanaan survei sesuai Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit penyelenggara pelayanan dilaksanakan minimal 1 kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan bertujuan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2023 indeks rata-rata IKM Padang Pariaman adalah 85,12 dengan mutu pelayanan B (Baik).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan indikator dan metodologi Survei yang sudah ditentukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Persiapan (menyusun instrumen survei, besaran dan teknik sampling, responden)
2. Pengumpulan data
3. Pengolahan data
4. Analisis hasil/evaluasi hasil
5. Pelaporan dan publikasi

i) Peran Dinas Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di dapatkan dari hasil penilaian Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenPANRB ditahun berjalan. Penyerahan hasil penilaian tersebut disertai dengan rekomendasi perbaikan layanan bagi aspek yang belum terpenuhi oleh UKPP yang dinilai (DinsosP3A, RSUD Padang Pariaman dan Kecamatan Lubuk Alung). Sebagai lokus dari penilaian tersebut, kecamatan Lubuk Alung sebagai pelayanan administrasi harus melakukan pembenahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 dan Pedoman MenpanRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik agar berupaya memenuhi aspek layanan.

Pada tahun 2023, berdasarkan Hasil Keputusan MenPANRB Nomor 795 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN Tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan Indeks Pelayanan Publik. Hal ini dikarenakan Lokus Evaluasi yang berbeda dan Kecamatan sebagai lokus yang baru dievaluasi untuk pertama kali menyebabkan UKPP memulai mengupayakan pelayanan sesuai dengan Standar yang telah ditentukan. Hambatan yang terjadi terkhusus pada ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan, informasi pelayanan dan beberapa kebijakan pelayanan yang perlu lebih ditingkatkan.



SASARAN STRATEGIS 15

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis “Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” merupakan turunan dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang Ke-6 yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini adalah “Angka Usia Harapan Hidup”.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kesehatan pada masyarakat, Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2023. Salah satunya adalah meningkatkan angka Usia Harapan Hidup.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.84
Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69,89	69,70	99,73	Berhasil

Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Formulasi pengukuran realisasi kinerja indikator Angka Usia Harapan Hidup adalah sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yaitu 69.70 tahun sedangkan target yang ditetapkan adalah 69.89 tahun. Capaian kinerja Angka Usia Harapan Hidup aslah sebesar 99,73% dengan kategori **“Berhasil”**. Artinya, angka harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 mempunyai harapan hidup selama 69.70 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai Usia 69.70 tahun pada tahun kedepan.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2022 dengan Tahun 2023:

Tabel 3.85
Perbandingan Target dan Realisasi UHH
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%	
Usia Harapan Hidup	Tahun	68.99	69.34	100.51	69.89	69.70	99,73	Berhasil

Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian UHH tahun 2022 yaitu sebesar 0.36, namun belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 69,89 Tahun.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.86
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

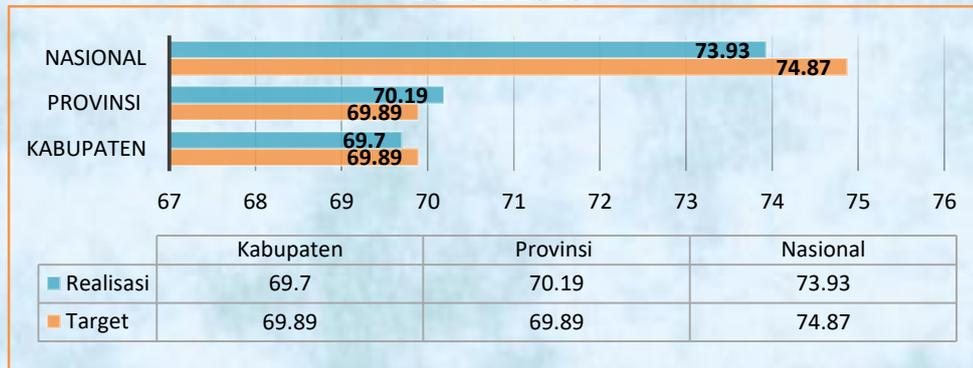
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Usia Harapan Hidup	Tahun	68,89	68,99	69,29	68,97	69,34	69,70

Realisasi Indikator Kinerja “Usia Harapan Hidup” pada tahun 2021 yaitu 68,97 Tahun dengan target RPJMD sebesar 68,89 Tahun. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 69,34 Tahun dengan target RPJMD 68,99 Tahun. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja meningkat menjadi 69,70 Tahun dengan target RPJMD 69,29 Tahun.

d) Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2023

Adapun perbandingan terkait hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14
Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2023

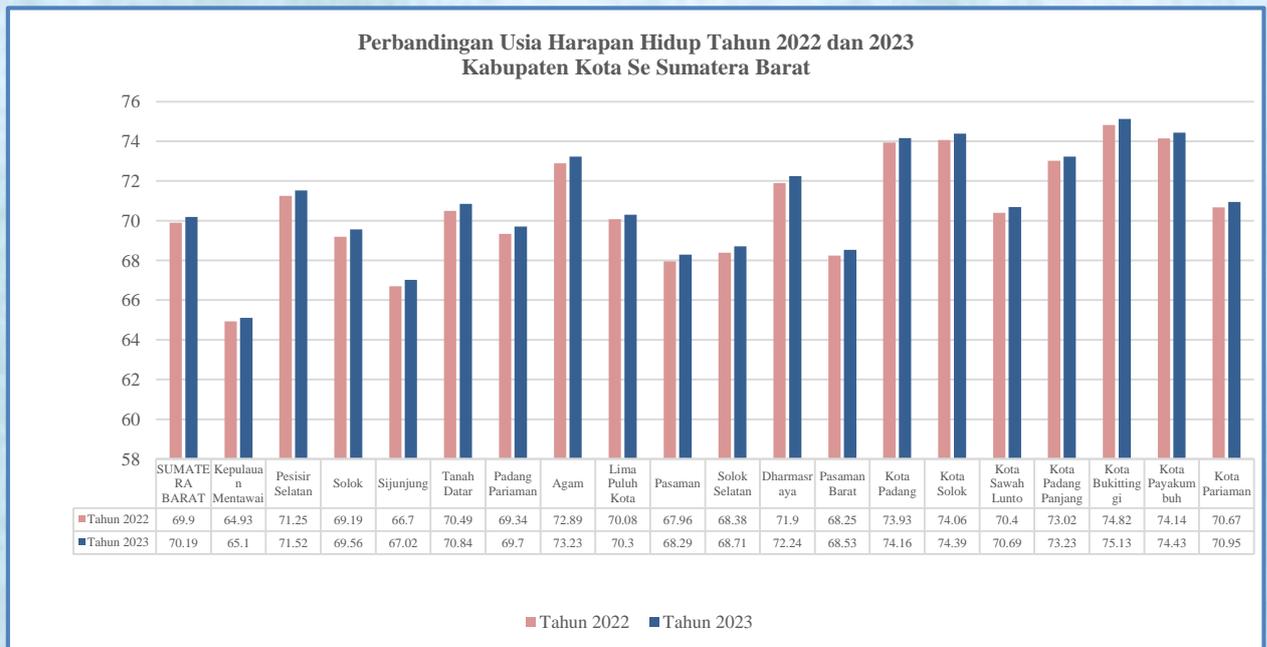


Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dimana realisasi Kabupaten sebesar 69,7 Tahun belum melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 69,89 Tahun dengan persentase keberhasilan mencapai 99,73%. Sedangkan realisasi nasional sebesar 73,93 Tahun dari target 74,87 Tahun dengan persentase capaian sebesar 98,74% dan realisasi pada Provinsi Sumatera Barat yaitu 70,19 dari target 69,89 Tahun dengan persentase capaian sebesar 100,43%.

Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup di 19 Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.15
Capaian UHH 19 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan 2023



Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa terlihat bahwa 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan UHH di tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022. UHH yang tertinggi pada tahun 2023 yaitu Kota Bukittinggi dengan capaian 75.13 Tahun.

e) Analisis Program dan Kegiatan Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 5 program adapun pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 93.704.638.070,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 89.831.226.415,- atau sekitar 95.87% Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4.13% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 47.107.028.692,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 40.972.529.956,- atau sekitar 86.98 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 13.02 % yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.302.775.800,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 1.777.267.156,- atau sekitar 77.18% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 22.82% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 402.195.500,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 236.024.241,- berarti realisasi keuangan 58.68 % , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 41.32 % yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 718.855.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 698.703.916,- atau sekitar 97.20% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 2.80% , yang termasuk dalam program ini adalah kegiatan :

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

f) (Upaya Yang Dilakukan Untuk Pencapaian IKU Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

1. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerapkan SPM Bidang Kesehatan, karena kesehatan adalah hak azasi manusia yang harus dipenuhi agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi.

Untuk meningkatkan capaian SPM, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan berbagai upaya selama tahun 2023. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, antara lain:

- a. Penyediaan rumah tunggu kelahiran
- b. Penyediaan sarana transportasi rujukan
- c. Adanya kegiatan audit maternal perinatal untuk membahas kasus-kasus kematian yg terjadi pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir
- d. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan ke puskesmas (optimalisasi pws KIA dan e Kohort)
- e. Melakukan pendampingan tim ahli (dokter spesialis obgyn dan anak) yg dilakukan ke setiap puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- f. Dan adanya *On The Job Training* kasus kegawatdaruratan ibu dan anak bagi tenaga kesehatan di puskesmas tujuannya untuk meningkatkan SDM Nakes dalam melakukan pelayanan kegawatdaruratan pada ibu dan bayi agar dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
- g. Melaksanakan sosialisasi Permenkes Nomor 21 tahun 2021

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, antara lain:

- a. Tidak semua Puskesmas menggunakan sarana rumah tunggu kelahiran dan transportasi rujukan kegawatdaruratan pada ibu bersalin.
- b. Alat kegawatdaruratan belum digunakan secara maksimal.
- c. Belum semua puskesmas yang mempunyai sarana persalinana sesuai standar.
- d. Sasaran ibu bersalin tidak terdata karena domisilinya tidak di wilayah Puskesmas (*Underreporting*).
- e. Data sasaran Pusdatin terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan data riil di lapangan.

Gambar 3.99
Kunjungan Nifas



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.100
OJT Kegawatdaruratan dan Kegiatan Pendampingan Tim Ahli



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah :

- Melakukan kunjungan rumah pada neonatus
- Koordinasi dengan fasyankes terkait yang memberikan pelayanan pada bayi baru lahir
- Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kelengkapan kualitas pelayanan neonatus
- Peningkatan kemampuan petugas dalam memberikan layanan pada bayi baru lahir.

Adapun kendala yang di hadapi adalah:

- Banyak bidan desa yg tidak ada di tempat sehingga kunjungan rumah tidak terlaksana
- Kurangnya dukungan dari keluarga yang dikunjungi
- Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pelayanan pada bayi baru lahir.

Berikut ini dokumentasi kegiatan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah:

Gambar 3.101
Peningkatan Kemampuan Petugas



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

- **Prevalensi Stunting**

Upaya penurunan stunting dilakukan secara konvergensi, dengan melibatkan lintas sektor dan lintas program. Upaya yang dilakukan dalam bentuk intervensi spesifik dan sensitif, di mana intervensi sensitif mengambil peran sebesar 70% sedangkan intervensi spesifik mengambil peran sebesar 30%. Dinas Kesehatan melakukan intervensi spesifik berdasarkan Perwal Nomor 41 tahun 2021 tentang RAD 8000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan.

Sasaran intervensi sensitif dan spesifik stunting menurut Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting antara lain:

- **Remaja Putri**

Intervensi spesifik yang dilakukan pada remaja putri antara lain melakukan screening status Hb, melakukan screening kesehatan remaja di sekolah, adanya posyandu remaja di wilayah, pemberian suplemen Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri di sekolah dan di wilayah, skrining Penyakit Tidak Menular (PTM), KIE tentang anemia, pentingnya TTD, gizi seimbang, PHBS, Germas. Intervensi sensitifnya antara lain: Edukasi literasi gizi melalui kegiatan AKSI bergizi di sekolah, Posyandu Remaja.

- **Calon Pengantin**

Intervensi spesifik yang dilakukan pada calon pengantin antara lain melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah di puskesmas, konseling gizi, konseling persiapan pernikahan melalui psikologi, suplementasi TTD untuk mencegah anemia dan suplemen asam folat untuk persiapan kehamilan. Sedangkan intervensi sensitif yang dilakukan pada calon pengantin antara lain pendataan calon pengantin oleh kelurahan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh KUA.

- **Ibu Hamil**

Intervensi spesifik yang dilakukan pada ibu hamil antara lain ANC terpadu, konseling gizi, kelas ibu, suplementasi TTD dan asam folat, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa biskuit untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK). Intervensi sensitifnya antara lain: Kader Pendampingan ibu hamil, peningkatan akses air minum yang aman, peningkatan akses sanitasi yang layak, akses jaminan kesehatan, akses bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu (PKH), pemberian bantuan protein hewani berupa telur, ayam, dan lele untuk ibu hamil.

- Ibu Menyusui

Intervensi spesifik yang dilakukan ibu menyusui antara lain Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk merangsang produksi ASI, pemberian TTD 40 tablet dan vitamin A dosis tinggi sebanyak 2 kapsul untuk memulihkan kesehatan ibu nifas, promosi dan konseling menyusui. Balita

Intervensi spesifik yang dilakukan pada balita antara lain:

- a. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di posyandu atau fasyankes
- b. Promosi dan konseling Pemberian Makan untuk Bayi dan Anak (PMBA)
- c. Suplementasi Vitamin A
- d. Suplementasi zinc untuk diare
- e. Tatalaksana gizi buruk akut
- f. Pencegahan kecacingan
- g. Pemberian Makanan Tambahan
- h. Imunisasi
- i. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Gambar 3.102

Kegiatan Bimtek Pencegahan STUNTING Menuju PAUD Berkualitas di INS Kayu Tanam



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.103

Penyuluhan dan Konseling Gizi (Asi eksklusif, MPASI, dan Pola Asuh Anak) di Nagari Toboh Gadang Selatan



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. Jumlah Kecamatan Sehat

Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 4 tatanan kabupaten/kota sehat, yaitu:

- a. Kawasan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Sehat
- b. Kawasan Pariwisata sehat
- c. Kehidupan Masyarakat sehat yang mandiri
- d. Ketahanan Pangan dan Gizi

Berikut ini adalah kecamatan yang sudah ikut dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat:

- a. Kecamatan Ulakan Tapakis
- b. Kecamatan 2 x 11 Kayutanam
- c. Kecamatan Enam Lingkung
- d. Kecamatan Lubuk Alung
- e. Kecamatan IV Koto Aur Malintang
- f. Kecamatan V Koto Kampung Dalam
- g. Kecamatan Sungai Limau
- h. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang
- i. Kecamatan Batang Anai
- j. Kecamatan Sungai Geringging
- k. Kecamatan Nan Sabaris

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Kabupaten Sehat adalah:

- a. Dana yang tersedia di DIPA Pengembangan dan tatanan Kabupaten Sehat Tahun 2022. sebagian besar dana terserap untuk sewa gedung dan biaya rapat.
- b. KKS Kabupaten Padang Pariaman belum bisa mengikuti penilaian karena belum mencapai akses sanitasi (ODF) 100%.
- c. SK Forum Kabupaten Sehat terkendala dengan Anggota kepengurusan
- d. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan karena belum rampungnya SK Forum dan SK tim Pembina Kabupaten Sehat

Dokumentasi kegiatan yang menunjang peningkatan jumlah kecamatan sehat, diantaranya:

Gambar 3.104
Forum Kabupaten Sehat



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.105
Pelantikan Tim Kabupaten Sehat



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

4. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat adalah Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah KK yang di data di wilayah kerja. Perhitungan Indeks Keluarga Sehat bertujuan untuk menentukan Tingkatan Keluarga menurut Status Kesehatan yang dimiliki keluarga tersebut. Indeks Keluarga Sehat dibagi menjadi 3 tingkatan :

- a. Keluarga Sehat : $> 0,80$
- b. Keluarga Pra-Sehat : $0,50-0,80$
- c. Keluarga Tidak Sehat : $< 0,50$

Adapun indikator keluarga sehat saat ini ditetapkan sebanyak 12 indikator sebagai berikut:

- a. Keluarga Mengikuti Program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta / akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
- b. Ibu Melakukan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0-11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Bidan Praktek Swasta).
- c. Bayi Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan) dan bayi tersebut mendapat imunisasi HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio 1, Polio 2, Polio 3, Polio 4, Campak.
- d. Bayi Mendapat ASI Eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0 - 6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI Eksklusif).
- e. Balita Mendapat Pemantauan Pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badanya di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/ Buku KIA.
- f. Penderita Tuberculosis Paru Mendapatkan Pengobatan Sesuai Standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita Tuberculosis (TB) Paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk Dokter/ Petugas Kesehatan.
- g. Penderita Hipertensi Melakukan Pengobatan Secara Teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis

- sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
- h. Penderita Gangguan Jiwa Mendapat Pengobatan dan Tidak Ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
 - i. Anggota Keluarga Tidak Ada Yang Merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.
 - j. Keluarga Sudah Menjadi Anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/ atau kepesertaan asuransi kesehatan lainnya
 - k. Keluarga Mempunyai Akses Sarana Air Bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air ledeng PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
 - l. Keluarga Memiliki Akses Atau Menggunakan Jamban Sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Berdasarkan data Aplikasi Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan, IKS Kabupaten Padang Pariaman berada pada nilai 0.15 dengan kategori tidak sehat. Walaupun melebihi target tapi Kabupaten Padang Pariaman masih masuk kategori Keluarga tidak sehat. Jumlah Kepala Keluarga (KK) 93.074 KK dengan sasaran jumlah KK yang sudah di entri ke aplikasi sebanyak 81.896 KK. Dengan rincian 10.537 KK kategori sehat, 51.215 KK kategori Pra-Sehat, dan 20.144 KK tidak sehat.

Faktor penghambat tidak tercapainya target ini adalah dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Puskesmas. Kendala yang paling sering dialami adalah aplikasi Keluarga Sehat tidak real time menangkap perubahan data yang dilaksanakan oleh Puskesmas, sehingga data-data yang diinput tidak terupdate secara langsung meskipun sudah melaksanakan update data intervensi lanjutan, sehingga nilai IKS tidak ada peningkatan.

Dengan kondisi seperti ini, Aplikasi Keluarga Sehat terkesan cukup lambat pergerakannya sehingga apa yang diinputkan tidak langsung terupdate bahkan hingga beberapa bulan. Kendala lainnya adalah adanya perbedaan data di aplikasi dengan data yang di aplikasi dengan yang diinput manual oleh petugas. Kemudian juga ada beberapa masyarakat yang meninggal atau pindah ketika dilakukan intervensi, sehingga kesulitan dalam tindak lanjut intervensi.

Dalam upaya meningkatkan capaian indikator sasaran kinerja cakupan keluarga dengan indikator keluarga sehat antara lain :

- a. koordinasi insentif lintas program disesuaikan dengan indikator PIS-PK yang mempunyai daya ungkit lebih besar dalam menaikkan IKS, termasuk salah satunya inovasi unggulan Dinas Kesehatan PAPA SEHAT “Padang Pariaman Sehat”.
- b. Meningkatkan cakupan total coverage pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang;
- c. Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga;
- d. Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor

- e. Mengusulkan realokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana, akomodasi serta alat perlindungan diri selama masa pandemi bagi petugas yang melakukan kunjungan keluarga;
- f. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan PUSDATIN Kementerian Kesehatan terkait kendala pada aplikasi keluarga sehat;
- g. Melaksanakan penguatan dan pembinaan PIS-PK bagi Puskesmas; serta
- h. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program PIS-PK di Puskesmas

Gambar 3.106
Monev PISPK



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

5. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kes) merupakan faktor penting dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu. Oleh karena itu, pengembangan SDM Kes merupakan faktor kunci dalam pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDG's) dan peningkatan status kesehatan masyarakat.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Standar ketenagaan adalah :

- a. Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik.
- b. Belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan tempat praktik bidan desa.
- c. Jumlah dan jenis kebutuhan ideal tenaga di Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan analisis beban kerja.

Gambar 3.107
Pelatihan Tenaga Kesehatan



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

6. Meningkatkan Kualitas Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis yang memproduksi pangan olahan hasil industri rumah tangga pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat penting peranannya bagi pertumbuhan, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta peningkatan kecerdasan masyarakat, oleh karena itu pengawasan keamanan pangan merupakan hak bagi masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kesehatan, pemerintah daerah berkewajiban dan berwenang untuk menyelenggarakan pengawasan makanan tersebut.

7. Meningkatkan Budaya Hidup Sehat

Derajat kesehatan masyarakat yang masih belum optimal tersebut di atas pada hakikatnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, pelayanan kesehatan dan genetika. Kalangan ilmuwan umumnya berpendapat bahwa determinan utama dari derajat kesehatan masyarakat tersebut, selain kondisi lingkungan, adalah perilaku masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Cakupan peningkatan rumah tangga ber-PHBS dengan menggunakan formulasi pengukuran jumlah rumah tangga sehat dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikali 100% , berdasarkan Permenkes No 2269/menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berikut adalah kegiatan UKBM & Promosi Kesehatan yang dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023, adalah:

- a. Posyandu
- b. Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- c. Desa Siaga Aktif
- d. Pembinaan Kader Posyandu sebagai Kader posyandu aktif
- e. Pembinaan Puskesmas Mampu Promosi Kesehatan
- f. Pembinaan posbindu PTM
- g. Pos Kesehatan Nagari (POSKESRI)
- h. Pelaksanaan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Gambar 3.108

Pelaksanaan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 133.515.751.684 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 144.235.493.062. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 7.43 % . Persentase efiseinsi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat di asumsikam bahwa pada tahun 2023 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber baya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

h) Penghargaan

Gambar 3.109

Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan dari Gubernur Sumatera Barat



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2023



SASARAN STRATEGIS 16

Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk

Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Penduduk” merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman yakni “ Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah “Laju Pertumbuhan Penduduk”. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan banyak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menekan besarnya angka laju pertumbuhan penduduk tersebut namun dirasa masih belum maksimal, diantaranya adalah mensosialisasikan dua anak lebih baik, pembagian alat kontrasepsi gratis, serta memberikan penyuluhan tentang penggunaan KB.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah Angka yang menunjukkan presentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai presentase dari penduduk. Guna dari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dalam 2 periode waktu. Pertumbuhan Penduduk juga adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.87
Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,70	1,7327	98,08	Berhasil

Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Adapun formulasi pengukuran realisasi kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah Penduduk Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 yaitu 1.7327% sedangkan target yang ditetapkan adalah 1,70% dengan kategori “**Berhasil**”, Artinya Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan tetapi persentase penambahan penduduk tidak terlalu signifikan karena masih dalam kategori “Berhasil” dengan pencapaian sebesar 98,08%.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.88
Perbandingan Target dan Realisasi LPP
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,39	1,7332	148,87	1,70	1,7327	98,08	Berhasil

Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2023 hampir sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 1,7327% hanya mengalami sedikit penurunan yaitu 0,005. Artinya pencapaian 2023 lebih baik dari tahun 2022.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.89
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

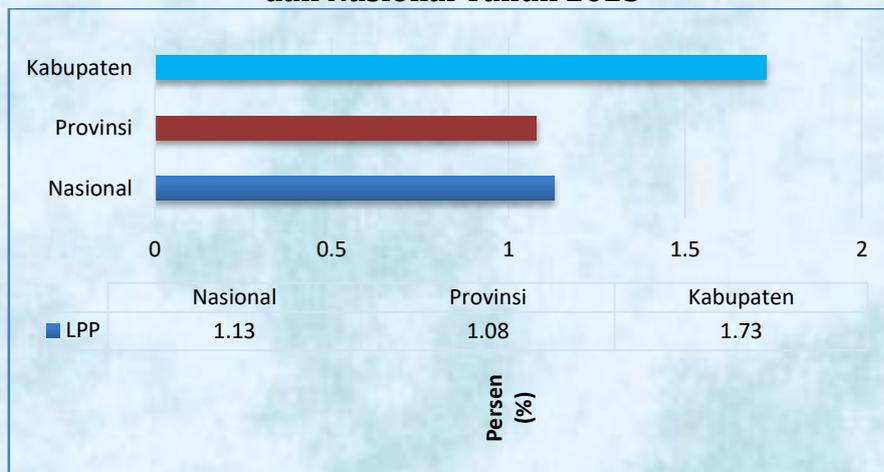
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	3,50	3,39	3,29	1,74	1,7332	1,7327

Realisasi Indikator Kinerja “Laju Pertumbuhan Penduduk” pada tahun 2021 yaitu 1,74% dengan target RPJMD sebesar 3,50%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi 1,7332% dengan target RPJMD sebesar 3,39%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja sebesar 1,7327% dengan target RPJMD 3,29%.

d) Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2023

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi berdasarkan realisasi nasional dan realisasi provinsi tahun 2023 :

Grafik 3.16
Perbandingan Realisasi LPP Kabupaten, Provinsi,
dan Nasional Tahun 2023



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dimana realisasi nasional tahun 2023 adalah 1,13 dan realisasi Provinsi sebesar 1.08. Sedangkan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1,7327 dengan capaian 98,08 %.

d) Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk bukan hanya tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, perangkat daerah Serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Laju Pertumbuhan Penduduk bisa diturunkan karena salah satunya adanya upaya pengendalian penduduk, upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan kepesertaan KB aktif, menurunkan angka melahirkan diusia remaja (15-19 Tahun), menurunkan total Fertility Rate (TFR) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepesertaan KB

Meningkatkan kepesertaan KB merupakan Program keluarga berencana (KB) yang telah dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dengan tujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan hal ini tentunya akan diikuti dengan menurunnya angka kelahiran karena Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam

serta banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan kesenjangan penyediaan bahan pangan dibandingkan jumlah penduduk.

Keberhasilan ini juga melibatkan peran serta dinas dan instansi terkait seperti :

- DINKES dan RSUD, terkait dengan pemberian pelayanan KB, penyediaan tenaga pelaksana KB, penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan KB;
- TNI (Kodim 0308), terkait dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaksanakan KB terutama metoda operasi pria (MOP);
- Organisasi Profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk keterlibatan memberikan pelayanan alat kontrasepsi kepada akseptor KB;
- Tim penggerak PKK Kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan dan Nagari, serta kader KB dalam bentuk menggerakkan masyarakat untuk aktif ber-KB.

Gambar 3.110
Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Menurunkan Angka Melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun

Upaya yang dilakukan adalah adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekali tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

Disamping itu jumlah umur wanita 15-19 Tahun yang melahirkan pada tahun 2023 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 45 orang, dan capaian Angka melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun pada tahun 2023 yaitu 2,42 per 1000 lebih rendah dibandingkan target yaitu 12 per 1000.

Keberhasilan ini juga didukung oleh kontribusi dinas dan instansi terkait antara lain:

- DISDUKCAPIL, terkait ketersediaan data penduduk menurut kelompok umur ;
- Seluruh Kecamatan dan Nagari, terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- KEMENAG, terkait dengan jumlah data wanita perkawinan pertama.

Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap remaja:

a. Pemilihan Duta Genre Kabupaten Padang Pariaman

Duta GenRe adalah ajang yang bergerak dibawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini mempertemukan remaja yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan memilih figur remaja berusia 16-22 tahun melalui proses seleksi yang ketat.

Gambar 3.111

Grand Final Pemilihan Duta GenRe Kab. Padang Pariaman



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

b. Pembinaan Terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)

Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah proses pendidikan dan informasi yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam membentuk individu yang sehat, harmonis, dan berkualitas.

Gambar 3.112

Kegiatan Bina Keluarga Balita



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3. Menurunnya Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan/*Total Fertility Rate* (TFR)

Faktor yang menyebabkan keberhasilan *Total Fertility Rate* (TFR) adalah ketersediaan alat-alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, adanya peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), adanya dukungan Petugas Lapangan KB, Meningkatnya akses layanan kontrasepsi, Adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekali tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain

Untuk mencapai penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) didukung oleh 3 program sebagai berikut :

- Program pengendalian penduduk
Terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
- Program pembinaan keluarga berencana
Terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
 - b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB atau PLKB).
 - c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

e) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana, dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.956.014.700,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 7.589.031.872,- atau sekitar 95,38% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebesar 4,62% .

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada data dibawah ini :

- 1 Program pengendalian penduduk pada tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 256.161.000 dan realisasinya sebesar Rp. 205.115.731 dengan persentase 80,1 %. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 385.100.000 dan realisasinya sebesar Rp. 353.013.650 dengan persentase 91,67 %.
- 2 Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 4.430.574.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.586.286.589 dengan persentase 77,4%. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 5.484.984.901 dan realisasinya sebesar Rp. 5.158.799.472 dengan persentase 94,05 %.
- 3 Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Tahun 2022, dengan pagu anggaran Rp. 1.964.580.000 dan realisasinya sebesar Rp. 715.460.848 dengan persentase 41% Sedangkan pada tahun 2023 anggaran program ini sebesar Rp. 2.085.559.900 dan realisasinya sebesar Rp. 2.077.218.750 dengan persentase 99.60 %.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan kepesertaan ber-KB, menurunkan angka kelahiran total dan menurunkan angka melahirkan di usia remaja 15-19 Tahun adalah sebesar Rp.7.589.031.872. Untuk mencapai target perlu adanya dana yang besar, Sumber dana untuk mendukung tercapainya program ini terdiri dari APBD, DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) dan DAK Fisik.

Dalam mencapai target indikator kinerja utama LPP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.7.956.014.700,- dengan 3 program 5 kegiatan dan 37 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp.6.651.315.000 dengan 3 program 5 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.4.506.863.168. Pada Tahun 2023 adanya kenaikan anggaran disebabkan oleh bertambahnya Dana BOKB sebesar Rp.4.911.371.000 dan DAK Fisik sebesar Rp.1.069.021.000.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Total anggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp.7.956.014.700,- dengan realisasi sebesar Rp.7.589.031.872 Dengan persentase sebesar 95,35 %. Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal sama dengan capaian keuangannya.

g) Alternatif Solusi Kedepan Untuk Pencapaian IKU

1. Meningkatkan penyuluhan KB secara merata
Salah satu cara yang telah terbukti efektif sebagai solusi untuk mengatasi kepadatan penduduk ialah dengan menggalakkan program keluarga berencana

atau KB. Keluarga Berencana adalah program yang dibuat pemerintah untuk rakyat Indonesia dengan membatasi jumlah anak, di mana dalam satu keluarga dianjurkan untuk cukup memiliki 2 orang anak saja.

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya Keluarga Berencana

Pelaksanaan strategi peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan melalui kerjasama yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Padang Pariaman dengan fasilitas kesehatan yang terdiri dari pemerintah, swasta, Dokter praktek serta Bidan praktek mandiri dengan melakukan pelayanan KB secara rutin.

3. Memperbanyak sosialisasi kepada remaja tentang bahaya pernikahan usia dini melalui kelompok PIK-R

Tujuan diadakannya dan dibentuknya PIK R untuk mengetahui strategi dan peran PIK R yang berkaitan dengan kesehatan remaja. Nantinya kelompok ini yang akan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang bahayanya pernikahan usia dini untuk pengupayakan pencegahan tingginya angka pernikahan dini. Sehingga dengan memperbanyak sosialisasi ini akan menurunkan angka melahirkan usia remaja dan dapat mencegah pernikahan dini sehingga dengan berkurangnya kelahiran dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

h) Penghargaan Yang Diperoleh Pada Tahun 2023

Gambar 3.113

Penghargaan dari BKKBN Pusat Untuk Bapak Ibu Bupati yaitu MKK (Manggala Karya Kencana) untuk kepala daerah dan Ibu ketua TP PKK



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.114
**Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Juara I Kategori Role Model Tempat
Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Terbaik
Tingkat Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.115
**Penghargaan Ayah Bunda GenRe Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 untuk Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP PKK**



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.116
**Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Juara 2 Duta GenRe Putra
Tingkat Provinsi Sumatera Barat**



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.117
Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Pembina GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.118
Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Juara Hafiz Putri Duta GenRe Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.119
Penghargaan Gubernur Sumatera Barat Pelaksanaan Audit Kasus Stunting (AKS) Terbaik Semester1 Tahun 2023 Tingkat Provinsi



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2023

**SASARAN STRATEGIS 17****Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum**

Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”.

Air minum merupakan hal yang krusial dalam kehidupan makhluk hidup di bumi. Air menjadi sumber kehidupan dan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Kebutuhan dasar tersebut harus dipenuhi dengan sistem penyediaan air minum yang berkualitas, sehat, efisien, efektif, dan terintegrasi kepada sektor sanitasi. Jika kebutuhan ini terpenuhi maka masyarakat dapat hidup sehat, produktif, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari merupakan salah satu indikator kinerja utama yang dipangku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.90
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	92	76,57	83,23	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Jika dilihat dari capaian diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” mendapatkan realisasi 76,57% dari target 90%. Persentase capaian yang didapatkan adalah 83,23% dengan kategori “Berhasil”.

b) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.91
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	90	72,05	80,05	92	76,57	83,23	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” dimana persentase capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 3,18%. Realisasi tahun 2022 72,05% dari target yang ditetapkan sebesar 90% dengan persentase capaian sebesar 80,05%. Sedangkan Realisasi tahun 2023 76,57% dari target yang ditetapkan sebesar 92% dengan persentase capaian sebesar 83,23% dan termasuk ke dalam kategori “Berhasil”.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.92
Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	88	90	92	72,05	72,05	76,57

Realisasi Indikator Kinerja “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” pada tahun 2021 yaitu 72,05% dengan target RPJMD sebesar 88%. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 72,05% dengan target RPJMD sebesar 90%. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi sebesar 76,57% dengan target RPJMD 92%.

d) Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”, terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik ;
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.
- Adanya Perubahan Sistem Penganggaran dari pemerintah pusat terhadap penggunaan dana DAU

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan SPAM ditingkat masyarakat ;
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SPAM.

Selain melakukan upaya-upaya pemecahan masalah, terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM ;
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan ;

e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum” pada tahun 2023 memiliki total anggaran sebesar Rp. 3.676.637.660,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.171.727.169,00. Realisasi kinerja yang tercapai pada tahun 2023 ini adalah sebanyak 1091 Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan berhasil dibuat yang tersebar pada beberapa lokasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini DPUPR berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Padang Pariaman dalam usulan penerima Sambungan Ruman (SR) yaitu dari data PDAM dan Juga data dari PAMSIMAS. Setelah pekerjaan sambungan rumah selesai pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PDAM dan untuk PAMSIMAS diserahkan ke Nagari.

f) Dokumentasi Kegiatan

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang mana pada tahun 2023 di Kabupaten Padang Pariaman dengan total 1091 Sambungan Rumah (SR) SPAM Jaringan Perpipaan.

Gambar 3.120
Pembangunan SPAM atau Peningkatan SPAM di Nagari Sunua



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2023

**SASARAN STRATEGIS 18**

Penguatan Layanan Kebencanaan

Sasaran Strategis Penguatan Layanan Kebencanaan merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Nagari Tangguh Bencana”. Nagari Tangguh Bencana yaitu nagari yang sudah mempunyai perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. Nagari tangguh bencana ini mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai Rencana Pengurangan Resiko Bencana (RPB)
- Mempunyai Peta Rawan Bencana
- Sudah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB)
- Sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Nagari tangguh bencana bertujuan untuk menjaga mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Berikut adalah perbandingan target dengan realisasi Indikator Kinerja Utama “Nagari Tangguh Bencana” tahun 2023 :

Tabel 3.93**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interprestasi
Nagari Tangguh Bencana	Nagari	17 Nagari	16 Nagari	94	Berhasil

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran strategis penguatan layanan kebencanaan indikator sasaran startegis tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai BPBD Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya, yaitu Jumlah Nagari Tangguh Bencana. Pada tahun 2023 target jumlah Nagari Tangguh Bencana yang akan dibentuk adalah 17 nagari yang merupakan jumlah akumulatif dari seluruh Nagari Tangguh Bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan kondisi pada akhir tahun 2023 sebanyak 17 Nagari Tangguh Bencana di Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga pada tahun 2023 harus terbentuk 1 nagari tangguh bencana agar tercapainya target yang

diinginkan. Adapun dalam realisasi tahun 2023 Nagari Tangguh Bencana yang menerima program IDRIP mencakup 6 Nagari yaitu Nagari Manggopoh Palak Gadang, Nagari Ulakan, Nagari Katapiang, Nagari Kuranji Hilir, Nagari Pilubang dan Nagari Malai V Suku.

Formulasi pengukuran dari indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Jumlah Nagari Tangguh Bencana

b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Utama Nagari Tangguh Bencana Tahun 2022 dan 2023 dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.94
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nagari Tangguh Bencana Tahun 2022 dan 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Nagari Tangguh Bencana	Nagari	16	16	100%	17	16	94%	Berhasil
		Nagari	Nagari		Nagari	Nagari		

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2022 terdapat 16 nagari tangguh bencana di seluruh Kabupaten Padang Pariaman yang telah dibentuk dan pada tahun 2023 tidak ada pembentukan nagari tangguh bencana baru yang difokuskan untuk peningkatan kapasitas bagi masyarakat yang berada didaerah rawan bencana untuk 6 Nagari Tangguh Bencana yang telah terbentuk melalui program IDRIP. Sehingga Nagari Tangguh Bencana yang telah dibentuk di Kabupaten Padang Pariaman sampai dengan tahun 2023 sebanyak 16 Nagari dengan persentase pencapaian 94%.

Grafik 3.17
Capaian Realisasi Indikator Kinera Utama Nagari Tangguh Bencana



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada grafik diatas kondisi awal RPJMD 2021-2026 jumlah Nagari Tangguh Bencana yang telah terbentuk di Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2021 secara keseluruhan terdapat 15 Nagari. Pada tahun akhir periode RPJMD ditargetkan terbentuk sebanyak 21 nagari tangguh bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, sehingga dapat di ketahui dalam jangka 6 tahun (2021- 2026) nagari tangguh bencana yang akan di bentuk sebanyak tujuh nagari tangguh bencana. Yang dimana pada tahun 2022 ditargetkan akan dibentuk sebanyak 1 Nagari Tangguh Bencana. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat realisasi pembentukan nagari tangguh bencana pada tahun 2022 telah terbentuk sebanyak 1 nagari, sehingga pada periode RPJMD 2021-2026 telah terbentuk sebanyak 2 Nagari tangguh bencana yang menjadikan total nagari tangguh bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang telah terbentuk menjadi sebanyak 16 Nagari Tangguh Bencana. Dan pada tahun 2023 hanya difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Nagari Tangguh Bencana melalui program IDRIP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak dilakukannya pembentukan Nagari Tangguh Bencana dan jumlah Nagari yang sudah terbentuk masih 16 Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.95

Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD

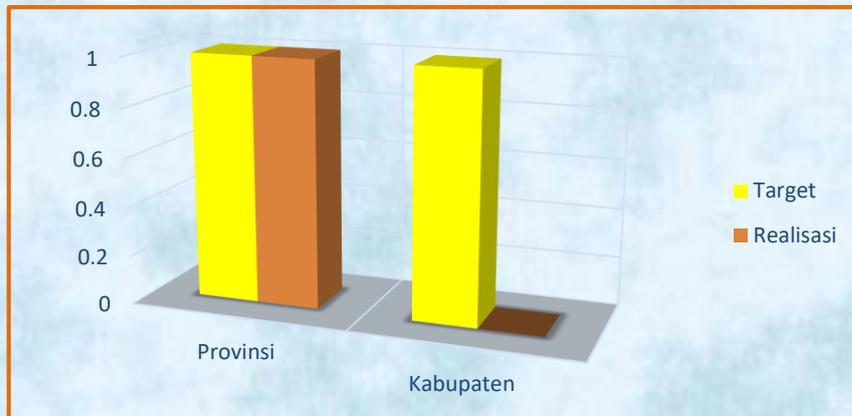
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nagari Tangguh Bencana	Nagari	15	16	17	15	16	16

Realisasi Indikator Kinerja “Nagari Tangguh Bencana” pada tahun 2021 yaitu 15 Nagari dengan target RPJMD sebesar 15 Nagari. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 16 Nagari dengan target RPJMD sebesar 16 Nagari. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja tidak mencapai target yang ditetapkan RPJMD Dimana realisasi sebesar 16 Nagari dengan target RPJMD 17 Nagari. Pada tahun 2023, hanya difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Nagari Tangguh Bencana melalui program IDRIP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak dilakukannya pembentukan Nagari Tangguh Bencana dan jumlah Nagari yang sudah terbentuk masih 16 Nagari di Wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

d) Perbandingan Realisasi Kabupaten dengan Target dan Realisasi Pada Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Adapun perbandingan realisasi Provinsi dengan Kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten
Tahun 2023



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024 ditargetkan setiap tahunnya akan di bentuk 10 Nagari Tangguh Bencana. Sedangkan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan Renstra BPBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 ditargetkan akan terbentuk 1 Nagari sehingga secara keseluruhan terdapat 17 Nagari Tangguh Bencana dan pada tahun 2023 Nagari Tangguh Bencana tidak terbentuk sehingga secara keseluruhan tetap 16 Nagari.

e) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung tercapainya peningkatan kapasitas nagari tangguh bencana pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.96

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja

Program
Penanggulangan Bencana
Kegiatan
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
Sub Kegiatan
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
Indikator
Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Pada tahun 2023, Untuk Kegiatan yang mendukung keberhasilan Nagari Tangguh Bencana telah di targetkan dalam Renstra 2021-2026, yang merupakan Indikator Kunci Utama (IKU) BPBD Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2023 untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki 11 (sebelas) inovasi sebagai berikut:

1. NAN SIGAB

Gambar 3.121
Inovasi NAN SIGAB



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Program Nagari Siaga dan Tanggap Bencana (NAN SIGAB) adalah pembentukan sebuah Nagari yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana;

2. SI SIGAB

Gambar 3.122
Inovasi SI SIGAB



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Program Srikandi Siaga Tanggap Bencana ini melihat potensi perempuan yang memiliki naluri kuat untuk selalu melindungi keluarganya serta aktif dalam kelompok sosial sehingga perempuan dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan bencana di dalam keluarga.

3. LENCANA

Gambar 3.123
Inovasi LENCANA

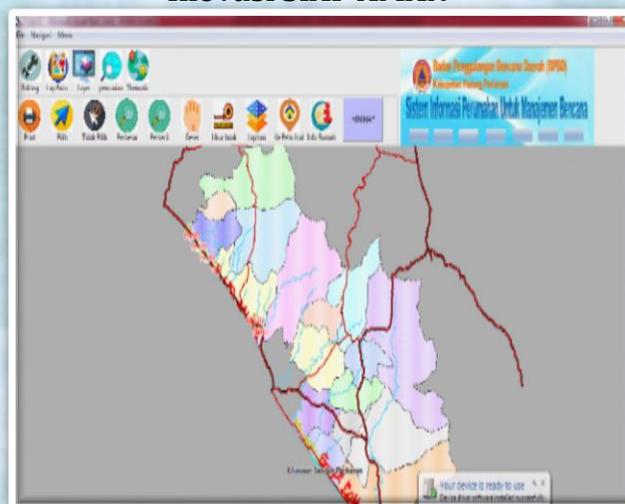


Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Analisa Rencana Pasca Bencana (LENCANA) adalah suatu rangkaian kegiatan meliputi analisa dan rencana untuk penanganan pasca bencana pada wilayah terdampak melalui upaya sosialisasi atau pembekalan kepada lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten yang ditindaklanjuti dengan pengaktifan tenaga terlatih.

4. SIAP AMAN

Gambar 3.124
Inovasi SIAP AMAN

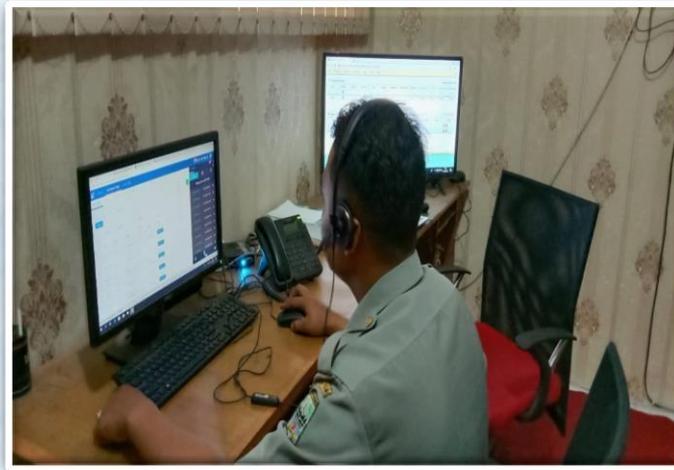


Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Program Sistem Aplikasi Perumahan Untuk Manajemen Bencana (SIAP AMAN) adalah sebuah inovasi yang melakukan penghimpunan kepada kondisi rumah atau bangunan yang berada di Kawasan yang rawan bencana dan disimpan dalam sebuah *database* aplikasi.

5. PUSPA SADAR BANA

Gambar 3.125
Inovasi PUSPA SADAR BANA

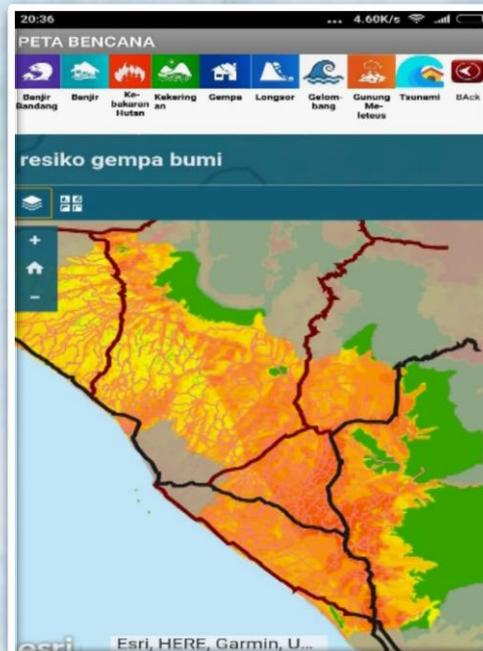


Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Inovasi PUSPA SADAR BANA (PUSAT PELAPORAN SIAGA DARURAT BENCANA) merupakan layanan pengaduan kebencanaan berbasis *Call Center* 112 dan layanan pengaduan melalui media sosial *WhatsApp*;

6. SIMUNA V2

Gambar 3.126
Inovasi SIMUNA V2

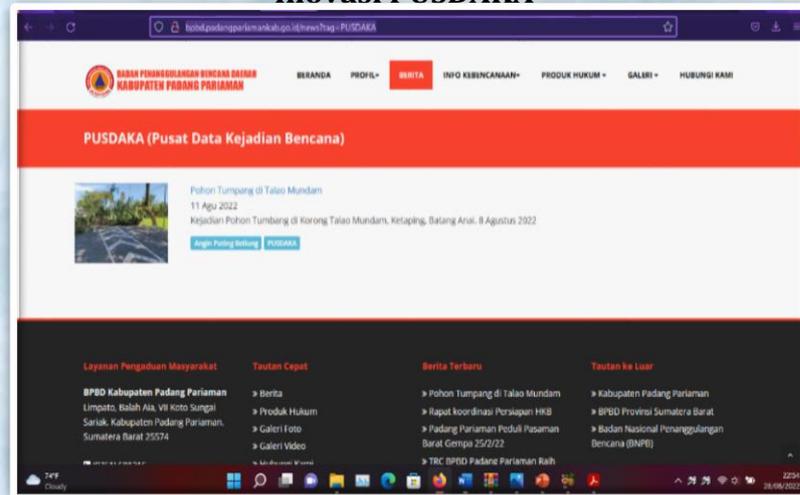


Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Inovasi SIMUNA V2 (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BENCANA) merupakan layanan informasi kebencanaan berbasis Android dan dapat di download melalui *Play Store*;

7. PUSDAKA

Gambar 3.127
Inovasi PUSDAKA

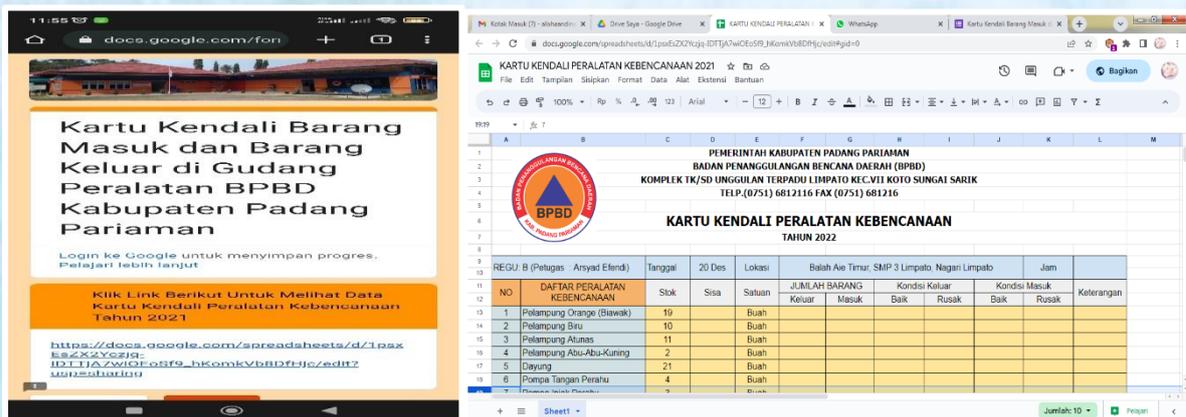


Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Inovasi PUSDAKA (PUSAT DATA KEJADIAN BENCANA) merupakan layanan informasi kejadian kebencanaan berbasis *website* yang bisa diakses masyarakat umum dan menjadi pengetahuan akan informasi terkait kejadian dan bencana alam yang terdampak di Kabupaten Padang Pariaman.

8. RENDA PENA

Gambar 3.128
Inovasi RENDA PENA



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Inovasi RENDA PENA (KARTU KENDALI PERALATAN KEBENCANAAN) merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan petugas Gudang, anggota TRC dalam penyediaan peralatan maupun logistik baik dalam keadaan darurat, maupun tidak darurat. Selain itu inovasi ini dapat memudahkan bagi Pimpinan dalam mengakses

kualitas dan kuantitas peralatan hanya melalui gadget tanpa perlu meninjau ke Gudang peralatan dan logistik.

9. PRINSIPAL R-3P

Gambar 3.129
Inovasi PRINSIPAL R-3P

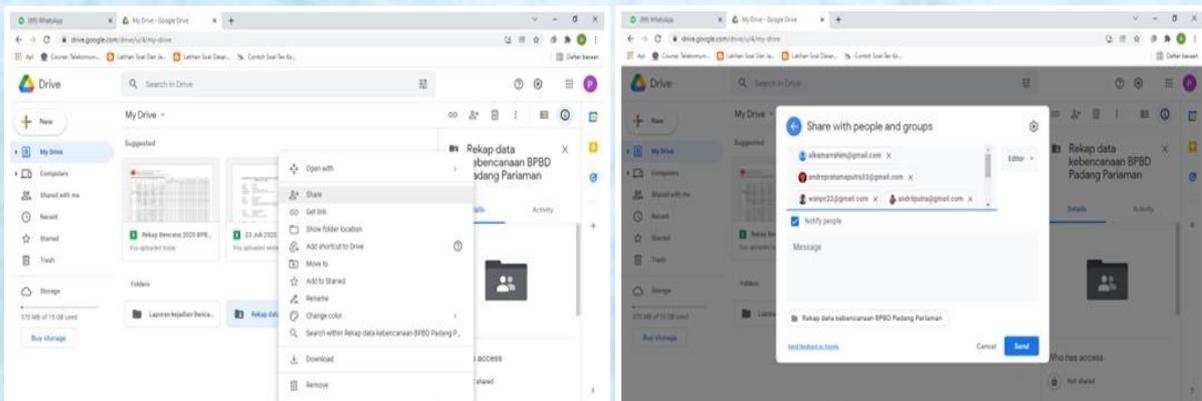


Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Prinsipal R3P (Prinsipal Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) merupakan suatu rangkaian kegiatan prosedur untuk mencapai tujuan oleh BPBD Kab. Padang Pariaman kepada lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nagari, kecamatan, maupun kabupaten. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dan non pemerintah dalam menentukan skala prioritas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

10.DANA PAPA

Gambar 3.130
Inovasi DANA PAPA



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

DANA PAPA (Digitalisasi Data Kebencanaan Padang Pariaman) yaitu sebuah digitalisasi data rekapan kebencanaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang mana data-data kebencanaan tersebut dicadangkan melalui cloud storage agar data lebih aman. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital

yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Dengan melakukan pencadangan data ke cloud storage, kedepannya diharapkan data-data kebencanaan yang ada di Pusdalops-PB BPBD Padang Pariaman menjadi lebih aman dan lebih mudah diakses.

11.SITABA

Gambar 3.131
Inovasi SITABA



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

SITABA (Siswa Tangguh Bencana) yaitu suatu kegiatan sosialisasi edukasi dan pelatihan mitigasi bencana secara masif terhadap seluruh komponen masyarakat terutama kaum rentan korban bencana. Pendekatan psikologis dan traumatis pasca bencana kegiatan dapur umum dan sebagainya. Eksistensi Siswa Tangguh Bencana (SITABA) dengan segala potensi, jejaring organisasi program dan aksi nyata mampu memberikan edukasi dan pemahaman kepada para siswa sebagai generasi penerus dalam penanggulangan bencana.

f) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ini jika dikaitkan dengan program dan kegiatan yang mendukung realisasi kinerja adalah dikarenakan tersedianya sumber dana atau anggaran yang telah dianggarkan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp.22.104.000 sebagai pendamping untuk belanja barang & jasa, dan bantuan dana dari World Bank melalui Program IDRIP yang sudah memfasilitasi semuanya untuk nagari tangguh bencana pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pada tahun 2023 kegiatan DESTANA melalui program IDRIP ini melibatkan berbagai pihak yang telah menyediakan semuanya untuk menunjang kegiatan ini diantaranya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), PT.MISKAT ALAM, BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Fasilitator Daerah (FASDA) dan Fasilitator Desa/Nagari (FASDES).

Adapun Penyebab tidak terbentuknya Nagari Tangguh bencana tahun 2023 adalah karena BPBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 menerima Program IDRIP

dari BNPB dengan bantuan dari World Bank sehingga BPBD Kabupaten Padang Pariaman tidak membentuk Nagari Tangguh Bencana yang baru dan lebih menfokuskan Peningkatan Kapasitas bagi masyarakat didaerah rawan bencana menyesuaikan dengan tujuan dari Program IDRIP.

g) Alternatif Solusi Kedepan Untuk Pencapaian IKU

Alternatif Solusi untuk pencapaian IKU Nagari Tangguh Bencana melalui program peningkatan DESTANA sebagai berikut :

1. **SOSIALISASI DINAGARI**
Sosialisasi adalah proses memperkenalkan masyarakat pada norma dan adat istiadat social. Proses ini membantu individu berfungsi baik dalam masyarakat.
2. **PENGUMPULAN DATA PENILAIAN KETANGGUHAN DESA**
Pengumpulan data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) bertujuan untuk memetakan kondisi dan gambaran awal mengenai tingkat risiko, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas desa dalam menghadapi ancaman tsunami sebagai data dasar (baseline) tingkat ketangguhan bencana desa..
3. **VERIFIKASI PENILAIAN KETANGGUHAN DESA**
Verifikasi penilaian dari data PKD (Penilaian Ketangguhan Desa) suatu nagari yang telah dikumpulkan.
4. **FGD PENILAIAN KETANGGUHAN DESA**
5. **PENGENALAN PENANGGULANGAN BENCANA**
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah desa, forum/lembaga yang sudah didesa/nagari terkait dengan kegiatan destana dan pengenalan mengenai dasar penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana.
6. **PERSIAPAN PEMBENTUKAN FORUM PENANGGULANGAN BENCANA**
FPRB desa/kelurahan merupakan suatu wadah atau mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama para pihak dalam upaya pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan.
7. **PENGUKUHAN FORUM PRB DAN RELAWAN**
Tim relawan desa/kelurahan merupakan wadah yang menaungi individu-individu yang secara sukarela dan siap sedia melaksanakan pengurangan risiko bencana baik dalam kondisi pra bencana, respon darurat dan pasca bencana.
8. **PERSIAPAN PENYUSUNAN PETA RESIKO**
Persiapan penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat.
9. **PENYUSUNAN PETA RESIKO BENCANA**
Penyusunan peta resiko desa dilakukan secara partisipatif dengan keterlibatan aktif dari masyarakat.
10. **FINALISASI PENYUSUNAN PETA RESIKO**

Finalisasi penyusunan peta resiko bencana yang telah dilakukan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat selama proses penyusunan peta resiko bencana.

11. **PERSIAPAN RENCANA PEMBENTUKAN AKSI KOMUNITAS RPB**
Proses persiapan penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana dilakukan secara partisipatif.
12. **PEMBENTUKAN RENCANA AKSI KOMUNITAS**
Proses penyusunan rencana aksi komunitas pengurangan risiko bencana (RAK-PRB) dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur pentahelix tingkat desa berdasarkan peta risiko bencana yang telah disusun.
13. **FINALISASI RENCANA AKSI KOMUNITAS**
Finalisasi RAK mempertimbangkan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di wilayah desa/kelurahan. Agar keberlanjutan RAK PRB dapat terjamin, harus diintegrasikan menjadi bagian dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes).
14. **PERSIAPAN MITIGASI BENCANA**
Persiapan mitigasi bencana dilakukan dengan mempersiapkan penyusunan SOP peringatan dini berbasis komunitas yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada masyarakat dalam merespon informasi peringatan dini bencana. Keluarga tangguh bencana yang memiliki pengetahuan risiko bencana, pengetahuan keadaan darurat bencana, akses informasi formal kebencanaan, pengetahuan lokasi dan rute jalur evakuasi di rumah dan dilingkungannya. Penyusunan dokumen rencana evakuasi dilaksanakan melalui peran aktif masyarakat untuk memastikan akseibilitas jalur evakuasi serta dapat secara inklusif memenuhi kebutuhan anggota masyarakat.
15. **PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA**
Kebutuhan mitigasi bencana mengacu pada dokumen rencana aksi komunitas PRB yang telah disusun. Pelaksanaan mitigasi bencana structural didampingi oleh fasilitator sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan guna menjaga keberlanjutannya.

Gambar 3.132
Sosialisasi DESTANA di Nagari Kuranji



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.133
Sosialisasi DESTANA di Nagari Katapiang



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.134
Sosialisasi DESTANA di Nagari Manggopoh Palak Gadang



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.135
Sosialisasi DESTANA di Nagari Malay V Suku



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.136
Sosialisasi DESTANA di Nagari Pilubang



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.137
Sosialisasi DESTANA di Nagari Ulakan



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam penggunaan anggaran BPBD Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran untuk kegiatan pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana digunakan sesuai kebutuhan.

Uraian	Jumlah (Rp)
ANGGARAN	Rp.22.104.000
BELANJA BARANG & JASA	Rp. 17.220.650
SISA ANGGARAN	Rp. 4.883.350

Berdasarkan data tabel diatas dalam kegiatan Destana tahun 2023 program IDRIP, total anggaran BPBD kabupaten Padang Pariaman untuk Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebanyak Rp.22.104.000. Pada tabel dapat dilihat total anggaran yang telah digunakan dalam kegiatan di tahun 2023 sebesar Rp. 17.220.650 untuk belanja barang dan jasa. Adapun rincian penggunaan

anggaran dalam menunjang keberhasilan pencapaian IKU untuk kegiatan Nagari Tangguh Bencana diantaranya untuk Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Moderator, Honorarium Narasumber, Honorarium Pembawa Acara, Belanja Perjalanan Dinas. Dan dari semua kegiatan tersebut di tahun 2023.

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Anggaran Pada Sub Kegiatan	Rp. 69.396.000,00	Rp. 22.104.000,00
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		
Total Efisiensi APBD		Rp. 47.292.000,00

Anggaran pembentukan nagari tangguh bencana berasal dari belanja operasional dari Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebanyak Rp. 22.104.000.

Penggunaan anggaran pada tahun 2022 yang dibutuhkan untuk pembentukan nagari tangguh bencana pada Nagari Campago Selatan sebanyak Rp. 69.396.000. Sedangkan pada tahun 2023 anggaran pada kegiatan ini BPBD Kab. Padang Pariaman hanya sebagai pendamping dikarenakan dalam menjalankan program IDRIP ini melalui bantuan World Bank. Sehingga efisiensi penggunaan anggran APBD dalam pembentukan nagari tangguh bencana pada tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Total Efisien APBD} = \text{Rp. 69.396.000} - \text{Rp. 22.104.000} = \text{Rp. 47.292.000}$$

Dari hasil pengurangan tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Padang Pariaman Telah Berhasil Melakukan Efisiensi APBD untuk kegiatan Nagari Tangguh Bencana yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di BPBD sebanyak Rp.47.292.000. Efisiensi ini bisa dilakukan karena pada tahun 2023 BPBD Kabupaten Padang Pariaman menerima Program IDRIP dari BNPB yang semua anggaran melalui bantuan World Bank dan untuk narasumbernya sudah diatur dan dipanitia kan oleh BNPB serta pihak ketiga, yang mana BPBD Kabupaten Padang Pariaman hanya menganggarkan untuk pendamping. Sehingga dengan adanya program IDRIP ini BPBD Kabupaten Padang Pariaman mampu meningkatkan kapasitas bagi Masyarakat Nagari Tangguh Bencana dengan penghematan biaya dikarenakan bantuan yang didapatkan dari World Bank.

**SASARAN STRATEGIS 19**
Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman

Sasaran Strategis “Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman” merupakan Misi ke-7 pada RPJMD Kabupaten Padang 2021-2026 yaitu: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Adapun Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)”.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Capaian indikator kinerja utama “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.97
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi		
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar	470,4	1.205	256,16	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Nilai realisasi yang dicapai sekarang sudah mencapai target rencana investasi yang ditetapkan oleh RPJMD. Capaian nilai realisasi investasi tahun 2023 naik dari tahun 2022. Keberhasilan realisasi investasi yang melebihi target itu disebabkan beberapa faktor diantaranya yaitu kesadaran pelaku usaha atas pelaporan dengan beberapa langkah pengawasan pelaporan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) selanjutnya adanya kegiatan pembinaan mengenai pengawasan perizinan berbasis risiko kepada pelaku usaha. Peningkatan realisasi investasi tersebar berbagai sektor yaitu sektor Konstruksi (55%), Sektor Industri Makanan (17%), Sektor Transportasi (7%), Sektor Gudang dan Telekomunikasi (5%), Sektor Peternakan (1%), Sektor Industri Karet (1%), Sektor Perumahan (1%) dan sektor perhotelan (1%) serta sektor lainnya (17%) . Adapun capaian yang terbesar yaitu di sektor konstruksi dengan adanya kegiatan proyek strategis nasional yang sedang jalan seperti pengerjaan jalan tol.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (IKU DPMPTP) adalah: jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), mencapai realisasi Rp. 1.205.309.454.918 (Satu Triliun Dua Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan Persentase 256,16 % dari Target yang ditetapkan

yaitu Rp. 470.400.000.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah). Nilai ini dihitung berdasarkan realisasi investasi perusahaan baik PMA maupun PMDN dengan kategori “Sangat Berhasil”. Adapun formulasi perhitungan untuk IKU ini adalah sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) (Rp)

b) Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada tahun 2022, realisasi investasi mencapai nilai sebesar 463,3M. Jika dibandingkan dengan jumlah target sebesar 403,3M, maka capaian kinerja tahun 2022 telah melebihi target dengan persentase sebesar 114,96%. Dengan pertimbangan tersebut, dilakukan perubahan target tahun 2023 sebesar 470,4 M.

Berikut perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.98
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian (%)	Interpretasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar	403,3	463,6M	470,4	1.205	256,16	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2022, pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi dengan capaian realisasi sebesar 256,16%. Hal ini disebabkan karena penghentian pengerjaan proyek strategis nasional (jalan tol) pada tahun 2022, kembali dilanjutkan pengerjaannya pada tahun 2023.

Faktor pendukung :

1. Terlaksananya kegiatan pembinaan mengenai pelaporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha.
2. Terlaksananya kegiatan pengawasan mengenai perizinan berbasis risiko.
3. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya.
4. Karena adanya dukungan Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal yang mendukung Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Faktor penghambat:

1. Belum sinkronnya pemetaan mengenai RDTR antara tim teknis PUPR dan ATR BPN
2. Belum terakomodirnya beberapa sektor yang memerlukan rekomendasi tata ruang didalam regulasi RDTR Kabupaten Padang Pariaman.
3. Belum adanya peta potensi investasi dan dokumen perencanaan penanaman modal.
4. Belum maksimalnya pencapaian realisasi investasi pada sector lainnya diluar sector Konstruksi.
5. Belum ditetapkan Peraturan Bupati tentang RUPMK

c) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021-2023 dengan Target Jangka Menengah**Tabel 3.99****Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2021-2023 dengan Target RPJMD**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	Milyar	365,1	403,3	445,4	997,6	463,6	1.205

Realisasi Indikator Kinerja “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” pada tahun 2021 yaitu 997,6 Milyar dengan target RPJMD sebesar 365,1 Milyar. Pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 463,6 Milyar dengan target RPJMD sebesar 403,3 Milyar. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi kinerja jauh melebihi mencapai target yang ditetapkan RPJMD dimana realisasi sebesar 1.205 Milyar dengan target RPJMD sebesar 445,4 Milyar.

d) Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja**I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

Dengan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah dengan target yang di tetapkan yaitu 2 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 6.160.000 dan Terealisasi 1 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 1.380.000 atau 22,40 serta Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dengan target 1 dokumen, dan 1 kegiatan dan pagu Anggaran Rp. 19.080.500,00 1 dokumen, dan 1 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 5.720.000,00 yang menjadi faktor pendukung dari pencapaian ini diantaranya adalah:

1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha (300 pelaku usaha);
2. Peningkatan kegiatan usaha di sektor konstruksi.

Sedangkan yang menjadi hambatan diantaranya adalah:

1. Permasalahan kesesuaian Tata Ruang untuk beberapa rencana investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Belum adanya peta potensi investasi yang siap ditawarkan kepada investor;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan promosi investasi;
4. Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan pada program pengembangan iklim penanaman modal.

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Target pelaksanaan kegiatan promosi sebanyak 4 (empat) kali Event tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh:

Faktor penghambat sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya data peluang investasi yang sudah memiliki kajian ilmiah;

2. Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan pada program promosi penanaman modal;
3. Tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan promosi investasi diakhir tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. Adanya beberapa sektor peluang investasi yang belum terekspose dalam pembuatan audio visual karena kecilnya anggaran kegiatan.

Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut:

1. Keikutsertaan dalam kegiatan pameran expo dan forum investasi di Batam;
2. Dukungan dari OPD teknis dalam memberikan informasi terkait dengan sektor potensi investasi. (DPUPR, DLHPKPP, ATR BPN, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Parpora, Dis Dagnakerkop & UKM, Dinas Perhubungan).

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 4 Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 112.583.766 ,- dengan realisasi anggaran Rp. 46.109.128 atau 40.96 %.

Terlaksananya Program Pelayanan Penanaman Modal disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut:

1. Kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Kabupaten Padang Pariaman;
2. Sosialisasi yang selalu diberikan kepada para pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Faktor penghambat sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan untuk Investor dalam berinvestasi (mengembangkan usaha);
2. Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus izin usaha.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Terlaksananya Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.100.000, - dengan realisasi anggaran Rp. 1.780.000,-atau 29,18%.

Terlaksananya Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan aplikasi perizinan meminimalisir terjadinya redudansi data, Aplikasi perizinan yang terintegrasi dengan kementerian atau lembaga OPD teknis terkait, aplikasi perizinan yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik, data perizinan yang sudah terpusat dalam satu aplikasi, adanya pengklasifikasian data dan informasi perizinan per item izin dan didukung oleh Aplikasi simpel.
2. Lama proses perizinan pada DPMPTSP telah diatur oleh Permendagri 138 Tahun 2017, Adanya Inovasi dan Aplikasi dalam Proses Perizinan yang bisa langsung di Akses oleh Pelaku usaha.

Faktor penghambat sebagai berikut:

1. Banyaknya perubahan format izin karena disebabkan adanya regulasi-regulasi baru, Belum adanya aplikasi dalam penyajian dokumen perizinan, petugas arsiparis yang belum ada, Seringnya terjadi gangguan pada aplikasi OSS karena proses maintenance dari pusat yang tidak informasikan.
 2. Proses perizinan yang melibatkan beberapa OPD Teknis terkait sehingga membutuhkan waktu dalam proses pengeluaran/penerbitan Perizinan.
- V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL dengan Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran DAK NON FISIK dan DAU sebesar Rp.556.700.000, - terealisasi sebesar Rp. 512.880.500, - atau 92,13%. Meningkatkan Nilai Investasi karena terjadinya peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang sebabkan oleh:

Faktor Pendukung sebagai berikut :

1. Sistem perizinan secara elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung;
2. Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/Investasi di daerah;
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan kepada pelaku usaha. Pada sektor yaitu sektor Konstruksi, Sektor Industri Makanan, Sektor Transportasi, Sektor Gudang dan Telekomunikasi, Sektor Peternakan, Sektor Industri Karet, Sektor Perumahan, dan sektor perhotelan, serta sektor lainnya. Adapun capaian yang terbesar yaitu di sektor konstruksi dengan adanya kegiatan proyek strategis nasional yang sedang jalan seperti pengerjaan jalan tol.

Sedangkan Faktor Penghambat diantaranya adalah:

1. Masih adanya pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memahami tentang proses perizinan secara elektronik;
2. Rendahnya tingkat kemampuan penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM.

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2023 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; Tahun 2023 Meningkatkan 160% dengan nilai Rp. 1.205.309.454.918,00 sedangkan target yang ditetapkan yaitu Rp. 445.400.000.000,00.

Gambar 3.138

Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan Berusaha Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.139
Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Pengimputan LKPM Untuk
Melaporkan Realisasi Investasinya ke dalam Laporan Kegiatan
Penanaman Modal (LKPM)



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Gambar 3.140
Pendampingan Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengalami Permasalahan dalam
Pengurusan Izin dan Peralihan Aplikasi terkait LKPM Menggunakan Aplikasi OSS
(Online Single Submission)



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

e) Analisis Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Meningkatkan Nilai Investasi karena terjadinya peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang disebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

1. Sistem perizinan secara elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung;
2. Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/Investasi di daerah;
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan kepada pelaku usaha.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” diantaranya adalah:

1. Masih adanya pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memahami tentang proses perizinan secara elektronik;
2. Rendahnya tingkat kemampuan penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia, kita masih dapat melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat/pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian DPMPTP yang masih bisa

meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendapatkan penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB dengan kategori nilai (A-) menjadi nilai (A) "Pelayanan Prima". Dengan Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 6.200.562.370. dan realisasi sebesar Rp. 5.717.945.945 sehingga selisih Rp. 482.616.425 (Efisiensi anggaran terletak pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan anggaran 22,40% dari anggaran yang ditetapkan program Pelayanan Penanaman Modal dengan anggaran 40,96% dari anggaran yang ditetapkan. dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan anggaran 29,18% dari anggaran yang ditetapkan.

g) Penghargaan Tahun 2023

Terdapat beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTP) adalah sebagai Berikut :

1. Penghargaan Kepada DPMPTP oleh Bupati Padang Pariaman dengan Pelayanan Publik sehingga mendapatkan OPINI KULITAS TINGGI (KATEGORI B) Pada Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 Dari Ombusman RI

Gambar 3.141
Penghargaan "OPINI KULITAS TINGGI (KATEGORI B)"
Pada Penilaian Kepatuhan Tahun 2023 Dari Ombusman RI



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

2. Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang pariaman Tahun 2023 dengan Nilai 89,98

Gambar 3.142
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan & pelaksanaan kebijakan serta sumber daya yang di telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2023, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.100
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023			
Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	Rp. 1.428.935.942.184,00	Rp. 1.282.174.368.996,84	89,77%
Belanja Daerah	Rp. 1.506.699.351.579,00	Rp. 1.297.240.562.261,01	86,10%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.428.935.942.184,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.282.174.368.996,84 (89,77%). Sedangkan dilihat dari aspek belanja daerah di targetkan sebesar Rp. 1.506.699.351.579,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.297.240.562.261,01 dengan persentase capaian realisasi sebesar 86,10%. Adapun perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.101
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 154.407.759.462,00	Rp. 145.849.606.801,84	94,46%
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.274.028.182.722,00	Rp. 1.136.864.762.195,00	89,23%
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 500.000.000,00	Rp. 500.000.000,00	0,00%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp. 154.407.759.462,00 dan terealisasi sebesar Rp. 145.849.606.801,84 (94,46%). Adapun perbandingan antara target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.102
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 66.050.000.000,00	Rp. 59.314.559.690,81	89,90%
2	Pendapatan Restribusi Daerah	Rp. 3.865.000.000,00	Rp. 3.546.661.460,00	91,76%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 8.088.751.162,00	Rp. 8.088.751.162,00	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 76.404.008.300,00	Rp. 74.899.634.489,03	98,03%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp. 154.407.759.462,00	Rp. 145.849.606.801,84	94,46%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Desa (DID) Dan Dana Desa
2. Pendapatan Transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.274.028.182.722,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.136.864.762.195,00 (89,23%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.103
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.188.905.511.670,00	Rp. 1.099.859.463.897,00	92,51%
2	Dana perimbangan	Rp. 1.087.361.386.670,00	Rp. 1.049.977.586.347,00	96,56 %
3	Dana Insentif Daerah (DID)	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0%
4	Dana Desa	Rp. 101.544.125.000,00	Rp. 49.881.877.550	49,12%
5	Pendapatan Transfer antar daerah	Rp. 85.122.671.052,00	Rp. 37.005.298.298,00	43,47 %

6	Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 84.822.671.052,00	Rp. 37.005.298.298,00	43,63 %
7	Bantuan Keuangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
Jumlah Pendapatan Transfer		Rp. 300.000.000,00	Rp. 0,00	0,00%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dana lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000,00. Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.104
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	0 %
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp. 500.000.000,00	Rp. 0,00	0,00 %

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Adapun pagu dan Realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target, sasaran strategis, dan indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 720.505.052.943,00 dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023 sebesar Rp. 671.739.725.598,82 atau 93,23%. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran strategis tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tabel 3.105
Prestasi dan Penghargaan 2022-2023

No	Tahun	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi/Lembaga Penyelenggara
1	2022	Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2022	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
2	2022	Penghargaan Zona Integritas sebagai unit pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
3	2022	Penghargaan Innovation Government Award Tahun 2022	Nasional	Kementerian Dalam Negeri Republik



				Indonesia
4	2022	Penghargaan Peringkat 1 Kabupaten Kota Terinovatif tingkat Sumatera Barat	Provinsi	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
5	2022	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	Provinsi	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
6	2023	Penghargaan <i>Innovative Government Award (IGA)</i> Tahun 2023, dengan kategori "Kabupaten Terinovatif"	Nasional	Kementerian Dalam Negeri
7	2023	Penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Koperasi Madya Pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional Ke 76 Tahun 2023	Nasional	Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
8	2023	Penghargaan sebagai pembina BPR Pembangunan Padang Pariaman Tahun 2023 kepada Bupati Padang Pariaman Suhatri bur	Nasional	Majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda)
9	2023	Penghargaan Top Pengelolaan BPR dengan peringkat bintang 4 Tahun 2023	Nasional	Majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda)
10	2023	Penghargaan Top CEO BUMD Tahun 2023	Nasional	Majalah Top Business, bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-Otda)
11	2023	Penghargaan Penganugerahan Parahita Ekapraya Tahun 2023	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
12	2023	Penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 Juara Harapan Kategori Daya Tarik Pengunjung "Desa Wisata Nyarai"	Nasional	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
13	2023	Penghargaan Pemerintah Daerah Pengelola Dana Desa Terbaik Semester I Tahun 2023 Lingkup KPPN Padang	Provinsi	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang
14	2023	Penghargaan Ayah Bunda GenRe Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 untuk Bapak Bupati dan Ibu Ketua TP PKK	Provinsi	Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
15	2023	Penghargaan Kabupaten Terinformatif pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik	Provinsi	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

**PENGHARGAAN PENYELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK KATEGORI "PELAYANAN
PRIMA" TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN INNOVATION GOVERNMENT
AWARD TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN PREDIKAT KEPATUHAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN PERINGKAT 1 KABUPATEN
KOTA TERINOVATIF TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN INNOVATIVE GOVERNMENT
AWARD (IGA) DENGAN KATEGORI
"KABUPATEN TERINOVATIF" TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN SEBAGAI TOKOH PENGGERAK
KOPERASI MADYA PADA PUNCAK PERINGATAN
HARI KOPERASI TINGKAT NASIONAL KE-76
TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN TOP BUMD AWARD
TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN PENGANUGERAHAN PARAHITA
EKAPRAYA TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN ANUGERAH DESA WISATA
INDONESIA (ADWI) JUARA HARAPAN
KATEGORI DAYA TARIK PENGUNJUNG "DESA
WISATA NYARAI" TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLA DANA DESA TERBAIK SEMESTER I
TAHUN 2023 LINGKUP KPPN PADANG**



**PENGHARGAAN AYAH BUNDA GENRE TERBAIK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**



**PENGHARGAAN KABUPATEN TERINFORMATIF
PADA AJANG ANUGERAH KETERBUKAAN
INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2023**



padang piriaman
berjaya!

BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman secara garis besar telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Berdasarkan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja (*Performance Results*) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 menggambarkan bahwa hampir semua dapat dipenuhi dan secara umum mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Hasil pengukuran seluruh sasaran tersebut telah dapat direalisasikan dengan sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja yakni sebesar 116,09%. Pencapaian indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 9 (Sembilan) indikator (37,5%) dengan Kategori sangat berhasil, antara lain :
 - Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan realisasi 43% dari target 28%;
 - Indikator Kinerja Persentase Penegakan Perda dengan realisasi 77,42% dari target 67,5%;
 - Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dengan realisasi 72,86% dari target 70,00%;
 - Indikator Kinerja PDRB/*Income* Per Kapita dengan realisasi 55,54 (Rp. Juta) dari target 50,50 (Rp. Juta);
 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan realisasi 67,74% dari target seharusnya sebesar 18,88%.
 - Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 14,19 Tahun dari target 14,12 Tahun;
 - Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka realisasi 6,69% dari target 7,17%;
 - Indikator Kinerja Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah dengan realisasi WTP dari target WTP;
 - Indikator Kinerja Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan realisasi 1.205 Milyar dari target 470,4 Milyar.
2. Terdapat 15 (Lima Belas) indikator (62,5%) dengan Kategori berhasil, antara lain :
 - Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi nilai indeks sebesar 93,08 dari target nilai indeks sebesar 94;
 - Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan realisasi 65,63% dari target 69% ;
 - Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik dengan realisasi 68,50% dari target 70,00%;
 - Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Pertanian/Perkebunan terhadap

PDRB dengan realisasi Rp. 2.745.289,91 dari target Rp. 2.862.238,58;

- Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dengan realisasi 10,19% dari target 10,75%;
- Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB dengan realisasi sebesar 10,48% dari target sebesar 13,3%;
- Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan realisasi sebesar 6,34% dari target sebesar 5,80%;
- Indikator Kinerja Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB dengan realisasi “B” dari target “BB”;
- Indikator Kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD) dengan realisasi sebesar 3,2904* dari target sebesar 3,300;
- Indikator Kinerja Indeks E-Government/SPBE dengan realisasi sebesar 2,62 dari target sebesar 2,76;
- Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 3,88 dari target sebesar 4,66;
- Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup dengan realisasi sebesar 69,70 Tahun dari target sebesar 69,89 Tahun;
- Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dengan realisasi 1,7327 dari target sebesar 1,70;
- Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan realisasi 76,57% dari target 92%;
- Indikator Kinerja Nagari Tangguh Bencana dengan realisasi 16 Nagari dari target 17 Nagari.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan adanya alokasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.506.699.351.579,00 dengan realisasi Rp. 1.297.240.562.261,01 (86,10%) dan Anggaran Pendapatan Daerah dengan besaran Rp. 1.428.935.942.184,00 dengan realisasinya sebesar Rp. 1.282.714.368.996,84 (89,77%).

4.2 RENCANA PERBAIKAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat capaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi terget kinerja, hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu sebagai upaya perbaikan kedepan, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah konkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapaian tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terus menjaga semangat untuk berinovasi terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.



2. Melaksanakan program-program dan kegiatan prioritas dalam pencapaian sasaran strategis daerah;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pelaporan data kinerja yang terintegrasi (SIMAK Kinerja) yang selaras dengan target-target daerah dalam dokumen perencanaan daerah dan di manfaatkan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman. Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini, secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimasa akan datang.

LAMPIRAN



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

BAB II PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

IKU Perangkat Daerah untuk :

- a. perencanaan Jangka Menengah;
- b. perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- c. penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 4

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III KETENTUAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita DaPerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,


RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah (IKU)	<i>(Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah) / ("Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran" keseluruhan) x 100 %</i>	DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN	SKPD Pengelola DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda (IKU)	<i>(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan) / ("Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang di" laporkan dan dipantau) x 100 %</i>	SATPOL-PP DAMKAR	SATPOL-PP DAMKAR
3.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IKU)	<i>(IPM Perempuan) / "IPM Laki-laki"</i>	DINSOS P3A	DINSOS P3A
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang (IKU)	<i>(Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang) / ("Panjang jaringan " jalan kabupaten) x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR
5.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	<i>(Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) / "Luas irigasi Kabupaten" x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (IKU)	<i>(Realisasi RTRW) / ("Rencana Peruntukan) x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR

7.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB (IKU)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	BPS	DISTAN- KP, DISNAKESWAN
8.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	BPS	DISDAGNAKER KOP & UKM
9.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	DPMPPTP	DPMPPTP
10.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Miskin}) / (\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}) \times 100 \%$	BPS	DINSOS P3A
11.	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (IKU)	$(\text{Nilai PDRB}) / (\sum \text{penduduk}) \times 100 \%$	BPS	SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKONOMI
12.	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKU)	$\sum \text{UPLM} / (\text{ALM}) \times 100''$ UPLM = Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kepustakaan UPLM 2 = Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	DISKEARPUS	DISKEARPUS

			<p>UPLM 3 = Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat</p> <p>UPLM 4 = Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk</p> <p>UPLM 5 = Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan</p> <p>ALM = Aspek Literasi Masyarakat (jumlah UPLM)</p> <p>Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p>						
13.	Peningkatan Mutu Pendidikan		Harapan lama sekolah (IKU)			BPS	BPS		DISDIKBUD
14.	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing		Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)		$\frac{(\text{Jumlah Pengangguran})}{(\text{Jumlah angkatan kerja})} \times 100 \%$	BPS	BPS		DISDAGNAKER KOP & UKM
15.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Opini BPK terhadap laporan keuangan (IKU) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB (IKU)		Penilaian opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK	BPKD			SELURUH PERANGKAT DAERAH
			Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD (IKU)		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dari Kemenpan RB		BAGIAN ORGANISASI		SELURUH PERANGKAT DAERAH
16.	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)		Indeks E-Government / SPBE (IKU)		Nilai LPPD hasil penilaian Kemendagri		BAGIAN TPKS		SELURUH PERANGKAT DAERAH
17.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		Indeks Pelayanan Publik (IKU)		Indeks SPBE hasil Penilaian Kemenpan RB		DISKOMINFO		DISKOMINFO
					Indeks Pelayanan Publik hasil penilaian Kemenpan RB		BAGIAN ORGANISASI		SEKRETARIAT DAERAH

18.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (IKU)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	BPS	DINKES/RSUD
19.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah Penduduk tahun } (n-1)) / \text{Jumlah Penduduk}$	BPS	DPPKB
20.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	"jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan " / "jumlah total rumah tangga " x 100 %	DPUPR	DPUPR
21	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana (IKU)	Jumlah Nagari tangguh bencana	BPBD	BPBD
22	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKU)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	DPMPPTP	DPMPPTP

BUPATI PADANG PARIAMAN,





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 2 Februari 2023
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	28%
2	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	67,5%
		Indeks Pembangunan Gender	94,00
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	62,72%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.862.238,58 (Juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,60%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13,30%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	5,80%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	49,46 (Juta)
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14,12 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KemenPAN RB	BB
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	2,800 (Tinggi)
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government /SPBE	2,76
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,57
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,29 Tahun
16	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,29%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	445,4 Milyar

No	Program	Anggaran
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 4.635.094.690
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 465.113.100
3	Program Pelembagaan Pengurusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 56.300.000
4	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 427.800.070
5	Program Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.700.000
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 69.999.950
7	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 74.484.676.608
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 8.334.525.000
9	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 5.090.848.040
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 3.346.135.928
11	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.434.563.500
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 12.386.520.832
13	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 97.511.000
14	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 4.900.000
15	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp 369.458.430
16	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 591.624.000
17	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 307.172.000
18	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 19.999.750
19	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 38.844.000
20	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 432.434.390
21	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 199.999.630

22	Program Pengembangan Ekspor	Rp	21.002.730
23	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	59.999.910
24	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	100.000.000
25	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	37.185.000
26	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp	34.194.600
27	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	406.770.000
28	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	19.120.250
29	Program Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp	154.233.000
30	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	52.220.000
31	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	200.925.470
32	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp	130.479.000
33	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	50.000.000
34	Program Pengembangan UMKM	Rp	726.572.500
35	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	629.999.870
36	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	186.905.455
37	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	30.903.050
38	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	109.323.415.382
39	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	98.842.850
40	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	12.282.200
41	Program Hubungan Industrial	Rp	92.115.888
42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	173.617.985.900
43	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	4.182.879.885

44	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	915.946.440
45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	318.976.915.839
46	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	762.811.100
47	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	447.614.750
48	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	258.436.000
49	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	247.409.200
50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	36.000.000
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	750.180.500
52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	38.114.000
53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	28.600.000
54	Program Aplikasi Informatika	Rp	3.308.107.651
55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	135.786.160
56	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	66.510.601.090
57	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.961.006.300
58	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp	450.336.000
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1.764.511.660
60	Program Pengendalian Penduduk	Rp	354.799.000
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	3.843.044.400
62	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2.141.731.700
63	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	3.651.177.200
64	Program Penanggulangan Bencana	Rp	31.243.701.200
65	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	27.005.000

66	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	30.004.000
67	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	127.865.360
68	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	566.700.000
69	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	7.140.000
JUMLAH		Rp	842.557.798.408

Parit Malintang, 2 Februari 2023
BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR

Jabatan : BUPATI PADANG PARIAMAN

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 05 Oktober 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	28%
2	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	67,5%
		Indeks Pembangunan Gender	94.00
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	69%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	70%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.862.238,58 (Juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,75%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	13.30%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	5,80%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	50,50 (Juta)
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	14,12 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.17%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KemenPAN RB	BB
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	3,300
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government /SPBE	2,76
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,66
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	69,89 Tahun
16	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	17 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	470,4 Milyar

No	Program	Anggaran
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6,140,346,020
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 409,490,950
3	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 608,946,200
4	Program Perlindungan Perempuan	Rp 43,450,000
5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 579,088,570
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 397,531,000
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 109,541,490
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 17,111,173,845
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 2,158,120,282
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 12,722,329,422
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 748,150,027
12	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1,166,057,560
13	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 12,624,460,000
14	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 21,459,000
15	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 8,042,200
16	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 369,458,430
17	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 565,697,625
18	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 79,000,000
19	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 10,000,000
20	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 8,000,000
21	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 311,905,000

22	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	29,195,000
23	Program Pengembangan Ekspor	Rp	10,000,000
24	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	47,862,300
25	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	99,999,090
26	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	29,335,000
27	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp	13,850,000
28	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	406,770,000
29	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	12,040,000
30	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	241,913,000
31	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	87,022,000
32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	52,220,000
33	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	286,409,600
34	Program Penanganan Bencana	Rp	713,693,872
35	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	629,996,720
36	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	631,315,442
37	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	37,929,805
38	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp	82,736,705,756
39	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	299,964,950
40	Program Hubungan Industrial	Rp	57,648,000
41	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	2,382,133,500
42	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	3,601,802,000
43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	885,944,800

44	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	427,595,737,845
45	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	701,023,100
46	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	444,607,000
47	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	1,435,400,000
48	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	621,563,480
49	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	145,500,000
50	Program Administrasi dan Tata Pemerintahan	Rp	162,673,500
51	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	997,385,000
52	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	38,114,000
53	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	28,600,000
54	Program Aplikasi Informatika	Rp	2,989,141,050
55	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	155,545,140
56	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	107,069,199,863
57	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	2,302,775,800
58	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp	402,195,500
59	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	1,230,160,000
60	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp	11,520,065,082
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	5,360,884,901
62	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	2,085,559,900
63	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	3,676,637,660
64	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1,325,791,400
65	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	25,240,500

66	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	29,870,000
67	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	112,583,766
68	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	566,700,000
69	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	6,100,000
JUMLAH		Rp	720,515,052,943


BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu		Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%				Realisasi	%	
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh / Hafizah	28%	(Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah)/(Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran* keseluruhan) x 100 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	43%	155%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.140.346.020,00	Rp 6.021.265.958,00	98,06%		
2	Peningkatan ketentrangan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegekan Perda	67.5%	(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan) / (Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang di laporkan dan dipantau) x 100 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	77.42%	114,70%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 409.490.950,00	Rp 376.920.050,00	92,05%		
		Indeks Pembangunan Gender	94	(IPM Perempuan)/(IPM Laki-laki)	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	93,08	99,02%	Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 608.946.200,00	Rp 540.752.961,00	88,80%		
								Program Perlindungan Perempuan	Rp 43.450.000,00	Rp 37.274.000,00	85,79%		
								Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 579.088.570,00	Rp 578.272.558,00	99,86%		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 397.531.000,00	Rp 375.677.830,00	94,50%										
Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 109.541.490,00	Rp 104.974.808,00	95,83%										
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	69%	(Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang)/(Panjang jaringan * jalan kabupaten) x 100 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	65,63%	95,11%	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 17.111.173.845,00	Rp 14.842.352.205,00	86,74%		
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	70%	(Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik)/(Luas irigasi Kabupaten* x 100 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	68,50%	97,86	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 2.158.120.282,00	Rp 1.780.248.967,00	82,49%		
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	70%	(Realisasi RTRW/(Rencana Pembentukan) x 100%	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	72,86%	104,08%	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 12.722.329.422,00	Rp 10.835.423.769,00	85,17%		
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 748.150.027,00	Rp 719.668.502,00	83,46%		
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Rp. 2.862.238,58 (Juta)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	Rp. 2.745.289,91	95,91%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.166.057.560,00	Rp 708.293.210,00	60,74%		
								Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 12.624.460.000,00	Rp 12.235.731.035,00	96,92%		
								Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 21.459.000,00	Rp 17.045.000,00	79,43%		
								Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 8.042.200,00	Rp 7.982.200,00	99,25%		
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 369.458.430,00	Rp 347.656.170,00	94,10%		
								Program Penyuluhan Pertanian	Rp 565.697.625,00	Rp 508.847.275,00	89,95%		
								Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 79.000.000,00	Rp 35.415.180,00	44,83%		
								Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 10.000.000,00	Rp 9.209.500,00	92,09%		
								Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 8.000.000,00	Rp 3.320.000,00	41,50%		
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	10,75%	(Nilai PDRB Sektor Perdagangan)/(Nilai PDRB Kabupaten) x 100 %	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	10,19%	94,79	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 311.905.000,00	Rp 287.920.530,00	92,31%		
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 29.195.000,00	Rp 19.470.586,00	66,69%										

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja		Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
						Realisasi	%			Realisasi	%	
								Program Pengembangan Ekspor	Rp 10.000.000,00	Rp 6.910.000,00	69,10%	
								Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 47.862.300,00	Rp 46.144.000,00	96,41%	
								Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 99.999.090,00	Rp 94.821.768,00	94,82%	
								Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 29.335.000,00	Rp 29.223.500,00	99,62%	
								Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 13.850.000,00	Rp 13.810.000,00	99,71%	
								Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 406.770.000,00	Rp 397.864.300,00	97,81%	
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp 12.040.000,00	Rp 12.000.000,00	99,67%	
								Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 241.913.000,00	Rp 232.458.727,00	96,09%	
								Program Pengembangan dan Pembangunan Industri	Rp 52.220.000,00	Rp 39.766.169,00	76,15%	
7	Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	5,80%	(Jumlah Penduduk Miskin)/(Jumlah Penduduk Seluruhnya) x 100%	$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	6,34%	90,69%	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 286.409.600,00	Rp 280.694.461,00	98%	
								Program Penanganan Bencana	Rp 713.693.872,00	Rp 673.085.600,00	94,31%	
8	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	50,50 (Juta)	$\frac{(\text{Nilai PDRB})/(\sum \text{penduduk})}{\text{target}} \times 100\%$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	55,54 (Juta)	109,98%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 629.996.720,00	Rp 556.217.594,00	88,29%	
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,88	$\sum \text{UPLM}/(\text{ALM}) \times 100$	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	67,75	358,84%	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 631.315.442,00	Rp 506.125.740,00	80,17%	
								Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp 37.929.805,00	Rp 24.415.000,00	64,37%	
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,12 Tahun	Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	14,19 Tahun	100,50%	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 82.736.705.756,00	Rp 75.988.353.509,00	91,84%	
11	Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,17%	$\frac{(\text{Jumlah Pengangguran})/(\text{Jumlah angkatan kerja})}{\text{target}} \times 100\%$	$\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	6,69%	93,30%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 299.964.950,00	Rp 297.322.350,00	99,12%	
								Program Hubungan Industrial	Rp 57.648.000,00	Rp 51.424.000,00	89,20%	
12	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	Penilaian opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	WTP	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 2.382.133.500,00	Rp 1.793.120.996,00	75,27%	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.601.802.000,00	Rp 3.396.533.687,00	94,30%	
								Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 885.944.800,00	Rp 783.075.858,00	88,39%	
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	BB	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dari Kemenpan RB	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	B	98,83%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 427.595.737.845,00	Rp 408.370.643.782,00	95,50%	
								Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 701.023.100,00	Rp 401.963.248,00	57,34%	
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 444.607.000,00	Rp 200.232.710,00	45,04%	
								Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 1.435.400.000,00	Rp 1.337.949.267,00	93,21%	

								Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 621.563.480,00	Rp 548.532.428,00	88,25%	
								Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp 145.500.000,00	Rp 78.178.000,00	53,73%	
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD	3,300	Nilai LPPD hasil penilaian Kemendagri	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	3,2904*	99,71%*	Program Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 162.673.500,00	Rp 133.699.921,00	82,19%	
13	Birokrasi yang Efisien dan Efektif (Kapabel)	Indeks E-Government/SPBE	2,76	Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	2,62	94,93%	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 997.385.000,00	Rp 966.064.064,00	96,86%	
								Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 38.114.000,00	Rp 23.012.600,00	60,38%	
								Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 28.600.000,00	Rp 16.150.000,00	56,47%	
								Program Aplikasi Informatika	Rp 2.989.141.050,00	Rp 2.861.238.017,00	95,72%	
14	Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,66	Indeks Pelayanan Publik hasil Penilaian Kemenpan RB	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	3,88	84,90%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 155.545.140,00	Rp 91.879.125,00	59,07%	
15	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	69,89 Tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	69,70 Tahun	99,73%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 107.069.199.863,00	Rp 94.949.934.885,00	88,68%	
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2.302.775.800,00	Rp 1.878.326.156,00	81,57%	
								Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Rp 402.195.500,00	Rp 236.024.241,00	58,68%	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.230.160.000,00	Rp 945.489.622,00	76,86%	
16	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,70%	$\frac{Jumlah\ Penduduk\ Tahun\ n - Jumlah\ Penduduk\ tahun\ (n-1)}{Jumlah\ Penduduk\ tahun\ (n-1)} \times 100\ %$	$\frac{(2 \times target) - realisasi}{target} \times 100$	1,73%	98,23%	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 11.520.065.082,00	Rp 11.037.179.556,82	95,81%	
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 5.360.884.901,00	Rp 5.046.714.471,82	94,14%	
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 2.085.559.900,00	Rp 2.077.218.750,00	99,60%	
17	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	92%	"jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan" / "jumlah total rumah tangga" x 100 %	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	76,57%	83,29%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 3.676.637.660,00	Rp 3.171.727.169,00	86,27%	
18	Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	17 Nagari	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	16 Nagari	94,12%	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.325.791.400,00	Rp 1.086.471.201,00	81,95%	
19	Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	470,4 Milyar	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp)	$\frac{realisasi}{target} \times 100$	1.205 Milyar	256,16%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 25.240.500,00	Rp 7.100.000,00	28,13%	
								Program Promosi Penanaman Modal	Rp 29.870.000,00	Rp 25.643.645,00	85,85%	
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 112.583.766,00	Rp 46.109.128,00	40,95%	
								Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 556.700.000,00	Rp 512.880.500,00	92,13%	
								Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 6.100.000,00	Rp 1.780.000,00	29,18%	

padang pantiaman
berjaya!

(LKJIP) *tahun* **2023**